



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
2023



KATA PENGANTAR



engan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang petunjuk teknis, pelaporan dan tata cara reviunya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

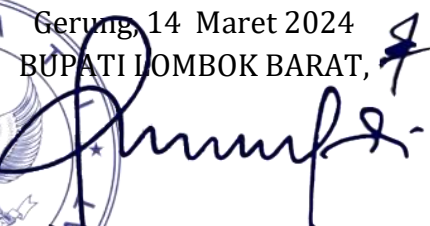
Secara substantif LAKIP Kabupaten Lombok Barat merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta penjelasan tentang Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Good Governance dan Clean Government. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan SAKIP.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 ini, khususnya seluruh Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta Tim Perumus yang telah bekerja secara maksimal

dalam pelaksanaan kegiatan selama penyusunan LAKIP ini.

LAKIP ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah- mudahan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah tahun 2023 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Gerung, 14 Maret 2024
BUPATI LOMBOK BARAT, 
 Hj. SUMIATUN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang di implementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 5 misi, 5 tujuan, 12 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 merupakan tahun Keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 dan salah satu media pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah. LAKIP tidak sekedar hanya alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Capaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 yakni sebanyak 20 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis. Terdapat 18 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator kinerja sasaran dengan kategori **Tinggi** dan 1 indikator dengan kategori **Rendah**.

Dalam 20 indikator kinerja, terdapat 11 indikator telah mencapai target RPJMD dengan perolehan persentase di atas 100%. Sedangkan indikator kinerja dengan perolehan persentase dibawah 100% sebanyak 9 indikator.

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99,35
2. Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) 98,14
3. Harapan Lama Sekolah (HLS) 98,11
4. Nilai PDRB Perkapita 96,81%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 96,00%
6. Angka Kemiskinan 95,41%
7. Kabupaten Layak Anak (KLA) 92,35
8. Nilai AKIP Daerah 82,37%
9. Nilai realisasi investasi 59.60%

Pendapatan daerah berdasarkan LRA (laporan realisasi anggaran) tahun 2023 adalah Rp. 1,836,569,928,096 yang terbagi ke dalam 12 sasaran strategis dan 20 Indikator kinerja daerah. Walaupun nilai ini menurun dari tahun sebelumnya, capaian kinerja Pemda **Sangat Tinggi** yaitu 98,62%, bahkan mengalami kenaikan sebesar 4,58% dari tahun sebelumnya.

Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 1,739,670,397,520 atau terserap sebesar 94,72% dari total pendapatan daerah Rp. 1,836,569,928,096. Adapun Sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah 96,899,530,576 atau 5,28%. Dalam sisa anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 80,113,850,376 atau 4,36% dari 7 sasaran strategis (8 indikator kinerja utama) daerah yang telah tercapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunakan harga di bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.

Di samping itu, beberapa prinsip dalam akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan atau pemberi amanah. Sehingga, beberapa upaya dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu perumusan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah agar lebih spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka waktu dalam pencapaiannya (*SMART*), termasuk juga di dalamnya terkait penentuan besaran target kinerja agar adanya hasil analisis yang lebih mendalam sehingga pengukuran kinerja pada akhir tahun anggaran dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	1
1.2.1. Data Geografi Wilayah.....	1
1.2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	3
1.2.3. Jumlah ASN di Kab. Lombok Barat	5
1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia	8
1.2.5. Inflasi	10
1.3. Permasalahan dan Isu Strategis	12
1.3.1. Permasalahan	12
1.3.2. Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1. RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
2.3. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Pengukuran Kinerja	29
3.1.1. Capaian Kinerj Tahun 2023	30
3.1.2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023.....	32
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024	34
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan standar Nasional	36
3.2. ANALIS CAPAIAN KINERJA	37
3.2.1. Faktor Keberhasilan dan Faktor Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023	37

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	37
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	46
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.....	48
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah	53
5. Meningkatnya akses infrastruktur dasar	64
6. Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan.....	69
7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat.....	90
8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	98
9. Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	101
10. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107
11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	112
12. Menurunnya Risiko Bencana.....	115
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	118
3.4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2023	120
BAB IV INOVASI DAN PRESTASI KERJA.....	123
4.1. INOVASI.....	123
4.2. PRESTASI KABUPATEN LOMBOK BARAT	127
BAB V PENUTUP	129
5.1. KESIMPULAN.....	129
5.2. UPAYA PERBAIKAN DAN PEMULIHAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan	2
Tabel 1.2. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022	4
Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	5
Tabel 1.4. Angka Partisipasi menurut jenjang pendidikan di kabupaten Lombok Barat	10
Tabel 1.5. Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf di Kabupaten Lombok Barat	9
Tabel 1.6 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023	11
Tabel 1.7 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin diKabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023	16
Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lombok Barat	21
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.....	24
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023	27
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	30
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023	32
Tabel 3.4. Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun2023dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2024	34
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	36
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran	37
Tabel 3.7. Data Jenis layanan per Perangkat Daerah/ UPT/ Unit Kerja diKabupaten Lombok Barat Tahun 2023	37
Tabel 3.8. Rekap IKM Perangkat Daerah/ UPT/ Unit Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023	44
Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran.....	46
Tabel 3.10. Capaian Kinerja Indikator Sasaran.....	47
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran.....	48
Tabel 3.12. Rincian hasil evaluasi AKIP Kabupaten Lombok Barat ole KemenpanRB	48
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran.....	53
Tabel 3.14 Capaian kinerja dari Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah.....	53

Tabel 3.15	Ketersediaan Angkutan Umum pada Jaringan Trayek di Wilayah Kabupaten Lombok Barat	53
Tabel 3.16.	Capaian Indikator Ketersediaan Jalur Trayek Menuju Destinasi Pariwisata Tahun 2023.....	56
Tabel 3.17.	Ketersediaan Jaringan Trayek menuju Pasar di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.....	61
Tabel 3.18.	Rincian Panjang dan Kemantapan Jalan Kabupaten	63
Tabel 3.19.	Capaian Kinerja Sasaran.....	64
Tabel 3.20.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran.....	64
Tabel 3.21.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani	65
Tabel 3.22.	Capaian kinerja Indikator Sasaran	67
Tabel 3.23.	Capaian Layanan Air Minum Tahun 2023	67
Tabel 3.24.	Capaian layanan sanitasi tahun 2023	68
Tabel 3.25	Capaian Kinerja sasaran.....	68
Tabel 3.26	Capaian kinerja dari Indikator Sasaran	68
Tabel 3.27	Realisasi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023	73
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan Tahun 2023.....	76
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Indikator Sasaran.....	78
Tabel 3.30	Pertumbuhan industri per kecamatan	79
Tabel 3.31	Nilai Ekspor Perdagangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023	80
Tabel 3.32	Data UKM di Kabupaten Lombok Barat.....	86
Tabel 3.33	Data Koperasi di Kabupaten Lombok Barat	87
Tabel 3.34	Data Kondisi Jaringan Irigasi	88
Tabel 3.35.	Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023	89
Tabel 3.36.	Capaian Kinerja Sasaran.....	90
Tabel 3.37.	Capaian kinerja Indikator Sasaran	90
Tabel 3.38.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran.....	97
Tabel 3.39.	Capaian Kinerja Sasaran.....	98
Tabel 3.40.	Capaian kinerja Indikator Sasaran	98
Tabel 3.41.	Capaian Kinerja Sasaran.....	101
Tabel 3.42.	Capaian kinerja Indikator Sasaran	102
Tabel 3.43.	Capaian kinerja Indikator Sasaran	102
Tabel 3.44.	Capaian Kinerja Sasaran.....	107
Tabel 3.45.	Capaian kinerja Indikator Sasaran	107
Tabel 3.46.	Capaian Kinerja Sasaran.....	112
Tabel 3.47.	Capaian Kinerja Sasaran.....	115
Tabel 3.48.	Capaian kinerja Indikator Sasaran	115

Tabel 3.49. Realisasi Anggaran Tahun 2023	118
Tabel 3.50. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023.....	120
Tabel 5.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah KabupatenLombok Barat Tahun 2023	129

Gambar 1.1. Profile ASN Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023	5
Gambar 2.1. RPJMD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024	20

Grafik 1.1. Persentase luas daerah menurut kecamatan	3
Grafik 1.2. Jumlah ASN Tahun 2023 Kabuapten Lombok Barat berdasarkan rentang usia	6
Grafik 1.3. Jumlah PNS berdasarkan Jenis kelamin dan Golongan	6
Grafik 1.4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Jabatan	7
Grafik 1.5. Grafik Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Jabatan	7
Grafik 1.6. Proyeksi pensiun pegawai di kabupaten Lombok Barat.....	8
Grafik 1.7. Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat	9
Grafik 1.8. Rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2022 dan 2023	10
Grafik 1.9. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2023	13
Grafik 1.10. Prevalensi stunting tahun 2020-2023.....	13

I. PENDAHULUAN

I-1. LATAR BELAKANG



alam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Di sinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 ini disusun sehubungan dengan komponen yang keempat dari Sistem AKIP, yaitu pelaporan kinerja. Sebagai sebuah laporan kinerja, LAKIP ini amat penting artinya sebagai salah satu indikator penilaian laporan pertanggungjawaban Bupati di depan sidang DPRD, di samping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

I-2. GAMBARAN UMUM

I-2.1. Data Geografi Wilayah

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang secara geografis terletak antara 8,25° – 8,55° Lintang Selatan dan 115,46° – 116,20° Bujur Timur, secara geografisnya memiliki batas wilayah sebagai berikut Sebelah Selatan : 8°55'.19"LS – 116°0'5"BT, Sebelah Barat : 8°45'.11,15"LS – 115°49,12'.04"BT, Sebelah Timur Selatan : 8°52'22.29"LS - 116°6'33.7"BT, Sebelah Timur Barat: 8°24'.33.82"LS - 116°20'15.62"BT. Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten dengan letak geografis yang menguntungkan.

Dalam segi pembangunan wilayah, pemandangan alam yang indah, tanah yang subur, maupun sumber air yang melimpah ada di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat dapat disebut sebagai pintu gerbang bagi Pulau Lombok karena pelabuhan penyeberangan berada di kabupaten ini.

Tabel. 1.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ² /sq.km)	Persentase (%)
Sekotong	344,25	37,30
Lembar	77,20	8,36
Gerung	60,31	6,53
Labuapi	23,88	2,59
Kediri	21,14	2,29
Kuripan	25,03	2,71
Narmada	128,78	13,95
Lingsar	115,47	12,51
GunungSari	84,17	9,12
Batu Layar	42,68	4,62
Jumlah	922,91	100

Sumber : BPS, Lombok Barat dalam Angka

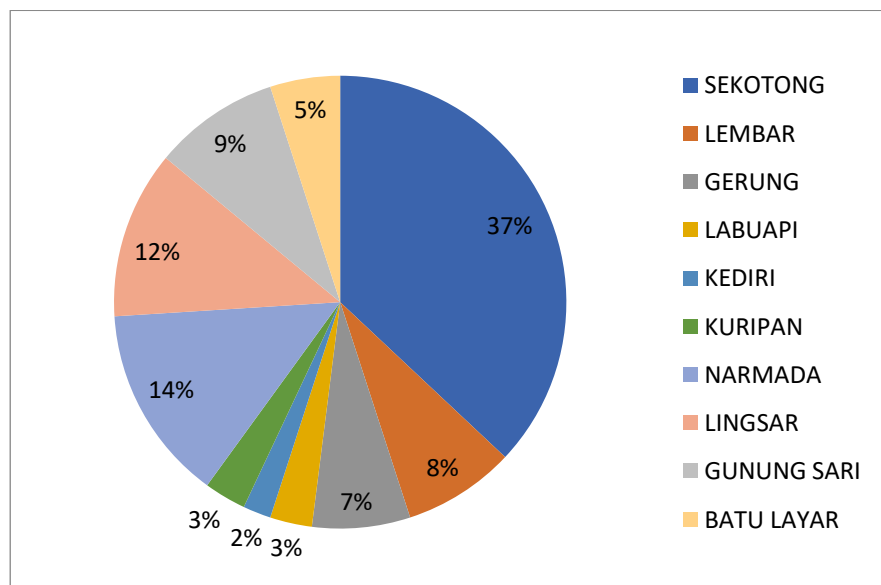
Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 922,91 km². Sebesar 37,03% dari luas Kabupaten Lombok Barat merupakan Wilayah Kecamatan Sekotong, yaitu dengan luas 344,25 km² sedangkan Kecamatan Kediri merupakan kecamatan yang paling sempit dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dimana luasnya hanya mencapai 21,14 km². Walau Kecamatan Sekotong merupakan wilayah terluas di Kabupaten Lombok Barat, ia memiliki perkembangan yang lebih lambat dibanding dengan kecamatan lain. Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut :

- ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- ketinggian 100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 48% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- ketinggian 500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
- ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut:

- Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
- Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dan
- Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Grafik 1.1. Persentase luas daerah menurut kecamatan



I-2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara administrative, Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2023 terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Kecamatan Narmada memiliki jumlah desa dan dusun terbanyak yaitu 21 desa, dengan 133 dusun. Kecamatan Kuripan sebagai kecamatan dengan jumlah desa dan dusun paling sedikit yaitu 6 desa, 40 dusun. Tabel berikut menyajikan secara rinci jumlah desa/kelurahan serta luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2023.

Tabel 1.2. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Sekotong	9	106	344,25	37,30
2	Lembar	10	87	77,20	8,36
3	Gerung	11/3	71	60,31	6,53
4	Labuapi	12	73	23,88	2,59
5	Kediri	10	74	21,14	2,29
6	Kuripan	6	40	25,03	2,71
7	Narmada	21	133	128,78	13,95
8	Lingsar	15	94	115,47	12,51
9	Gunungsari	16	103	84,17	9,12
10	Batulayar	9	63	42,68	4,62
Jumlah		119/3	844	922,91	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2023

Sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan, penduduk merupakan aset potensial bagi pembangunan. Penduduk yang besar dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan, memungkinkan penggalan sumberdaya alam yang dimiliki, memacu pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana social ekonomi, serta merupakan pasar potensial bagi berbagai produk. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesar **753.6 ribu jiwa**, dimana angka ini merupakan angka yang menempatkan Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten nomor 3 dalam hal jumlah penduduk di Provinsi NTB.

Berdasarkan hasil sensus penduduk sepanjang 2020-2023, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat sebesar 1,60 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena di pengaruhi faktor kematian, kelahiran dan migrasi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat masih lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2022 yaitu sebesar 1,71 Persen. Sex rasio di Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 sebesar 100,86. Selanjutnya Kecamatan Narmada merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak 107.201 jiwa, sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit 43.672 jiwa.

Jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk seperti halnya piramida, dimana pada umur muda jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk usia tua. Penduduk usia produktif memang mendominasi di Lombok Barat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan penduduk usia lanjut. Besarnya penduduk usia 0 hingga 19 tahun dapat disikapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pendidikan. Karena penduduk usia tersebut berada pada usia sekolah, apabila mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak maka kualitas SDM Lombok Barat akan rendah.

Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan, mencapai 816,59 jiwa/km² di tahun 2023. Kecamatan Kediri merupakan kecamatan terpadat di Lombok Barat. dengan luas wilayah hanya

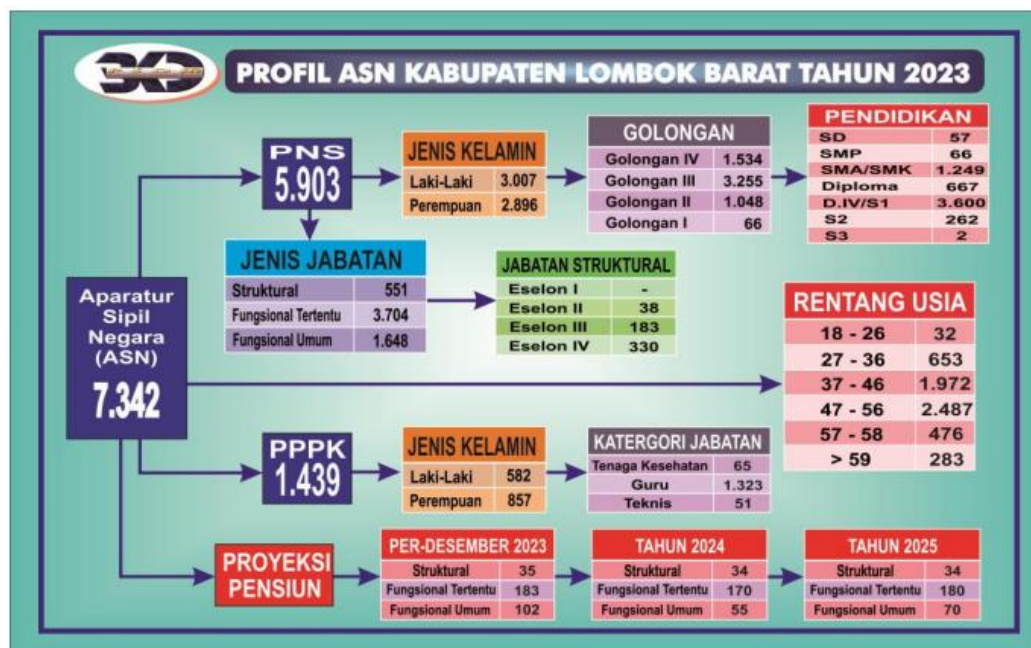
sebesar 21,14 km² kepadatan penduduk di Kecamatan Kediri mencapai 3137,13 jiwa/km². Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram menjadi kawasan pemukiman penyangga, yaitu Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Batulayar. Sebagai kecamatan penyangga, kepadatan penduduk di lima kecamatan tersebut juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Status sebagai kecamatan penyangga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Sekotong	344,25	69.124	200,80
2	Lembar	77,20	56.840	736,27
3	Gerung	60,31	93.592	1551,85
4	Labu Api	23,88	82.480	3453,94
5	Kediri	21,14	66.319	3137,13
6	Kuripan	25,03	43.672	1744,79
7	Narmada	128,78	107.201	832,44
8	Lingsar	115,47	79.176	685,68
9	Gunung Sari	84,17	99.229	1178,91
10	Batu Layar	42,68	56.008	1312,28
Lombok Barat		922,91	753.641	816,59

I-2.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Barat

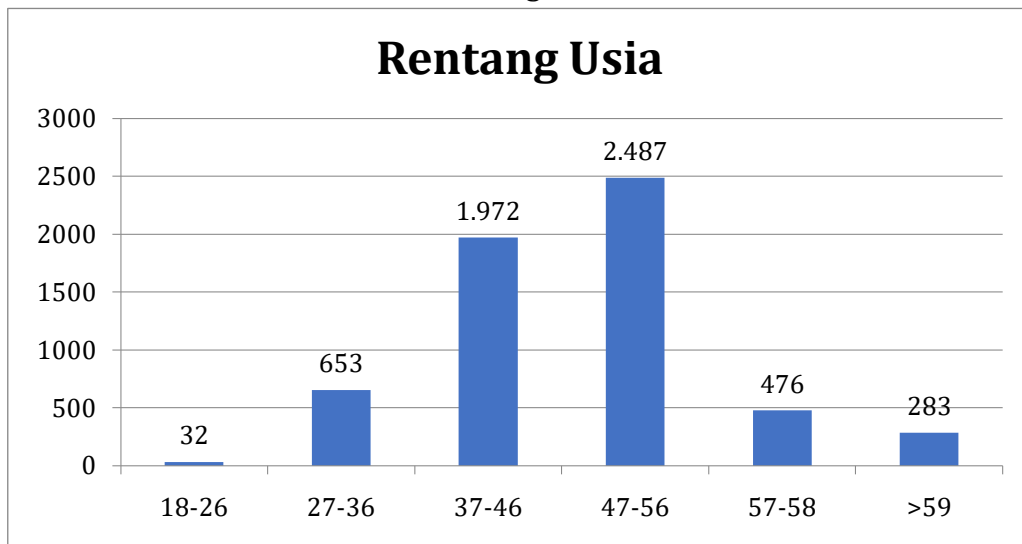
Gambar 1.1. Profile ASN Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023



Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSDM Lobar

Jumlah ASN Tahun 2023 di Kabupaten Lombok Barat adalah 7.342 orang yang terdiri atas 5.903 PNS dan 1.439 PPPK. Jika diproyeksikan berdasarkan rentang usia, maka menghasilkan diagram berikut :

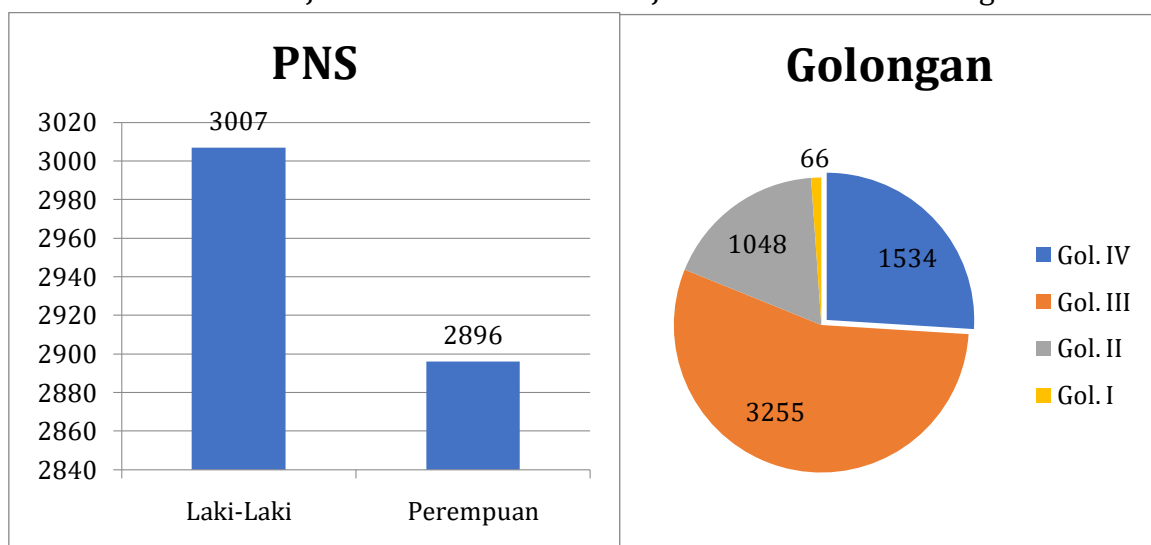
Grafik 1.2. Jumlah ASN Tahun 2023 Kabuapten Lombok Barat berdasarkan rentang usia



a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

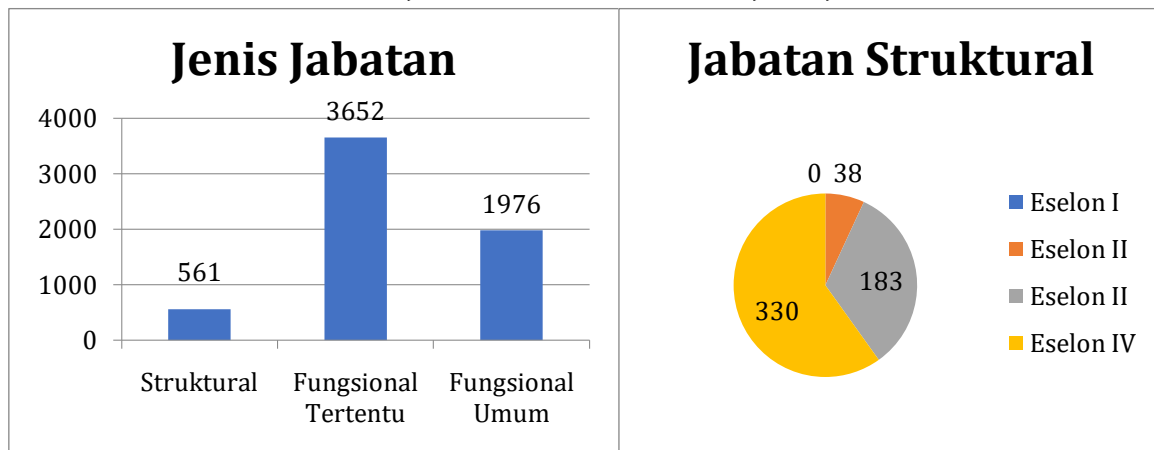
Jumlah PNS di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 sebanyak 5.903 pegawai terdiri dari 3.007 PNS berjenis kelamin laki-laki dan 2.896 PNS berjenis kelamin perempuan. Sejumlah PNS tersebut tersebar ke dalam beberapa jenis jabatan, yaitu Jabatan Struktural sejumlah 551 pegawai, Jabatan Fungsional Tertentu sejumlah 3.704 pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sejumlah 1.648. Profile PNS di Kabupaten Lombok Barat disajikan dalam beberapa diagram berikut :

Grafik 1.3. Jumlah PNS berdasarkan Jenis kelamin dan Golongan



Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSDM Lobar

Grafik 1.4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Jabatan

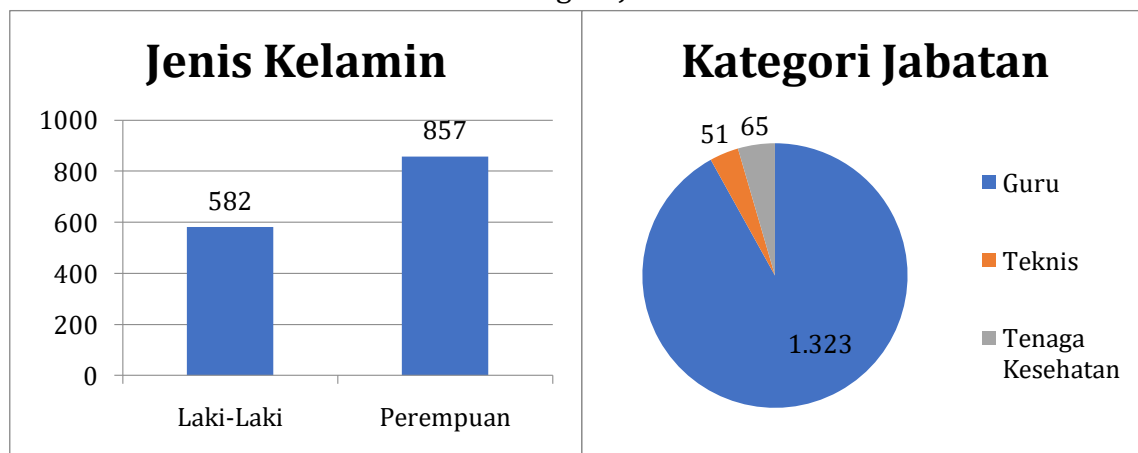


Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSDM Lobar

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pada tahun 2023 Kabupaten Lombok Barat mengangkat 1.439 pegawai dengan perjanjian kinerja. Angka tersebut ditempatkan dalam 3 kategori dimana didominasi oleh kategori Guru sejumlah 1.323 pegawai dan kategori teknis sejumlah 51 pegawai dan tenaga kesehatan sejumlah 65. Proyeksi pegawai PPPK di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dalam diagram berikut :

Grafik 1.5. Grafik Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Jabatan

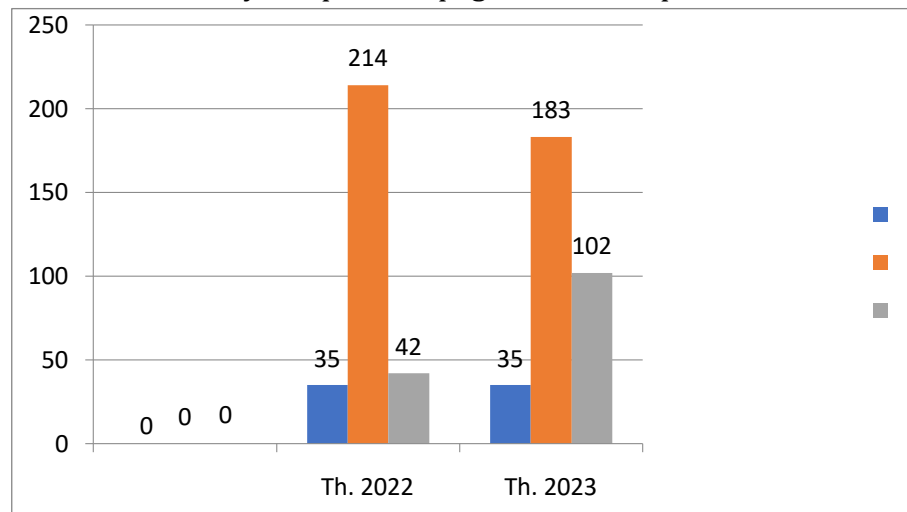


Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSDM Lobar

c. Proyeksi Pensiun

Proyeksi pensiun PNS Kabupaten Lombok Barat per Desember 2023 sebanyak 320 pegawai yang terdiri dari 35 orang pegawai struktural, 183 orang pegawai jabatan fungsional tertentu dan 1022 orang pegawai jabatan fungsional umum. Proyeksi pensiun pegawai kabupaten Lombok Barat disajikan dalam diagram berikut :

Grafik 1.6. Proyeksi pensiun pegawai di kabupaten Lombok Barat



Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSPDM Lobar

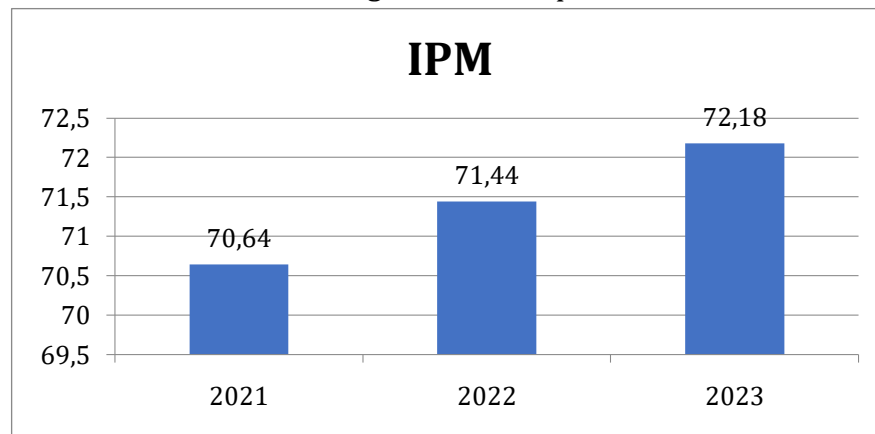
I-2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian tertentu karena mewakili beberapa faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia penduduk Lombok Barat dapat dinilai menggunakan indikator salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). IPM menggambarkan empat komponen yaitu :

1. Angka Harapan Hidup, mewakili bidang kesehatan
2. Angka Rata-Rata Lama sekolah
3. Harapan Lama Sekolah, digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan.
4. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan dimana bertujuan untuk mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai ukuran kualitas hidup.

Grafik 1.7. Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat



Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat

Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2021-2023 menempati peringkat ke-4 se Provinsi Nusa Tenggara Barat, diketahui pada tahun 2022 IPM Kabupaten Lombok Barat berada pada angka 71,44 dan meningkat 0,74 pada tahun 2023 menjadi 72,18. Berdasarkan presentasi diatas perkembangan IPM tersebut bersifat Tinggi. Hal ini menunjukkan beberapa komponen perkembangan IPM di Kabupaten Lombok Barat yaitu :

1. Angka Harapan Hidup dimana bayi baru lahir diharapkan dapat hidup hingga usia 67,63 Tahun.
2. Rata-rata Lama Sekolah dimana penduduk usia 25 tahun keatas rata-rata menempuh pendidikan selama 6,6 tahun atau setara kelas 1 SMP. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sampai 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 1.4 Angka Partisipasi menurut jenjang pendidikan di kabupaten Lombok Barat

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka partisipasi Kasar (APK)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	99,51	99,91	99,69	105,35	105,44	106,88
SMP/MTs/Sederajat	85,39	87,22	87,09	100,53	92,25	96,47
SMA/SMK/MA/Sederajat	63,83	63,59	71,78	94,90	93,21	92,07

Sumber data : BPS, (Survei Sosial Ekonomi (Susenas))/BPS kab. Lombok Barat

3. Harapan Lama Sekolah dimana anak usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh pendidikan selama 13,96 tahun atau setara dengan perguruan tinggi semester empat. Persentase penduduk berumur 15 Tahun keatas yang melek huruf menurut kelompok umur di Kabupaten Lombok Barat, 2021, 2022 dan 2023.

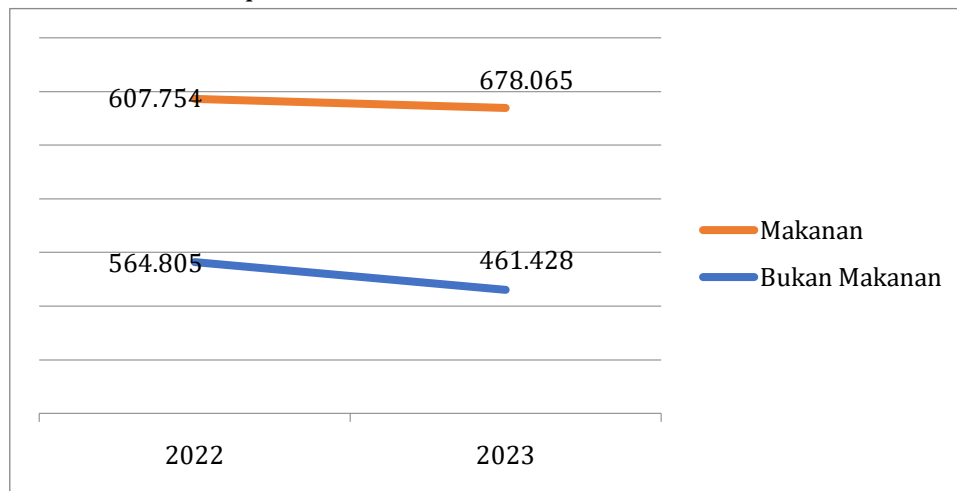
Tabel 1.5. Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf di kabupaten Lombok Barat

Kelompok umur	2021	2022	2023
15-19	100,00	99,24	100,0
20-24	100,00	100,00	98,84
25-29	99,66	99,25	100,00
30-34	98,02	97,65	99,22
35-39	93,39	95,14	99,50
40-44	91,46	90,94	92,61
45-49	85,86	82,63	81,78
50+	59,95	51,37	54,04
Jumlah	86,89	84,90	85,26

Sumber data : BPS, (Survei Sosial Ekonomi (Susenas))/BPS kab. Lombok Barat

4. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan, dimana rata-rata setiap penduduk mengeluarkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebesar 13,66 juta rupiah selama setahun. Grafik rata rata pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 dan 2023.

Grafik 1.8. Rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2022 dan 2023



Sumber data : BPS, (Survei Sosial Ekonomi (Susenas))/BPS kab. Lombok Barat

I-2.5. Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menggambarkan tingkat harga rata - rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata- rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi. yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat begitu pula sebaliknya. Perkembangan inflasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Lombok Barat	%	1.76	0.58	3.15	6.20	3,01
Provinsi NTB	%	1.87	0.60	3.16	6,23	3,02
Nasional	%	2.27	1.68	3.13	5.47	2.61

Inflasi Kabupaten Lombok Barat pada periode tahun 2016- 2020 cenderung berfluktuasi seperti halnya inflasi di tingkat provinsi NTB dan inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,20% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,58%. Rata-rata inflasi Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun terakhir adalah yang terendah dibandingkan Provinsi NTB. Fokus pengendalian inflasi pada tahun 2023 adalah melakukan Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga, untuk merealisasikan hal tersebut kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Sinergi kebijakan pengendalian inflasi daerah mampu membuat pluktuasi harga di Kabupaten Lombok Barat terkendali, upaya pengendalian harga dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga geliat produksi di tingkat UMKM tetap ada. Salah satunya dengan pemanfaatan IT dalam bentuk transformasi digital untuk pemasaran produk UMKM. Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar harga tetap terkendali. Harga yang wajar dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya untuk menjaga stabilitas harga *volatile food* dilakukan melalui upaya memperkuat empat pilar strategi yang mencakup :

- 1) Keterjangkauan Harga,
 - Pemantauan Harga Pangan Strategis
 - Pasar Murah Kebutuhan Pokok.
 - Himbuan Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi
- 2) Bantuan Permodalan bagi pelaku UKM/IKMKetersediaan Pasokan,
 - Pemantauan Dan Inspeksi Di Beberapa Gudang Distributor
- 3) Kelancaran Distribusi
 - Peningkatan kualitas Jalan Jalur distribusi
 - Pengaturan dan prioritas kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok pada saat-saat tertentu
 - Kerjasama Distribusi pangan dengan Pemerintah Kabupaten Bangli

I-3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**I-3.1. PERMASALAHAN****a. Urusan Pendidikan**

Sektor pendidikan sebagai salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral bersama-sama dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini, masih relatif rendahnya rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2022 berada pada angka 6,60 tahun dan tahun 2023 mencapai 6,87 tahun atau setara dengan SMP Kelas VII. Capaian ini masih jauh berada di bawah rata-rata Provinsi NTB yang pada tahun 2022 mencapai 7,61 tahun, dan tahun 2023 mencapai 7,81 tahun, serta masih jauh dibawah rata-rata nasional yang pada tahun 2022 mencapai 8,69 tahun dan tahun 2023 mencapai 8,77 tahun. Angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Barat masih berada pada jenjang pendidikan menengah setara SMP Kelas VII, tepatnya pada semester pertama kelas 1 SMP. Artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan di Lombok Barat.

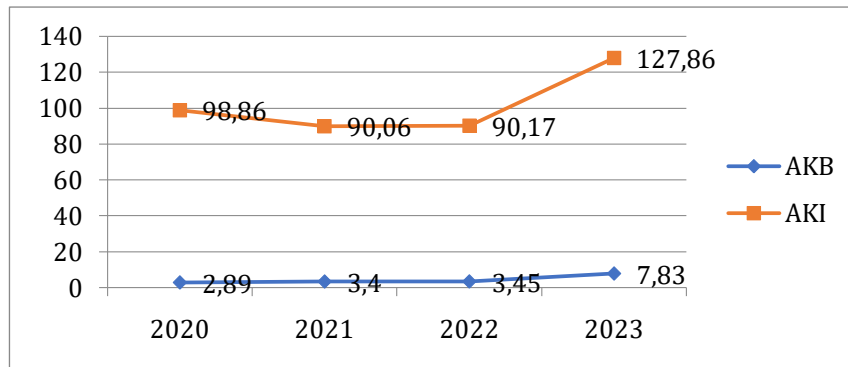
Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI secara umum mengalami penurunan, akan tetapi sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,031 % dan menurun pada tahun 2023 sebesar 0,023%. Kemudian Angka Putus Sekolah untuk Jenjang SMP/MTs masih stagnan pada angka 0,17 % pada tahun 2022 dan 0,1% pada tahun 2023. Angka partisipasi murni tingkat SD/MI mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 99,88% tahun 2022 menurun menjadi 96,59% pada tahun 2023. Sama halnya dengan Angka Partisipasi Murni tingkat SMP/MTs menurun dari 99,94% menjadi 80,16 %. Banyak kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya metode ini diantaranya kepemilikan perangkat yang terbatas, kurangnya penguasaan teknologi, tidak optimalnya pendampingan siswa dirumah dalam mengikuti metode pembelajaran daring, dan biaya yang mahal yg ditimbulkan akibat penyediaan kebutuhan internet dan lainnya.

b. Urusan Kesehatan

Dibidang kesehatan ada beberapa indikator yang menjadi prioritas penanganan yang menjadi permasalahan serius seperti angka kematian bayi. Capaian AKB selama tahun 2020-2023 mengalami trend fluktuatif. Tahun 2020 AKB berada pada angka 2,89 dan pada tahun 2021 menjadi 3,45, hingga tahun 2023 AKB berada pada angka 7,83. Sedangkan, Angka Kematian Ibu atau AKI secara signifikan meningkat pada tahun 2020 berada pada angka 98,86, Tahun 2021 AKI menurun menjadi 90,06. Pada tahun 2022 angka AKI sepat menurun pada angka 90,17 namun AKI mencapai angka tertinggi pada Tahun 2023 yaitu 127,86. Hal ini baik AKB maupun AKI perlu mendapat perhatian serius. Selain itu prevalensi stunting dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan penurunan, hal ini merupakan capaian yang baik bagi

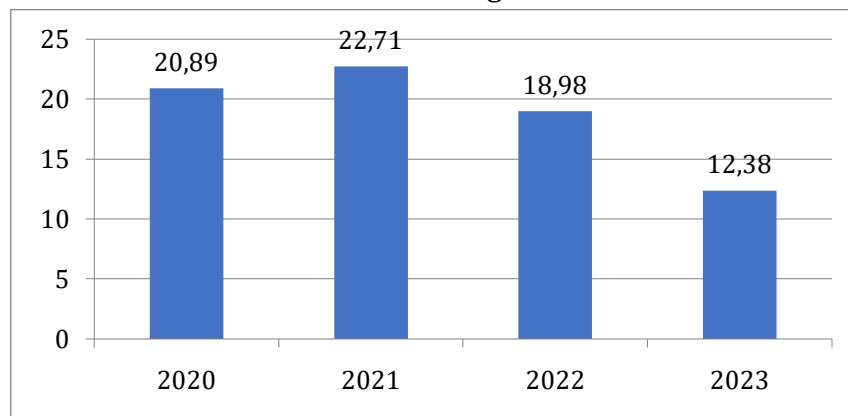
pemerintah Kab. Lombok Barat akan tetapi stunting tetap harus menjadi perhatian penting. Statistik Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Stunting disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 1.9. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2023



Sumber data : website Satu Data Lombok Barat

Grafik 1.10. Prevalensi Stunting Tahun 2020-2023



Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat walaupun trend-nya cenderung meningkat yakni pada tahun 2020 mencapai 66,94 tahun meningkat menjadi 67,63 tahun pada tahun 2023 serta belum tercapainya imunisasi dasar lengkap serta masih tingginya kasus TBC dan kasus HIV/AIDS.

c. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kemantapan jalan dalam rangka meningkatkan konektifitas antar wilayah baru mencapai 69,56% sehingga belum optimal memperkuat antar simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan multiplier effect cukup besar. Pembangunan infrastruktur harus didesain secara berkelanjutan baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dan perkembangan kawasan di kabupaten lombok barat cenderung terjadi secara alami. pada kawasan tertentu terjadi pertumbuhan lebih pesat dari konsep tata ruang yang telah ditetapkan sehingga mobiltas masyarakat, kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat yang berdampak pada kurang terkendalinya pemanfaatan ruang, tidak terpenuhinya akses aman air minum baik kualitas maupun kuantitas, penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kualitas sistem drainase.

d. **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Perlunya rencana terkait dengan pengurangan resiko bencana. Kondisi Kabupaten Lombok Barat memiliki kerawanan bencana alam geologi yang cukup tinggi, pemicu terjadinya bencana geologi diantaranya gempa bumi tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya. Dari 10 kecamatan yang ada, 9 kecamatan dinyatakan rawan longsor dan rawan banjir di beberapa kecamatan serta Bencana Tsunami di Kecamatan Sekotong dan Lembar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Lombok Barat perlu memiliki Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah. Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkauan yang luas, kurangnya ketersediaan pos pembantu, armada dan SDM serta regulasi penanganan bencana yang belum optimal.

e. **Urusan Perumahan dan Permukiman**

Rumah Layak Huni (RLH) belum mencapai 100%. Jumlah dan proporsi penduduk yang semakin lama semakin bertambah, berdampak pula pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang untuk perumahan dan permukiman yang berakibat pada meningkatnya harga tanah sehingga harga jual rumah menjadi relatif tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman beserta sarana pendukungnya. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Permukiman kumuh terus meningkat, pada tahun 2014 Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :1197.A/51/Bappeda/2014 luas wilayah kumuh 230,6 Ha meningkat pada tahun 2020 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 649.A/42/04- Bappeda/2020 Luas wilayah kumuh 420,66 Ha. permukiman kumuh yang terus meningkat belum selaras dengan pembangunan yang telah dilakukan, hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh penanganan permukiman kumuh yang kurang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan rumah rusak terdampak bencana belum optimal. Penanganan rumah tidak layak huni tahun 2022 sebesar 24,61 % dan meningkat menjadi 48,35 % pada tahun 2023.

f. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Belum terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini terkait juga ketersediaan dan akurasi terkait data perlindungan perempuan dan anak, serta capaian Lombok Barat sebagai Kabupaten Layak Anak yang masih memerlukan proses panjang untuk

pencapaiannya. Saat Skor Kabupaten Layak anak mencapai 30 atau setara dengan skor 500 untuk metode perhitungan yang baru, dan masih terpaut cukup jauh untuk menjadikan Lombok Barat menjadi Kabupaten layak Anak dengan skor 1000. Pembangunan manusia berbasis gender dan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga menjadi masalah di Kabupaten Lombok Barat

g. Urusan Lingkungan Hidup

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2022 ke 2023 meningkat dari 64,73% menjadi 66,31%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup sekitar. Akan tetapi Lingkungan Hidup masih menghadapi beberapa masalah yaitu :

- a. Masih luasnya lahan kritis yang belum tertangani ;
- b. Berkurangnya sumber mata air;
- c. Terjadinya konversi lahan hutan, illegal logging dan perambahan hutan;
- d. Masih terjadinya penambangan illegal
- e. Pengelolaan sampah di Lombok Barat baru mencapai 61,42%, sementara sisanya adalah tidak terkelola.
- f. Telah terjadi penurunan debit air beberapa mata air yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang mengindikasikan telah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.
- g. Meningkatnya kebutuhan galian non logam (pasir, batu, tanah urug) akibat pesatnya pembangunan di Lombok Barat dan sekitarnya yang akan berpotensi kerusakan dan kelestarian alam.
- h. Penggunaan Merkuri untuk penambangan emas berpotensi pencemaran air.

h. Urusan Perhubungan

- a. Pelayanan moda transportasi umum masih terbatas;
- b. Rendahnya minat investasi dalam bidang infrastruktur transportasi
- c. Belum tersedianya dokumen perencanaan transportasi laut (Rencana Jaringan Pelayaran antar pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan) dan DLKr/DLKp di sejumlah pelabuhan pengumpan lokal
- d. Rendahnya minat investasi dalam bidang angkutan
- e. Persentase wilayah terhubung dengan moda transportasi baru mencapai 63,64%
- f. Persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar) sebesar 100%%. Kabupaten Lombok Barat memiliki 23 Pasar dengan capaian 100% tersebut, artinya dari 23 pasar yang ada di Lombok Barat, keseluruhan sudah dilewati oleh jaringan trayek pedesaan.
- g. Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata pada tahun 2023

mencapai 100%, artinya keseluruhan obyek wisata pada Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 50 obyek wisata telah dilalui oleh jaringan trayek pedesaan.

i. **Urusan Penanaman Modal**

- a. Rendahnya realisasi investasi PMA. Pada tahun 2023 realisasi investasi PMA sangat jauh dari target yang ditetapkan yaitu 33,30 juta USD atau hanya 21,65% dari target 158,88 juta USD. Menurunnya investasi PMA pada tahun 2022 disebabkan karena banyaknya perusahaan PMA dan PMDN yang sudah memiliki NIB namun tidak merealisasikan kegiatan investasinya sehingga tidak didapatkan data realisasi investasi dengan beberapa alasan baik internal maupun eksternal.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2023 mencapai Rp. 696.060.756.054 atau 97,55 dari target 713.571.071.915.
- c. Masih rendahnya iklim investasi

j. **Urusan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2019-2023) mengalami penurunan. Untuk data tahun terakhir yakni pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat sebesar 14,28% atau sejumlah 100,25 ribu jiwa. Tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan semakin berkurang. Indeks keparahan kemiskinan dapat ditekan sebanyak 1,57 poin, sehingga pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin berada pada persentase 13,63% atau setara dengan 102,71 ribu jiwa.

Tabel 1.7 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Penduduk Miskin (%)
2019	695,0	103,77	15,20
2020	721,5	105,04	15,17
2021	731,8	100,25	14,28
2022	744,3	99,00	13,39
2023	753,6	102,71	13,63

Penurunan Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan yang terendah di Propinsi NTB merupakan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lombok Barat dimana rata-rata angka kemiskinan disemua kabupaten meningkat namun tingkat pendapatan antara penduduk kaya dan miskin dapat ditekan sehingga tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang terlalu tinggi.

k. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masih rendahnya jumlah desa mandiri Rendahnya persentase APBDes yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga masih terbatas

l. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
2. Kesadaran penduduk untuk mengikuti program KB masih rendah
3. Distribusi penduduk tidak merata

I.4. ISU STRATEGIS

1. Aspek Kesejahteraan Rakyat Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat, sejumlah isu yang ditetapkan masuk aspek kesejahteraan rakyat sebagai berikut :

- a. Nilai PDRB Per kapita belum optimal
- b. Angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
- c. IPM
- d. Angka Rata – Rata Lama Sekolah
- e. Angka Usia Harapan Hidup
- f. Persentase Balita Gizi Buruk
- g. Tingkat Pengangguran Terbuka
- h. Indeks Kepuasan Masyarakat
- i. Persentase PAD terhadap Pendapatan masih rendah
- j. Opini BPK
- k. Skor PPH
- l. Kontribusi setiap sektor pembentuk PDRB belum optimal
- m. Pertumbuhan Industri kecil masih rendah

2. Aspek Pelayanan Umum Dalam rangka berupaya memperbaiki pelayanan umum sebagai tugas utama penyelenggaraan pemerintahan, dapat diuraikan beberapa isu dibawah ini

- a. Angka partisipasi murni masih dibawah 100%
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menurun akibat terjadinya bencana
- c. Masih adanya kasus kematian bayi
- d. Masih adanya kasus kematian ibu
- e. Masih terdapatnya prevalensi kurang gizi
- f. Tingginya kasus stunting
- g. Belum tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap
- h. Masih tingginya kasus TBC
- i. Persentase jalan mantap masih terbatas
- j. Akses terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%
- k. Akses terhadap air minum layak belum mencapai 100%

- l. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau
- m. Rumah layak huni belum mencapai 100%
- n. Indeks Risiko Bencana masih rendah
- o. Cakupan mitigasi penanggulangan dan pemulihan
- p. sarana dan prasarana terdampak bencana belum optimal
- q. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten masih rendah
- r. Penegakkan perda belum optimal
- s. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum optimal
- t. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah
- u. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah
- v. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi
- w. Luas lahan bersertifikat masih rendah
- x. Kualitas air sungai masih rendah
- y. Mata air mulai berkurang
- z. Pengelolaan sampah belum optimal
- aa. Kepemilikan dokumen kependudukan belum optimal
- bb. Jumlah LPM aktif rendah
- cc. Total Fertility Rate tinggi
- dd. Pelayanan moda transportasi belum lancar

Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat ke depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Isu Tata Kelola Pemerintahan. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Isu Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur belum merata.
3. Isu Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Masih rendahnya peranan perekonomian sector unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Isu Pembangunan Manusia. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
5. Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Daerah Rawan Bencana. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan masih tingginya resiko bencana daerah.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II-1 RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Lombok Barat disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dan sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat hingga ke level perencanaan tahunan.

Pada Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2020-2024 mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis disertai wabah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, permasalahan dan isu strategis, strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Sehingga beberapa target dari Indikator Kinerja Utama Daerah mengalami perubahan akan tetapi tidak merubah visi dan misi daerah.

Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan tahun Ke empat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA, DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU”**.

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

Gambar 2.1 RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024



Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lombok Barat

VISI							
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU							
MISI I: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, MELAYANI SERTA BERBASIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS YANG EFISIEN DAN MEMILIKI INTEGRITAS							
TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana publik
						1.1.1.2	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi dan edukasi
						1.1.1.3	Meningkatkan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
						1.1.1.4	Meningkatkan akurasi dan penyedia data sektoral
						1.1.1.5	Meningkatkan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
						1.1.1.6	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan literasi masyarakat
						1.1.1.7	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku
						1.1.1.8	Peningkatan Kerjasama Kemitraan Melalui Aliansi Strategis Multi Pihak
						1.1.1.9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Legislatif dan Intensitas Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
						1.1.1.10	Meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan
						1.1.1.11	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu
						1.1.1.12	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
						1.1.1.13	Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
						1.1.1.14	Meningkatkan peran dan koordinasi seluruh stakeholder (Toga, Toma, Aparat Penegak Hukum) dalam penyelesaian konflik
		1.2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			1.1.2.1	Meningkatkan Pengelolaan dan Pelaporan keuangan serta Aset Daerah
						1.1.2.2	Menerapkan penggunaan Sistem Informasi terintegrasi
		1.3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			1.1.3.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

						1.1.3.2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
						1.1.3.3	Meningkatkan pengembangan inovasi daerah
						1.1.3.4	Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
						1.1.3.5	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
MISI II: MENINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN AKSES INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR SECARA BERKEADILAN							
TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	2.2.1.	Meningkatkan Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan, moda transportasi, rumah layakhuni, air minum layak dan sanitasi layak	2.1.1.1	Meningkatkan jalan mantap
						2.1.1.2	Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan
						2.1.1.3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Terampil Konstruksi
						2.1.1.4	Peningkatan Pengawsan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
						2.1.1.5	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
		2.2.	Meningkatnya akses infrastruktur dasar			2.2.1.1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak hun
						2.2.1.2	Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak
						2.2.1.3	Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak
MISI III : MEWUJUDKAN KONEKTIFITAS PEREKONOMIAN ANTARA PELAKU USAHA DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT							
TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	Terwujudnya Pemulihan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomiyang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1.	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	3.1.1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berk ualitas melalui kemitraan usaha dan iklim investasi yang kondusif	3.1.1.1	Mengoptimalkan potensi sumber PAD akibat covid-19
						3.1.1.2	Meningkatkan Jaringan Irigasi Permukaan
						3.1.1.3	Meningkatkan kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif (covid-19)
						3.1.1.4	Meningkatkan produksi perikanan melalui diversifikasi usaha perikanan kelautan (covid-19)
						3.1.1.5	Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kunjungan wisatawan (covid-19)

						3.1.1.6	Keberpihakan terhadap pengembangan dan penggunaan produk local (covid-19)
						3.1.1.7	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan (covid-19)
						3.1.1.8	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Destinasi Wisata, promosi dan pemasaran pariwisata serta mendorong pertumbuhan desa wisata (covid-19)
						3.1.1.9	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan serta penggunaan IT dalam pelaksanaan proses perijinan (covid-19)
		3.2	Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat			3.2.1.1	Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan (covid-19)
						3.2.1.2	Meningkatkan keberagaman pola konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan (covid-19)
						3.2.1.3	Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan peningkatan sarana prasarana pendukung
						3.2.1.4	Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan potensi desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat
						3.2.1.5	Meningkatkan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja (covid-19)
						3.2.1.6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya transmigrasi swakarsa (covid-19)
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	4.1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1.	Meningkatkan Usia Harapan Hidup	4.1.1.1.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta Meningkatkan pemenuhan serta kapasitas sumber daya manusia Kesehatan (covid-19)
						4.1.1.2.	Meningkatkan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang hidup bersih dan sehat (covid-19)
		4.2.	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	4.2.1	Meningkatkan Rata - Rata Lama Sekolah	4.2.1.1.	Meningkatkan kualitas pendidikan Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau
						4.2.1.2.	Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan
						4.2.1.3.	Menjaga kelestarian Cagar Budaya

		4.3.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.3.1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	4.3.1.1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan rentan termarginalkan
						4.3.1.2.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak
						4.3.1.3.	Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk
MISI IV : MENINGKATKAN DAN MEMPERKUAT SINKRONISASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEMPERCEPAT CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN							
TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	5.1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.1.1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengendalian pemanfaatan tata ruang	5.1.1.	Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan ruang
						5.1.2.	Meningkatkan pengelolaan sampah
						5.1.3.	Meningkatkan perlindungan mata air, Menurunkan pencemaran air sungai
		5.2.	Menurunnya Risiko Bencana	5.2.1.	Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana	5.2.1.1.	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana (covid19)

II-2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada akhir periode masa jabatan. Mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran berikut Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Penjelas/ Rumus Perhitungan	Sumber data	Target tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Kementerian PAN dan RB	Nilai	BB (73,00)	BB (75,00)	A (81,00)	A (83,50)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks hasil SKM terhadap pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat melalui link ikm.lombokbarat.kab.go.id	Indeks	86,26	87,52	88,77	90,03

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

bab 3

Tujuan / Sasaran	Indikator	Penjelas/ Rumus Perhitungan	Sumber data	Target tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini BPK	BPK	Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini
4. Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	Rumah Layak Huni/Jumlah seluruh rumah x 100%	Disperkim	Persen	97,80	97,92	98,09	98,15
	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Dan Sanitasi Layak	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Layak/Jumlah penduduk x 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan	Persen	84,50	86,12	85,74	86,36
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Jalan Mantap*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,20	PUTR, Perindag, Dishub	Persen	82,20	86,00	90,00	94,00
6. Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi PAD/total Pendapatan Daerah x 100%	Bapenda dan BPKAD	Persen	14,85	15,16	15,45	15,73
	Nilai PDRB Perkapita (ADHK) Nilai PDRB perkapita (ADHK)	PDRB Perkapita (ADHK)	BPS	Juta Rupiah	14,51	15,20	15,36	15,56
	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Nilai Realisasi PMA tahun yg dihitung	DPMPSTP	Juta US \$	127,46	139,91	153,88	169,27
	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas) tahun yg Rp. Dihitung	DPMPSTP	Rp. Milyar	589,73	648,70	713,57	784,93
7. Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan/ jumlah penduduk x 100%	BPS	Persen	13,86	13,46	13,07	12,69
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran (orang)/Jumlah angkatan kerja	BPS	Persen	3,28	3,14	3,00	2,86

Tujuan / Sasaran	Indikator	Penjelas/ Rumus Perhitungan	Sumber data	Target tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
		(orang) x 100%						
8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Dihitung Berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) berdasarkan registrasi kematian	BPS	Tahun	67,20	67,56	67,68	67,92
9. Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS	Tahun	6,50	6,75	7,00	7,19
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana : HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia ($a = 1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi geseran	BPS	Tahun	13,75	14,00	14,25	14,50
10. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak anak (KLA)	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	650,00	705,00	810,00	910,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM Perempuan/IPM laki-laki x 100%		Indeks	90,00	90,30	91,00	91,50
11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Parameter Penghitungan adalah NO2 dan SO2	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	87,91	88,01	88,12	88,22

Tujuan / Sasaran	Indikator	Penjelas/ Rumus Perhitungan	Sumber data	Target tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Air	Parameter Penghitungan adalah : pH; BOD; COD; TSS; DO; NO3-N; Total Phosphat; Fecal Coliform	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	42,30	42,40	42,50	42,60
	Indeks Kualitas Lahan	Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	46,08	46,15	46,25	46,50
12. Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Penilaian BNPB	BPBD	Indeks	0,65	0,66	0,67	0,68

II-3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah		Satuan	Target Tahun 2023 (Perubahan)	
					Indikator	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,77	128.815.077.530
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	986.279.453.954
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	A (81,00)	6.922.195.090
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	Persen	90,00	50.685.439.133
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	98,09	21.308.625.000

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

bab 3

		6	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	83,82	24.388.432.360
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,45	208.493.398.559
		8	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	15,36	6.201.474.500
		9	Nilai Realisasi Investasi			563.143.225
			Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	153,88	
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	713,57	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	Persen	13,07	41.928.431.007
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,00	27.617.510.812
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,68	137.170.180.342
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	4.954.379.763
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,25	166.064.575.872
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	810,00	11.061.923.296
		16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,00	
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,12	13.418.051.629
		18	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,50	
		19	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,25	
12	Menurunnya Risiko Bencana	20	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,67	697.636.024
TOTAL						1.836.569.928.096

III. AKUNTABILITAS KINERJA

III-1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kewajiban menyampaikan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan tingkat pencapaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Untuk memudahkan interpretasi terhadap kinerja yang telah diperjanjikan, maka kami menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan skala yang diatur dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2019-2024.

III-1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Berikut adalah pencapaian indikator kinerja sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 (Data per Januari 2024).

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Kategori
					Target	Realisasi	%	
Misi I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas								
Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	80,00	64,45	80,56	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,77	89,12	100,39	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	81,00 (A)	66,72 (B)	82,37	Tinggi
Misi II : Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan								
Tujuan	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar		Indeks Kebermanfaatan Infrastuktur	Indeks	86,47	91,04	105,28	
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	90,00	93,84	104,27	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,09	98,56	100,48	Sangat Tinggi
		6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap	%	83,82	93,53	111,58	Sangat Tinggi

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Kategori
					Target	Realisasi	%	
			air minum layak					
Misi III : Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat								
Tujuan	Terwujudnya Pemulihan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi		Persen	1,5 - 2,5	3,50	140,00	
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,45	19,14	123,88	Sangat Tinggi
		8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15,36	14,87	96,81	Sangat Tinggi
		9	Nilai Realisasi investasi				59,60	Rendah
			Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	153,88	33,30	21,65	
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	713,57	696,06	97,55	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	%	13,07	13,67	95,41	Sangat Tinggi
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,00	3,12	96,00	Sangat Tinggi
Misi IV : Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing								
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	69,58	72,18	103,74	
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,68	71,94	106,29	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	6,87	98,14	Sangat Tinggi
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,25	13,98	98,11	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	810,00	748,00	92,35	Sangat Tinggi
		16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,00	90,41	99,35	Sangat Tinggi
Misi V : Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan								
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	61,80	66,31	107,30	

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Kategori
					Target	Realisasi	%	
	Ketahanan Daerah	(IKLH)						
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,12	91,69	104,05	Sangat Tinggi
		18	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,50	48,95	115,18	Sangat Tinggi
		19	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,25	49,17	106,31	Sangat Tinggi
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah		Indeks	141,00	109,17	77,43	
12	Menurunnya Risiko Bencana	20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,67	0,81	120,90	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja							98,62	

Sumber : Bappeda Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Capaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 yakni sebanyak 20 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis. Terdapat 18 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan kategori **Sangat Tinggi** , 1 indikator kinerja sasaran dengan kategori **Tinggi** dan 1 indikator dengan kategori **Rendah**.

Dalam 20 indikator kinerja, terdapat 11 indikator telah mencapai target RPJMD dengan perolehan persentase di atas 100%. Sedangkan indikator kinerja dengan perolehan persentase dibawah 100% sebanyak 9 indikator.

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99,35
2. Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) 98,14
3. Harapan Lama Sekolah (HLS) 98,11
4. Nilai PDRB Perkapita 96,81%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 96,00%
6. Angka Kemiskinan 95,41%
7. Kabupaten Layak Anak (KLA) 92,35
8. Nilai AKIP Daerah 82,37%
9. Nilai realisasi investasi 59.60%

III-1.2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		2022			2023			Ket.
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Meningkat/ Menurun
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	IKM	87,52	88,96	101,65	88,77	89,12	100,39	
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	Sama

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

bab 3

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		2022			2023			Ket.
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Meningkat/ Menurun
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	BB 75,00	B 64,09	85,45	81,00 (A)	66,72 (B)	82,37	Menurun
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	86,00	86,48	100,56	90,00	93,84	104,27	Meningkat
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	97,92	97,96	100,04	98,09	98,56	100,48	Meningkat
		6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	82,92	83,08	100,19	83,82	93,53	111,58	Meningkat
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15,16	15,52	102,37	15,45	19,14	123,88	Meningkat
		8	Nilai PDRB Perkapita	15,20	14,56	95,79	15,36	14,87	96,81	Meningkat
		9	Nilai Realisasi Investasi			89,48			59,60	Menurun
			Penanaman Modal Asing (PMA)	139,91	8,86	6,34	153,88	33,30	21,65	-
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	648,70	1.119,77	172,62	713,57	696,06	97,55	-
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	13,46	13,39	100,52	13,07	13,67	95,41	Menurun
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,14	4,16	67,52	3,00	3,12	96,00	Meningkat
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	67,56	67,63	100,11	67,68	71,94	106,29	Meningkat
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	6,75	6,60	97,78	7,00	6,87	98,14	Meningkat
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,00	13,96	99,71	14,25	13,98	98,11	Menurun
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	705,00	762,00	108,09	810,00	748,00	92,35	Menurun

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		2022			2023			Ket.
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Meningkat/ Menurun
		16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,30	90,41	100,12	91,00	90,41	99,35	Menurun
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Udara	88,01	91,20	103,62	88,12	91,69	104,05	Meningkat
		18	Indeks Kualitas Air Sungai	42,40	46,72	110,19	42,50	48,95	115,18	Meningkat
		19	Indeks Kualitas Lahan	46,15	46,72	101,24	46,25	49,17	106,31	Meningkat
12	Menurunnya Risiko Bencana	20	Indeks Ketahanan Daerah	0,66	0,77	116,67	0,67	0,81	120,90	Meningkat

Berdasarkan data perbandingan persentase capaian kinerja di atas, terdapat 12 indikator kinerja yang meningkat, 7 indikator kinerja menurun dan 1 indikator yang capaiannya sama dengan tahun sebelumnya.

III-1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

Tabel 3.4. Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,77	89,12	100,39	90,03	98,99%
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	81,00 (A)	66,72 (B)	82,37	83,5 (A)	79,90%
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	90,00	93,84	104,27	94,00	99,83%
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,09	98,56	100,48	98,15	100,42%
		6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	83,82	93,53	111,58	84,72	110,40%

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

bab 3

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Target Akhir	Capaian 2023 Terhadap Target
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,45	19,14	123,88	15,73	121,68%
		8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15,36	14,87	96,81	15,56	95,57%
			Nilai Realisasi Investasi				59,60		
		9	Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	153,88	33,30	21,65	169,27	19,67%
		10	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	713,57	696,06	97,55	784,93	88,68%
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	11	Angka Kemiskinan	%	13,07	13,67	95,41	12,69	107,72%
		12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,00	3,12	96,00	2,86	109,09%
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,68	71,94	106,29	67,92	105,92%
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	14	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	6,87	98,14	7,19	95,55%
		15	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,25	13,98	98,11	14,50	96,41%
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	810,00	748,00	92,35	910,00	82,20%
		17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,00	90,41	99,35	91,50	98,81%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,12	91,69	104,05	88,22	103,93%
		19	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,50	48,95	115,18	42,60	114,91%
		20	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,25	49,17	106,31	46,50	105,74%
12	Menurunnya Risiko Bencana	21	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,67	0,81	120,90	0,68	119,12%

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan target akhir dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024. Tahun 2023

merupakan tahun keempat RPJMD setelah mengalami perubahan di tahun 2021. Dapat dilihat, terdapat 6 sasaran yang mencapai lebih dari 100% dan 6 sasaran dengan capaian 80% - 99%.

III-1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan standar Nasional

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Target Nasional	Capaian Tahun 2023 terhadap target Nasional (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	%			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,77	89,12	100,39	-	-	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	81,00 (A)	66,72 (B)	82,37	B	100%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	90,00	93,84	104,27	-	-	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
5	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,09	98,56	100,48	67,88 %	145 %	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	83,82	93,53	111,58	19.185.621 akses	-	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,45	19,14	123,88	2.463 Triliun Rupiah	-	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15,36	14,87	96,81	76,62 Juta Rupiah	-	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
9	Nilai Realisasi Investasi				52,15	7,2%		Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
	Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	153,88	33,3	21,65	1.290 Triliun Rupiah	0,03%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	713,57	696,06	97,55	1.417 Triliun Rupiah	0,04%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
10	Angka Kemiskinan	%	13,07	13,67	95,41	7,5	54,86%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,00	3,12	96,00	5,3	169%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,68	71,94	106,29	73,93	97,30%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	6,87	98,14	9,24	74,35%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,25	13,98	98,11	13,22	105,7%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	810,00	748,00	92,35	514 kabupaten	-	Perpres No 108/2022 ttg

								RKP 2023
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,00	90,41	99,35	91,17	99,16	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
17	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,12	91,69	104,05	84,40	108,63	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
18	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,50	48,95	115,18	55,40	88,35	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
19	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,25	49,17	106,31	64,50	76,23	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,67	0,81	120,90	8,5	0,95%	Perpres No 108/2022 ttg RKP 2023

III-2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

III-2.1 Faktor Keberhasilan dan Faktor Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tabel 3.6 Capaian kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	88,77	89,12	100,39

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh pelayanan yang ada pada seluruh Perangkat Daerah/UPT/Unit Kerja Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Terdapat 188 jenis layanan di aplikasi ikm.lombokbaratkab.go.id yang disediakan dengan melibatkan responden/masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap 65 Perangkat Daerah/UPT/Unit Kerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat, pelaksanaan survei ini berlangsung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

Data Jenis pelayanan yang digunakan di dalam aplikasi ikm.lombokbaratkab.go.id adalah seperti yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 7 Data Jenis layanan per Perangkat Daerah/ UPT/ Unit Kerja di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah	Jenis Layanan
1. Sekretariat Daerah	1. Kerjasama Daerah 2. Konsultasi Dan Koordinasi Bid. Adm. Pembangunan 3. Konsultasi Dan Koordinasi Bid. Hukum & Perundangan 4. Konsultasi Dan Koordinasi Bid. Kesejahteraan Rakyat 5. Konsultasi Dan Koordinasi Bidang Pelayanan Publik

Nama Perangkat Daerah	Jenis Layanan
	6. Konsultasi, Pembinaan Bid. Adm. Perekonomian 7. Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa Sec. Elektronik
2. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	1. Pelayanan Ijin Penelitian
3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1. Ijin Operasional Tk/Paud 2. Pengajuan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 3. Pengajuan NUPTK 4. Rekomendasi Ijin Pendirian Kursus Bahasa 5. Rekomendasi Ijin Pendirian Kursus Kecantikan 6. Rekomendasi Ijin Pendirian Kursus Komputer 7. Rekomendasi Ijin Pendirian Kursus Swasta Lainnya
4. Dinas Kesehatan	1. Perijinan Pangan Industri RT 2. Rekomendasi Perijinan DAM (Depot Air Minum) 3. Rekomendasi Ijin Usaha Apotek 4. Rekomendasi Ijin PKRT 5. Rekomendasi Ijin Praktek Dokter Gigi 6. Rekomendasi Ijin Usaha Toko Alkes 7. Rekomendasi Ijin Usaha Toko Obat 8. Rekomendasi Laik Hiegiene Restoran/Rumah Makan 9. Rekomendasi Perijinan Umot
5. Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju	1. Igd 2. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 3. Kefarmasian 4. Laboratorium 5. Radiologi 6. Rawat Inap 7. Rawat Jalan
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang/PKKPR 2. Sertifikat Laik Fungsi (Slf)
7. Dinas Perumahan Dan Pemukiman	1. Bantuan Rumah Swadaya 2. Layanan Pengelolaan PJU (Penerangan Jalan Umum) 3. Layanan Penebangan Pohon 4. Rekomendasi Ijin Perumahan 5. Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1. Rekomendasi Penelitian 2. Rekomendasi Penerbitan SKT Organisasi Kemasyarakatan
9. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kegiatan Patroli 2. Kegiatan Pembinaan Dan Penyuluhan 3. Kegiatan Penanggulangan Unjuk Rasa 4. Kegiatan Penegakan Perda 5. Kegiatan Penertiban 6. Kegiatan Pengamanan
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Pelayanan Bantuan Logistik 2. Pelayanan Kedaruratan 3. Pendampingan Penyusunan LKPJ Dan LPPD
11. Dinas Pemadam Kebakaran	1. Pelatihan, Bintek Penanggulangan Kebakaran 2. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Nama Perangkat Daerah	Jenis Layanan
12. Dinas Sosial	1. Pekerja Migran Bermasalah 2. Pelayanan Gelandangan Dan Pengemis 3. Pelayanan Korban Tindak Kekerasan 4. Pelayanan Pendaftaran Lks 5. Pelayanan Pengusulan Kartu PBI APBD II/Cut Off 6. Pelayanan Penyandang Disabilitas 7. Pelayanan Perpanjangan SIOP LKS 8. Pelayanan PKHSAI/ABH
13. Dinas Tenaga Kerja	1. Pelayanan AK-1 (Kartu Kuning) 2. Pelayanan Pendaftar Transmigrasi 3. Rekomendasi Bursa Kerja Khusus Smk 4. Rekomendasi LPK Permohonan Bantuan Sarpras 5. 5. Rekomendasi Pengantar Paspor CPMI/ABK
14. Dinas Ketahanan Pangan	1. Layanan Pemberian Bantuan Pangan Pasca Bencana
15. Dinas Lingkungan Hidup	1. Persetujuan Ijin SPPL 2. Rekomendasi Ijin Amdal 3. Rekomendasi Ijin UKL-UPL/DPLH
16. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Akta Kelahiran 2. Akta Kematian 3. Akta Pengakuan Anak 4. Akta Pengesahan Anak 5. Akta Perceraian 6. Akta Perkawinan 7. Kartu Identitas Anak (KIA) 8. Ket. Pelaporan Pencatatan Sipil Diluar Wiil. NKRI 9. Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 10. Pelayanan Biodata Penduduk 11. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 12. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil 13. Penertiban Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil 14. Perubahan Akta Pencatatan Sipil 15. Perubahan Status Anak 16. Perubahan Status Kewarganegaraan 17. Surat Keabsahan Pencatatan Sipil 18. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri 19. Surat Keterangan Lahir Mati 20. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 21. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 22. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 23. Surat Keterangan Pindah Datang 24. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa 2. Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa 3. 3. Rekomendasi Penyaluran ADD Dan DD
18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Layanan Penyuluhan Dan Advokasi KB 2. Pelayanan Sistem Informasi Keluarga
19. Dinas Perhubungan	1. Layanan Pengaduan FLLAJ 2. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Nama Perangkat Daerah	Jenis Layanan
	3. Layanan Retribusi Kepelabuhan 4. Layanan Retribusi Keterminalan 5. Layanan Retribusi Perpajakan 6. Rekomendasi Ijin Trayek Angkutan Pedesaan
20. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1. Fasilitas Permohonan Pembuatan Domain, Website.Id 2. Layanan Asistensi Aplikasi Umum Dan Khusus 3. Layanan Data Sektoral 4. Layanan Internet 5. Pelayanan Informasi Publik PPID 6. Rekomendasi Ijin Pendirian Menara
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1. Pelatihan Umkm 2. Pembinaan Umkm 3. Pendamping Umkm 4. Rekomendasi Ijin Pembukaan Cab. Koperasi 5. Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam 6. Rekomendasi Pembuatan IUMK 7. Rekomendasi Pembuatan NIB 8. Rekomendasi Pembuatan SPPL
22. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Apotik 2. BLK (Balai Latihan Kerja) 3. Ijin Penyelenggaraan Reklame 4. Ijin Trayek Angkutan Pedesaan 5. Itp-Mb (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) 6. IUI (Izin Usaha Industri) 7. Kartu Pengawasan Angdes 8. Klinik Pratama 9. Kursus 10. Limbah 11. Lpk (Lembaga Pelatihan Kerja) 12. Nib (Nomor Induk Berusaha) 13. Pb-Umku Ps At-Pduk 14. Pb-Umku/ Praktek Dokter Hewan Medikveteriner 15. Persetujuan Bangunan Gedung 16. Persetujuan Lingkungan 17. Sekolah 18. Sertifikat Layak Higenis Sanitasi 19. Sertifikat Standar Rsud (Klas C) 20. Simpan Pinjam 21. Skpl (Surat Keterangan Penjualan Langsung) 22. Spp-Irt(Sert.Produksi Pangan-Industri Rumah tangga) 23. Surat Ijin Usaha Perikanan 24. Tdg (Tanda Daftar Gudang) 25. Tdup (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) 26. Toko Obat
23. Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1. Layanan Retribusi Rekreasi Dan Olahraga
24. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1. Layanan Perpustakaan Keliling 2. Pelayanan Internet Gratis 3. Pelayanan Library In The Box 4. Pelayanan Perpustakaan
25. Dinas Kelautan Dan Perikanan	1. Pelayanan Pendaftaran Dan Pendataan Usaha Nelayan 2. Pelayanan Usaha Mikro Nelayan

Nama Perangkat Daerah	Jenis Layanan
	3. Pelayanan Jaminan Sosial Bagi Pelaku Usaha Perikanan 4. Rekomendasi Penerima Bantuan 5. Rekomendasi Permohonan Bantuan 6. Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil
26. Dinas Pariwisata	1. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
27. Dinas Pertanian	1. Rekomendasi Ijin Toko Obat Hewan 2. Rekomendasi Ijin Usaha Rumah Potong Dan Unggas 3. Rekomendasi Mengeluarkan Bibit Hewan/ Tanaman 4. Rekomendasi Pengeluaran Produk Olahan Pertanian 5. Rekomendasi Perijinan Praktek Dokter Hewan Mandiri
28. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1. Layanan Tera (Tera Ulang) 2. Rekomendasi Ijin Usaha Industri 3. Rekomendasi SIUP-MB 4. Rekomendasi SIUP-TS 5. Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang 7. Rekomendasi Tanda Daftar Industri 8. Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan
29. Sekretariat DPRD	1. Layanan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat
30. Kecamatan Sekotong	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
31. Kecamatan Lembar	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
32. Kecamatan Gerung	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
33. Kecamatan Labuapi	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
34. Kecamatan Kediri	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
35. Kecamatan Kuripan	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
36. Kecamatan Narmada	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
37. Kecamatan Lingsar	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
38. Kecamatan Gunungsari	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
39. Kecamatan Batu Layar	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
40. Inspektorat Kabupaten	1. Keterbukaan Informasi Publik 2. Klinik Layanan Konsultasi 3. Penyelenggaraan PD 4. Layanan Akuntabilitas Keuangan 5. Layanan Pengelolaan Pengaduan 6. Layanan Penyedia Tenaga Narasumber Tim Saber Pungli
41. Badan Pendapatan Daerah	1. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah 2. Pelayanan Perubahan SPPT 3. Pelayanan Verifikasi BPHTB

Nama Perangkat Daerah	Jenis Layanan
42. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1. 1. Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Keuangan 2. Pelayanan Dan Pengelolaan Asset Daerah
43. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1. Ekinerja 2. Simpeg
44. Puskesmas Banyumulek	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. 3. Rawat Jalan
45. Puskesmas Dasan Tapen	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
46. Puskesmas Eyat Mayang	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
47. Puskesmas Gerung	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
48. Puskesmas Gunungsari	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
49. Puskesmas Jembatan Kembar	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
50. Puskesmas Kediri	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
51. Puskesmas Kuripan	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
52. Puskesmas Labuapi	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
53. Puskesmas Lingsar	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
54. Puskesmas Meninting	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
55. Puskesmas Narmada	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
56. Puskesmas Pelangan	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
57. Puskesmas Penimbung	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
58. Puskesmas Perampuan	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
59. Puskesmas Sedau	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
60. Puskesmas Sekotong	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB)

Nama Perangkat Daerah	Jenis Layanan
	2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
61. Puskesmas Sesela	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
62. Puskesmas Sigerongan	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (Iidb) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
63. Puskesmas Suranadi	1. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan
64. Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada	1. IGD 2. Instalasi Ibu Dan Bayi (IIDB) 3. Kefarmasian 4. Laboratorium 5. Rawat Inap 6. Rawat Jalan
65. UPT. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Barat	1. Kami Siap Melayani Home Visite 2. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik 4. Pemeriksaan Laboratorium Rujukan Mikroskopis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihasilkan masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Barat periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan inter persepsi IKM adalah kriteria SANGAT BAIK dengan nilai 3,57.
2. Kemudahan prosedur pelayanan inter persepsi IKM adalah 3,55 masuk kriteria SANGAT BAIK.
3. Kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,51 masuk kriteria BAIK.
4. Biaya / tarif dalam pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,64 masuk kriteria SANGAT BAIK.
5. Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,54 masuk kriteria SANGAT BAIK.
6. Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,55 masuk kriteria SANGAT BAIK.
7. Prilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Interpersepsi IKM adalah 3,54 masuk kriteria SANGAT BAIK.
8. Kualitas sarana dan prasarana Inter persepsi IKM adalah 3,51 masuk kriteria BAIK.
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan Inter persepsi IKM adalah 3,68 masuk kriteria SANGAT BAIK.

Hasil Rekap IKM, dan nilai IKM per Jenis pelayanan pada 65 Perangkat Daerah/ UPT/ Unit Kerja yang terdapat pada aplikasi ikm.lombokbaratkab.go.id dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Rekap IKM Perangkat Daerah/ UPT/ Unit Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

	Nama OPD	Target IKM	Nilai IKM	Total Responden OPD
1	Sekretariat Daerah	88,97	93,69	678
2	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	97,20	97,22	1264
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	89,00	87,59	49
4	Dinas Kesehatan	88,77	92,71	149
5	Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju	88,77	91,53	567
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	88,77	89,92	59
7	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	88,98	94,44	81
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	93,00	91,45	51
9	Satuan Polisi Pamong Praja	88,77	90,56	110
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93,00	94,27	62
11	Dinas Pemadam Kebakaran	88,89	95,87	123
12	Dinas Sosial	88,80	87,60	149
13	Dinas Tenaga Kerja	88,77	91,37	19
14	Dinas Ketahanan Pangan	88,77	89,39	39
15	Dinas Lingkungan Hidup	89,50	90,24	74
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88,77	93,67	2694
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	88,80	89,74	13
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	88,77	90,68	104
19	Dinas Perhubungan	88,77	90,88	95
20	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	89,48	94,16	232
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	89,00	89,99	157
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,77	84,33	561
23	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	88,77	84,31	40
24	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	88,77	90,51	452
25	Dinas Kelautan Dan Perikanan	88,77	89,18	19
26	Dinas Pariwisata	94,00	87,04	12
27	Dinas Pertanian	88,77	86,48	45
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	88,77	84,98	646
29	Sekretariat Dprd	88,77	92,59	12
30	Kecamatan Sekotong	88,77	90,24	37
31	Kecamatan Lembar	88,77	89,47	24
32	Kecamatan Gerung	88,77	90,28	12
33	Kecamatan Labuapi	88,77	92,32	17
34	Kecamatan Kediri	88,77	86,87	254
35	Kecamatan Kuripan	89,12	84,65	55
36	Kecamatan Narmada	88,82	90,76	43

	Nama OPD	Target IKM	Nilai IKM	Total Responden OPD
37	Kecamatan Lingsar	88,77	85,73	51
38	Kecamatan Gunungsari	88,77	88,85	64
39	Kecamatan Batulayar	88,79	89,06	194
40	Inspektorat Kabupaten	88,77	88,61	70
41	Badan Pendapatan Daerah	89,00	90,42	208
42	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	88,77	89,57	53
43	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	88,77	88,98	146
44	Puskesmas Banyumulek	88,77	96,41	315
45	Puskesmas Dasan Tapen	88,77	90,18	519
46	Puskesmas Eyat Mayang	88,77	90,38	190
47	Puskesmas Gerung	88,77	94,44	493
48	Puskesmas Gunungsari	88,77	89,27	336
49	Puskesmas Jembatan Kembar	88,77	80,32	324
50	Puskesmas Kediri	88,77	91,10	692
51	Puskesmas Kuripan	88,77	86,51	605
52	Puskesmas Labuapi	88,77	91,28	387
53	Puskesmas Lingsar	88,77	92,69	447
54	Puskesmas Meninting	88,77	89,33	778
55	Puskesmas Narmada	88,77	90,36	624
56	Puskesmas Pelangan	88,77	81,82	88
57	Puskesmas Penimbung	88,77	86,29	712
58	Puskesmas Perampuan	88,77	89,85	594
59	Puskesmas Sedau	88,77	90,35	750
60	Puskesmas Sekotong	88,77	87,04	337
61	Puskesmas Sesela	88,77	91,09	320
62	Puskesmas Sigerongan	88,77	88,91	1060
63	Puskesmas Suranadi	88,77	89,48	94
64	Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada	88,77	84,4	6138
65	UPT. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Barat	88,77	84,86	155
IKM KABUPATEN LOMBOK BARAT		88,77	89,12	25.742

Berdasarkan data responden pada aplikasi, jumlah responden yang melaksanakan survei pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023 sebanyak 25.742 orang, dari hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat diperoleh hasil NRR Tertimbang 3,56 (sangat Baik) atau konversi nilai menjadi 89,12 atau mencapai target IKU RPJMD sebesar 88,77. Dengan demikian tingkat kualitas pelayanan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 0,16 poin dibandingkan indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 sebesar 88,96.

Faktor Keberhasilan

- a. Sarana dan prasarana yang memadai bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan;
- b. Memberikan sosialisasi, informasi kepada masyarakat untuk proses pelayanan dapat cepat dan lancar apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh petugas pelayanan publik terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- d. Membantu/pendampingan warga masyarakat terutama lansia yang tidak mempunyai sarana hp android atau gagap teknologi untuk bisa tetap mendapat pelayanan online dari unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan sarana hp dan komputer dari unit pemberi layanan public;
- e. Penyusuaian/pemutahiran jenis layanan pada unit pemberi layanan publik pada aplikasi <https://ikm.lombokbaratkab.go.id>

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan keramahan petugas pelayanan.
- b. Diperlukan upaya kemudahan bagi responden dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan public.
- c. Penggunaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
- d. Mengadakan rapat koordinasi secara rutin terkait progress pengisian data survei pada aplikasi dan membahas kendala atau permasalahan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan.
- e. Survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

2. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		
		Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100

Tabel 3.10 Capaian kinerja Indikator sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Opini BPK	Tindak lanjut revidi laporan keuangan perangkat daerah (semua urusan)	100%	100%	100%

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pencapaian opini WTP merupakan sarana keterbukaan informasi kepada publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Capaian opini WTP diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah untuk menarik investor. Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan pemeriksaan neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan yang membuat Kabupaten Lombok Barat dapat konsisten memperoleh opini BPK WTP selama 9 tahun berturut-turut, yaitu :

- Peningkatan sumber daya manusia di bidang keuangan, pengembangan aplikasi pendukung laporan keuangan dan mempercepat penyelesaian atas pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.
- Peningkatan koordinasi internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat maupun eksternal kepada BPKP Perwakilan NTB untuk proses pendampingan selama pemeriksaan.
- Peningkatan peran APIP untuk meningkatkan kinerja SPIP.
- Pencegahan temuan berulang.
- Deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan.
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam transaksi penggunaan

anggaran tidak ada yang mencurigakan.

- g. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrua (*Accrual Basis*) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang adalah selain melakukan upaya optimal dalam rangka menunjang pemerintah daerah mempertahankan WTP, seluruh perangkat daerah terus melakukan perbaikan berkelanjutan, seperti :

- a. Atas pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat tahun berkenaan, hal-hal yang menjadi temuan ditindaklanjuti dan dipantau secara langsung oleh pimpinan.
- b. Sekretaris daerah sebagai pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pembaruan informasi pada KIB secara aktual dan menambahkan informasi yang terkait detail barang dan pemanfaatannya.

3. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.11 Capaian Kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	81,00 (A)	66,72 (B)	82,37

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/420/AA.05/2023, Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperoleh Predikat B dengan nilai 66,72 dari target 81,00.

Nilai AKIP Daerah

Tabel 3.12 Rincian hasil evaluasi AKIP Kabupaten Lombok Barat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	22,43	24,16
Pengukuran Kinerja	30	16,35	16,65
Pelaporan Kinerja	15	9,71	9,83
Akuntabilitas Kinerja	25	15,60	16,08
Nilai hasil Evaluasi	100	64,09	66,72
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: LHE KEMENPAN RB 2023

Faktor Kegagalan

- a. Penyusunan pohon kinerja yang telah dirumuskan oleh masing-masing Perangkat Daerah tidak dapat langsung digunakan di tahun 2023 dan 2024 karena alasan dokumen perencanaan telah dilakukan revisi dan telah di sahkan oleh legislatif.
- b. Masih terdapat perencanaan kinerja pada sebagian unit kerja yang merumuskan sasaran strategisnya belum sepenuhnya berorientasi outcome pada level kinerjanya dan indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dan memberikan continuous improvement pada pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- c. Meskipun secara umum pohon kinerja pada level pemerintah kabupaten dan perangkat daerah telah disusun, namun masih diperlukan penyempurnaan. Hal ini karena hubungan logis/logical framework antar level kinerja belum sepenuhnya tergambar dengan baik sehingga kinerja setiap unit kerja dan individu belum sepenuhnya dapat dipastikan mendorong tercapainya kinerja strategis lembaga.
- d. Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan yang ada belum tergambar dengan baik.
- e. Masih terdapat beberapa IKU perangkat daerah yang formulasi pengukuran kinerjanya belum jelas sehingga menimbulkan beberapa persepsi dalam memahami data kinerja yang dibutuhkan indikator kinerja tersebut.
- f. Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui aplikasi e-SAKIP, namun masih ditemukan PO yang belum secara aktif dan update dalam pengukuran capaian kinerja secara. Selain itu belum terlihat adanya feedback perbaikan dari pimpinan terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai baik di level Kabupaten maupun PD.
- g. Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya target pada level PD yang masih stagnan dan kurang menantang.
- h. Laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah belum sepenuhnya mengungkapkan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan juga analisis upaya perbaikan kedepan pada setiap pencapaian kinerja.
- i. Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LAKIP PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target

maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja ke depan.

- j. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat beberapa kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai.
- k. Kualitas SDM evaluasi AKIP di internal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum merafa. Masih ada perbedaan persepsi antara evaluator internal dalam menuangkan kondisi implementasi SAKIP PD yang digambarkan ke dalam LHE AKIP yang disampaikan.
- l. Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan tagging penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar Rp. 261.419.222.615 atau 14,76% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 95 sub kegiatan;
- m. Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada sub kegiatan “Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar” yaitu sebesar 24,57% dan terkecil adalah pada sub kegiatan “Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi” yang hanya 0,00%.
- n. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 13,67% atau naik 0,28% dibandingkan dengan tahun 2022.
- o. Hasil analisis tim evaluator masih menemukan sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas, dan lainnya) yang masih cukup besar.

Upaya Peningkatan Kinerja

Berdasarkan tabel 3.12, dapat dilihat bahwa tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 2,63. Kenaikan ini merupakan hasil dari upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yaitu:

- a. Telah dilakukan pendampingan perbaikan pohon kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah. Pohon kinerja perbaikan belum dapat diimplementasikan pada perencanaan 2024 (periode RPJMD yang masih berlaku). Pohon kinerja perbaikan tersebut diimplementasikan pada RPD Tahun 2025 dan selanjutnya. Saat ini dokumen RPD Tahun 2025 - 2026 sudah ditetapkan. Proses verifikasi rancangan akhir renstra sedang dilaksanakan. Renstra PD merujuk pada pohon kinerja hasil perbaikan. Bappeda berupaya optimal dalam proses verifikasi dokumen Renstra Perangkat

Daerah, baik entry-an pada SIPD maupun verifikasi dokumen. Sesuai Surat Edaran Penyusunan Renstra disampaikan untuk menyajikan cascading pada dokumen renstra

- b. Memutakhirkan aplikasi SAKIP Lombok Barat. SAKIP Lombok Barat merupakan aplikasi yang memuat sistem perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan pelaporan kinerja. Semua informasi di dalam aplikasi tersaji secara transparan yang dapat dilihat oleh publik. Selain menjadi media pertanggungjawaban, aplikasi ini digunakan oleh Perangkat daerah untuk mengukur capaian kinerjanya per triwulan. Capaian kinerja ini menjadi salah satu persyaratan pembayaran dan pemotongan TPP sub komponen kinerja organisasi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja, Bagian Organisasi telah melakukan asistensi pada semua PD. Asistensi dilakukan secara terfokus pada masing-masing perangkat daerah dengan memeriksa keseluruhan komponen pendukung dalam pelaporan kinerja. Adapun langkah yang dilakukan tim di Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:
 - Perangkat daerah mengirimkan dokumen Laporan Kinerja dan lampirannya ke google drive yang telah disediakan dalam <https://bit.ly/draftsakip2023>
 - Tim Bagian Organisasi akan mereview kesesuaian dokumen berupa laporan kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, cascading Renstra, SK IKU dan dokumen lain yang relevan.
 - Laporan kinerja yang telah dikirimkan ke Bagian Organisasi, selanjutnya di periksa dan di review kelengkapan bab dan subbab berdasarkan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan kesesuaiannya dengan data capaian kinerja pada Bappeda.
 - Hasil review akan dimuat dalam Lembar Hasil review yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi.
 - Lembar Hasil Review dan Laporan kinerja yang masih butuh perbaikan akan dimasukkan dalam google drive https://bit.ly/asistensi_sakip2023 untuk segera dilengkapi dan disempurnakan.
 - Dokumen yang telah diperbaiki oleh PD, selanjutnya dikirim kembali ke drive yang sama.
 - Dokumen Laporan kinerja beserta lampirannya yang telah di acc Bagian Organisasi, selanjutnya akan dimasukkan dalam https://bit.ly/final_sakip2023 diteruskan ke Inspektorat untuk di evaluasi.

- d. Menyajikan laporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja perangkat daerah dan Pemda sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan target dan strategi dalam dokumen perencanaan selanjutnya.
- e. Peningkatan kompetensi APIP dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP
- f. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut LHE Perangkat Daerah Tahun 2023.
- g. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan, dan dengan memperhatikan faktor atau kondisi riil yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat juga sudah tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021-2024.
- h. Dalam penanganan kemiskinan keterlibatan seluruh stakeholder mulai sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, BAZNAS, CSR, hingga program-program dari lembaga non pemerintah (NGO) akan dapat mempercepat dalam penanganan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Kebijakan untuk keterlibatan seluruh stakeholder dalam penanganan kemiskinan ini memiliki payung hukum melalui Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 188.45/1051/BAPPEDA/2022 tentang Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lombok Barat (Terlampir sebagai Data Dukung). Terkait pendidikan yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, permasalahan di Kabupaten Lombok Barat adalah masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 6,6 Tahun, sehingga keterlibatan dan sinergi seluruh stakeholder perlu terus ditingkatkan salah satunya melalui Gerakan Terpadu Kejar Paket.
- i. Akan dilakukan reviu program, kegiatan, sub kegiatan hingga aktivitas untuk yang mendukung dalam penanganan kemiskinan dan yang memiliki dampak langsung. Terkait naiknya angka kemiskinan tahun 2023 berdasarkan data BPS. Untuk program penanganan kemiskinan di daerah telah dilaksanakan, namun kondisi makro ekonomi juga berdampak signifikan yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan diantaranya Kenaikan inflasi yang mencapai 4,16% dan Kenaikan upah pekerja tidak mampu mengimbangi laju inflasi yang cukup tinggi (Sumber: BPS Lombok Barat, 2024)
- j. Alokasi anggaran pendukung yang masih cukup dalam penanganan kemiskinan ekstrem akan menjadi evaluasi mulai tahapan perencanaan hingga penganggaran, agar ketercapaian sasaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem bisa maksimal untuk bantuan kepada masyarakat

4. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Tabel 3.13 Capaian Kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	90,00	93,84	104,27

Tabel 3.14 Capaian kinerja dari Sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Persentase Wilayah yang terhubung dengan pusat perekonomian	1. Persentase capaian wilayah terhubung dengan moda transportasi	58,06%	63,64%	109,61
	2. Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata	98%	100%	102,04
	3. persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar)	93,75%	100%	106,67
	4. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,87%	75,11%	100,32%

Persentase Wilayah yang terhubung dengan pusat perekonomian**1. Persentase capaian wilayah terhubung dengan moda transportasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat, jumlah jaringan trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 33 trayek.

Tabel 3.15 Ketersediaan Angkutan Umum pada Jaringan Trayek di Wilayah Kabupaten Lombok Barat

No.	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Angkutan Pedesaan				Keterangan
			2020	2021	2022	2023	
1	S.01	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp.	37	33	20	32	
2	S.02	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.	28	22	18	22	
3	S.03	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.	0	1	1	1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2022
4	S.04	Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.	0	1	1	1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2022

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

bab 3

No.	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Angkutan Pedesaan				Keterangan
5	S.05	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp	0	0	0	0	
6	S.06	Gerung - Kediri - Rumak - Banyumulek - Gapuk, Pp.	0	0	0	0	
7	S.07	Gerung - Giri Tembesi - Tempos - Giri Sasak - Kuripan Selatan - Kumbung - Kediri - Terminal Mandalika, Pp.	3	3	3	4	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2023
8	S.08	Gerung - Rumak - Gunung Pengsong - Prampuan - Bajur - Pagutan, Pp.	0	0	0	0	
9	S.09	Gerung - Rumak - Labuapi - Bengkel - Mandalika -, Pp.	0	0	0	0	
10	S.10	Gerung - Beleka - Gapuk - Banyumulek-Rumak-Labuapi-Bengkel-Mandalika,Pp	0	0	0	1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2023
11	S.11	Perampuan - Jerneng - Labuapi - Bengkel - Mandalika, Pp.	0	0	0	0	
12	S.12	Perampuan - Bajur - Bengkel - Mandalika, Pp.	0	0	0	0	
13	S.13	Kediri - Bagek Polak - Jerneng - Perampuan, Pp.	0	0	0	0	
14	S.14	Gerung - Tempos - Aik Ampat - Dasan Geres - Gerung, Pp.	0	0	0	1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2022
15	S.15	Gerung - Menang - Aikampat - Dasan Geres - Rumak - Labuapi, Pp	1	1	1	1	
16	S.16	Gerung-Banyu Urip-Aik Ampat-Gerung,Pp	0	0	0	0	
17	S.17	Gerung - Rumak - Banyu Mulek - Suka Makmur - Mesanggok - Gerung, Pp	0	0	0	0	
18	S.18	Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp				1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2023
19	T.01	Keru - Narmada - Mandalika , Pp.	28	21	12	21	
20	T.02	Sesaot - Narmada - Mandalika, Pp.	12	11	9	8	
21	T.03	Narmada - Lingsar - Mandalika, Pp.	1	1	1	1	
22	T.04	Narmada - Tanak Beak - Kumbung - Kuripan - Gerung, Pp.	1	1	0	0	
23	T.05	Narmada - Tanak Beak - Kumbung - Kuripan - Gerung, Pp.	1	1	1	2	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2023
24	T.06	Narmada - Batu Kumbung - Karang Bayan - Segerongan - Kekerri - Gunung Sari, Pp	1	0	0	0	
25	T.07	Keru - Sedau - Sesaot - Narmada, Pp.	3	4	3	4	
26	U.01	Gunungsari - Mambelan - Lilir - Kekerri - Sigerongan - Bug-Bug - Peteluan Indah - Lingsar - Batu Kumbung - Narmada, Pp	0	0		1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2023
27	U.02	Gunung Sari - Montong - Mangsit - Ampenan, Pp.	0	0	1	1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2022

No.	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Angkutan Pedesaan				Keterangan
28	U.03	Kerandangan – Senggigi – Sesela - Midang – Kekerri – Sayang-Sayang - Selagalas – Lingsar - Narmada, Pp	76	41	34	38	
29	U.04	Senggigi – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp.	4	6	4	6	
30	U.05	Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.	48	45	29	43	
31	U.06	Gunung Sari - Lilir - Kekerri - Sayang-Sayang - Sindu, Pp.	0	0	0	0	
32	U.07	Gunung Sari - Lilir - Sayang-Sayang - Mandalika, Pp.	0	0	0	1	
33	U.08	Gunungsari – Sandik – Puncang Sari – Lembah Sari – Batulayar – Senggigi – Kerandangan, Pp				1	Subsidi Angkutan Perintis Tahun 2023
Jumlah Angkutan Dalam Trayek			244	192	138	191	
Jumlah Jaringan Trayek						33	Trayek
Jumlah Jaringan Trayek Aktif						21	Trayek
Capaian Wilayah Terhubung Dengan Moda Transportasi						63.64	%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jaringan trayek mengalami penambahan pada tahun 2023, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat. Penambahan jumlah jaringan trayek dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan wilayah pelayanan transportasi darat di Kabupaten Lombok Barat. Namun dari jumlah jaringan trayek yang tersedia, hanya 21 trayek saja yang telah dilayani angkutan umum pedesaan. Sejumlah 12 jaringan trayek masih berstatus non aktif, atau belum terlayani oleh angkutan umum. Sehingga sesuai dengan rumus di atas, persentase capaian wilayah yang terhubung dengan jaringan trayek aktif adalah sebesar 63,64% dari target 58,06% dengan persentase capaian 109,61%. Adapaun yang menjadi faktor keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

Faktor Keberhasilan

- Adapun ketersediaan kendaraan umum di seluruh jaringan trayek hingga tahun 2023 adalah sebanyak 191 unit, menurun dari jumlah kendaraan pada tahun 2022 yakni sebanyak 138 unit. Namun ketidaktersediaan kendaraan pada beberapa trayek non aktif didukung oleh penyediaan kendaraan mini bus perintis yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada sejumlah BUMD/desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Hingga tahun 2023, jumlah kendaraan perintis yang dihibahkan kepada desa sejumlah 10 unit.
- Penambahan jumlah jaringan trayek dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan wilayah pelayanan transportasi darat di

Kabupaten Lombok Barat, namun dari jumlah jaringan trayek yang tersedia, hanya 21 trayek saja yang telah dilayani angkutan umum pedesaan. Sejumlah 12 jaringan trayek masih berstatus non aktif, atau belum terlayani oleh angkutan umum.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Melakukan pendataan pada angkutan pedesaan yang masih beroperasi pada jaringan trayek untuk mengetahui tingkat kelayakan moda. Sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang bisa ditingkatkan.
- Melakukan komunikasi dengan Koperasi-koperasi angkutan untuk mengupayakan peremajaan moda angkutan pedesaan dan penambahan moda untuk melayani jaringan trayek non aktif. Termasuk melakukan distribusi moda sehingga tidak menumpuk pada beberapa jaringan trayek saja.
- Memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tanpa dipungut biaya.

2. Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata

Tabel 3.16 Capaian Indikator Ketersediaan Jalur Trayek Menuju Destinasi Pariwisata Tahun 2023

No.	Nama Obyek / Desa	Lokasi	Daya Tarik Wisata	Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Mataram)	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan
1	Desa Sesela	Desa Sesela, Kec. Gunungsari	Centra Kerajinan Rakyat	5 km	Kerandangan – Senggigi – Sesela – Midang – Keker – Sayang-Sayang – Selagalas – Lingsar – Narmada, Pp
2	Pura Agung Gunungsari	Desa Gunungsari, Kec. Gunungsari	pura yang terletak di atas bukit; pemandangan alam; flora dan fauna	4 km	Sidemen – Gunungsari – Rembiga – Ampenan, Pp
3	Makam Mambalan	Desa Mambalan, Kec. Gunungsari	Makam Tokoh Agama	11 km	Gunungsari – Mambalan – Lilir – Keker – Sigerongan – Bug-Bug – Peteluan Indah – Lingsar – Batu Kumbung – Narmada, Pp
4	Air Terjun Grepek	Desa Mambalan, Kec. Gunungsari	Air terjun; pemandangan alam yang indah	9 km	Gunungsari – Mambalan – Lilir – Keker – Sigerongan – Bug-Bug – Peteluan Indah – Lingsar – Batu Kumbung – Narmada, Pp
5	Pantai Senggigi dan sekitarnya	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Pantai Laguna; panorama alam perbukitan; sunset; festival kebudayaan	10 km	Kerandangan – Senggigi – Sesela – Midang – Keker – Sayang-Sayang – Selagalas – Lingsar – Narmada, Pp Senggigi – Montong – Mangsit – Ampenan, Pp
6	Batu Bolong	Desa Batulayar, Kec. Batulayar	pura di atas batu; terdapat batu bolong (berlobang) di pinggir pantai; panorama alam pantai	8 km	Kerandangan – Senggigi – Sesela – Midang – Keker – Sayang-Sayang – Selagalas – Lingsar – Narmada, Pp

No.	Nama Obyek / Desa	Lokasi	Daya Tarik Wisata	Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Mataram)	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan
7	Pantai Mangsit	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Deburan ombak dan pantai yang landai; dapat melihat sunset	20 km	Gunungsari - Montong - Mangsit - Ampenan, Pp Senggigi - Montong - Mangsit - Ampenan, Pp
8	Hutan Wisata Pusuk	Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar	hutan wisata; kehidupan kera liar; iklim pegunungan	16 km	Senggigi - Montong - Mangsit - Ampenan, Pp Gunungsari - Sandik - Puncang Sari - Lembah Sari - Batulayar - Senggigi - Kerandangan, Pp
9	Makam Batulayar	Desa Batulayar, Kec. Batulayar	hutan wisata; kehidupan kera liar; iklim pegunungan	9 km	Kerandangan – Senggigi – Sesela – Midang – Kekerri – Sayang-Sayang – Selagalas – Lingsar – Narmada, Pp
10	Pantai Meninting	Desa Meninting	Keindahan alam pantai	7 km	Kerandangan – Senggigi – Sesela – Midang – Kekerri – Sayang-Sayang – Selagalas – Lingsar – Narmada, Pp
11	Mata Air Manggong	Desa Batu kumbang, Kec. Lingsar	Mata air yang jernih; keindahan alam	14 km	Narmada – Batu Kumbang – Karang Bayan – Segerongan – Kekerri – Gunungsari, Pp
12	Pura Lingsar	Desa Lingsar, Kec. Lingsar	Candi peninggalan Agama Hindu; event perang topat; nilai sejarah	9 km	Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.
13	Masjid Kuno	Desa Karang Bayan, Kec. Lingsar	Masjid peninggalan sejarah; nilai sejarah	17 km	Narmada – Batu Kumbang – Karang Bayan – Segerongan – Kekerri – Gunung Sari, Pp
14	Air Terjun Prabe		Mata Air yang jernih; tempat pemandian	15 km	Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp. Gunungsari - Mambalan - Lilir - Kekerri - Sigerongan - Bug-Bug - Peteluan Indah - Lingsar - Batu Kumbang - Narmada, Pp
15	Hutan Wisata Sesaot	Desa Sesaot, Kec. Narmada	Hutan lindung; mata air yang jernih; keindahan alam	20 km	Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp. Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
16	Goa Lembah Sempage	Desa Sesaot, Kec. Narmada	Goa Lawul; keindahan alam	25 km	Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
17	Aik Nyet	Desa Sesaot, Kec. Narmada	Hutan Lindung; panorama alam yang indah; sumber mata air yang jernih	20 km	Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp. Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
18	Gunung Jae	Desa Sedau, Kec. Narmada	Desa Budaya; Keindahan alam; dam irigasi	23 km	Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
19	Padang Golf Golong	Desa Sedau, Kec. Narmada	Keindahan alam; rekreasi dan olahraga	16 km	Keru – Narmada – Mandalika, Pp.
20	Taman Narmada	Desa Lembuak, Kec. Narmada	Taman sari bagi kerajaan; sumber	12 km	Keru – Narmada – Mandalika, Pp.

No.	Nama Obyek / Desa	Lokasi	Daya Tarik Wisata	Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Mataram)	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan
			mata air dari Gunung Rinjani; Air Awet Muda		Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp. Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp. Narmada – Tanak Beak – Kumbung – Kuripan – Gerung, Pp. Narmada – Dasan Tereng – Merembu – Bengkel – Mandalika, Pp. Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekeri – Gunungsari, Pp Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
21	Suranadi	Desa Suranadi, Kec. Narmada	Keindahan kera liar; hutan wisata; iklim pegunungan; makanan khas bulayak, dodol nangka	17 km	Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp. Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
22	Dam Keru	Desa Keru, Kec. Narmada	Desa Budaya; Keindahan alam; dam irigasi	20 km	Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.
23	Desa Banyumulek	Desa Banyumulek, Kec. Kediri	Centra kerajinan gerabah dengan hiasan anyaman ketak	17 km	Gerung - Kediri - Rumak - Banyumulek - Gapuk, Pp Gerung - Beleka - Gapuk - Banyumulek - Rumak - Labuapi - Bengkel - Mandalika, Pp
24	Gunung Pengsong	Desa Perampuan, Kec. Labuapi	Keindahan pemandangan dari puncak bukit; terdapat kera yang jinak	16 km	Gerung - Rumak - Gunung Pengsong - Perampuan - Bajur - Pagutan, Pp
25	Makam Ilam	Desa Kuranji, Kec. Labuapi	Makam Tokoh Agama dekat pantai	13 km	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Perampuan - Labuapi, Pp
26	Gunung Sasak	Desa Kuripan, Kec. Kuripan	Hutan Lindung; puncak bukit yang indah	12 km	Gerung - Giri Tembesi - Tempos - Giri Sasak - Kuripan Selatan - Kumbung - Keidri - Terminal Mandalika, Pp
27	Pantai Endok	Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung	Keindahan alam pantai	18 km	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Perampuan - Labuapi, Pp
28	Pelabuhan Lembar	Desa Lembar, Kec. Lembar	Keindahan alam pantai	23 km	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh, Pp Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
29	Pantai Cemara Tebal	Desa Lembar, Kec. Lembar	Pantai yang indah	17 km	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp. Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp. Lembar - Sekotong - Blongas -

No.	Nama Obyek / Desa	Lokasi	Daya Tarik Wisata	Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Mataram)	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan
					Pengantap, Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
30	Makam Keramat Cemare	Desa Lembar, Kec. Lembar	Makam Tokoh Agama	21 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
31	Pantai Mekaki	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Alam Pantai dengan pasir putih	58 km	Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp
32	Goa Jepang Labuan Poh	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Nilai sejarah; goa bebas benteng pertahanan penjajahan Jepang; meriam peninggalan Jepang dengan panjang 8 meter	70 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
33	Gili Gede	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
34	Gili Poh	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp
35	Gili Lontar	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp
36	Gili Nanggu	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai pasir putih, dapat melihat sunset dan sunrise	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
37	Gili Rengit	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	70 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp
38	Gili Sudak	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
39	Gili Tangkong	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp
40	Gili Layar	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	70 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp
41	Gili Asahan	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar -

No.	Nama Obyek / Desa	Lokasi	Daya Tarik Wisata	Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Mataram)	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan
					Mandalika, Pp.
42	Gili Genting	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Lembar - Sekotong - Blongas - Mekaki - Pelangan, Pp
43	Gili Goleng	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
					Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.
44	Bangko-Bangko	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	60 km	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh. Pp.
45	Pantai Bange	Desa Sepi, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	58 km	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp
46	Goa Alam Raksasa	Desa Sepi, Kec. Sekotong	Goa Alam	58 km	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp
47	Makam Keramat	Desa Kedaro, Kec. Sekotong	Makam Tokoh agama	58 km	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp
48	Embung Kedaro	Desa Kedaro, Kec. Sekotong	Waduk Penyimpanan air irigasi; keindahan alam perbukitan	58 km	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp
49	Pantai Sepi	Desa Sepi, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	58 km	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp
50	Pantai Nambung		Pantai yang indah	60 km	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp
Jumlah Destinasi Wisata			50	Obyek	
Jumlah Destinasi Wisata yang dilayani jaringan trayek			50	obyek	
persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata			100	%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 adalah sebanyak 50 obyek (sumber data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat). Keseluruhan obyek wisata telah dilalui oleh jaringan trayek pedesaan. Sehingga berdasarkan data di atas, persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata adalah 100% dari target 98% atau persentase capaian 102,04%. Adapun yang menjadi faktor keberhasilannya adalah sebagai berikut.

Faktor Keberhasilan

- Penambahan jumlah jaringan trayek untuk melayani wilayah yang agak jauh dari pusat perekonomian dan pariwisata sehingga cakupan akses wilayah meningkat
- Penambahan armada berupa mini bus disejumlah jaringan trayek yang non aktif dan kekurangan moda angkutan

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Melakukan penyusunan Rencana Umum Transportasi Jalan (RUTJ) untuk memberikan gambaran umum dan detail terkait jalur transportasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam rangka pembangunan jalan, pengadaan perlekapan jalan, dan simpul transportasi.
- b. Melakukan komunikasi dengan Koperasi-koperasi angkutan untuk mengupayakan peremajaan moda angkutan pedesaan dan penambahan moda untuk melayani jaringan trayek non aktif. Termasuk melakukan distribusi moda sehingga tidak menumpuk pada beberapa jaringan trayek saja.

3. Persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar)

Tabel 3.17 Ketersediaan Jaringan Trayek menuju Pasar di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

No.	Nama Pasar	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan	Lokasi
1	Pasar Narmada	Keru – Narmada – Mandalika, Pp.	Narmada
		Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp.	
		Narmada – Lingsar – Mandalika, Pp.	
		Narmada – Tanak Beak – Kumbung – Kuripan – Gerung, Pp.	
		Narmada – Dasan Tereng – Merembu – Bengkel – Mandalika, Pp.	
		Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekerri – Gunungsari, Pp	
		Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.	
2	Pasar Keru	Keru – Narmada – Mandalika, Pp.	Narmada
		Keru – Sedau – Sesaot – Narmada, Pp.	
3	Pasar Suranadi	Sesaot – Narmada – Mandalika, Pp.	Narmada
4	Pasar Endut	Narmada – Batu Kumbung – Karang Bayan – Segerongan – Kekerri – Gunung Sari, Pp	Narmada
5	Pasar Gunungsari	Gunungsari - Sandik - Puncang Sari - Lembah Sari - Batulayar - Senggigi - Kerandangan, Pp	Gunungsari
6	Pasar Sidemen	Sidemen – Gunung Sari – Rembiga – Ampenan, Pp.	Gunungsari
7	Pasar Gerung	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Perampuan - Labuapi, Pp	Gerung
		Gerung – Kediri – Rumak – Banyumulek – Gapuk, Pp.	
		Gerung – Rumak – Gunung Pengsong – Perampuan – Bajur – Pagutan, Pp.	
		Gerung – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.	
		Gerung – Beleka - Gapuk – Banyumulek – Rumak – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.	
		Gerung – Tempos – Aik Ampat – Dasan Geres – Gerung, Pp.	
		Gerung – Tempos – Aik Ampat – Dasan Geres – Rumak - Labuapi, Pp.	
		Gerung - Banyu Urip - Aik Ampat - Gerung, Pp	
		Gerung - Rumak - Banyumulek - Suka Makmur - Mesanggok - Gerung, Pp	
8	Pasar Tempos	Gerung - Banyu Urip - Aik Ampat - Gerung, Pp	Gerung
9	Pasar Penarukan	Gerung - Penarukan - Kebon Ayu - Kuranji - Prampuan - Labuapi, Pp	Gerung
10	Pasar Kediri	Lembar - Gerung - Kediri - Bengkel - Mandalika, Pp.	Kediri
		Gerung – Kediri – Rumak – Banyumulek – Gapuk, Pp.	

No.	Nama Pasar	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan	Lokasi
		Kediri – Bagek Polak – Jerneng - Perampuan, Pp.	
11	Pasar Jagaraga	Gerung – Giri Tembesi – Tempos – Giri Sasak – Kuripan Selatan – Kumbung – Kediri – Mandalika, Pp.	Kediri
12	Pasar Lembar	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.	Lembar
		Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp.	
13	Pasar Eat Mayang	Lembar - Sekotong - Pelangan - Labuan Poh, Pp	Lembar
14	Pasar Jembatan Kembar	Labuan Poh - Pelangan - Lembar - Mandalika, Pp	Lembar
15	Pasar Sekotong	Lembar - Sekotong - Blongas - Pengantap, Pp.	Sekotong
16	Pasar Pelangan	Lembar - Sekotong -Pelangan - Labuan Poh. Pp.	Sekotong
17	Pasar Lilir	Gunungsari - Lilir - Kekerri - Sayang-Sayang - Sindu, Pp	Lingsar
18	P. Jelateng lingsar	Narmada - Lingsar - Mandalika, Pp	Lingsar
19	Pasar Duman	Gunungsari - Mambalan - Lilir - Kekerri - Sigerongan - Bug-Bug - Peteluan Indah - Lingsar - Batu Kumbung - Narmada, Pp	Lingsar
20	Pasar Kumbung	Gerung - Giri Tembesi - Tempos - Giri Sasak - Kuripan Selatan – Kumbung - Kediri – Terminal Mandalika, Pp.	Kuripan
21	Pasar Kuripan	Gerung - Giri Tembesi - Tempos - Giri Sasak - Kuripan Selatan – Kumbung - Kediri – Terminal Mandalika, Pp.	Kuripan
22	Pasar Perampuan	Perampuan – Jerneng – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.	Labuapi
23	Pasar Jerneng	Perampuan – Jerneng – Labuapi – Bengkel – Mandalika, Pp.	Labuapi
Jumlah Pasar		Unit	23
jumlah pasar yang dilayani jaringan trayek		Unit	23
persentase jalur trayek menuju pusat perekonomian (pasar)		%	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah pasar di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 adalah sebanyak 23 pasar, dan keseluruhan pasar sudah dilewati oleh jaringan trayek pedesaan. Sehingga menurut data di atas persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar) adalah 100% dari target 93,75% dengan capaian persentase 106,67%. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

Faktor Keberhasilan

- Penambahan jumlah jaringan trayek untuk melayani wilayah yang agak jauh dari pusat perekonomian dan pariwisata sehingga cakupan akses wilayah meningkat
- Penambahan armada berupa mini bus disejumlah jaringan trayek yang non aktif dan kekurangan moda angkutan

Upaya Peningkatan Kinerja

- Melakukan penyusunan Rencana Umum Transportasi Jalan (RUTJ) untuk memberikan gambaran umum dan detail terkait jalur transportasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam rangka pembangunan jalan, pengadaan perlegkapan jalan, dan simpul transportasi.
- Melakukan pendataan pada angkutan pedesaan yang masih beroperasi pada jaringan trayek untuk mengetahui tingkat kelayakan

moda. Sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang bisa ditingkatkan.

4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Capaian untuk jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 75,11% dari target 74,87, dengan persentase capaian 100,32%. Indikator Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap mengalami kenaikan sebesar 0,78% dari tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 75,11% (429,338Km) pada Tahun 2023 dan capaian realisasi sebesar 74,33% (424,878Km) dari total panjang jalan 571.584 Km.

Tabel 3.18 Rincian Panjang dan Kemantapan Jalan Kabupaten

Uraian		Tahun 2022		2023	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
A. Jenis Permukaan Jalan					
-	Hotmix	508.331	88.93	541.435	94.73
-	Aspal	25.265	4.42	3.390	0.59
-	Kerikil	7.440	1.30	6.570	1.15
-	Tanah	20.938	3.66	12.614	2.21
-	Beton	9.610	1.68	7.575	1.33
Jumlah / Total		571.584	100.00	571.584	100.00
B. Kondisi					
-	Baik	307.132	53.73	312.322	54.64
-	Sedang	117.746	20.60	117.016	20.47
-	Rusak	113.527	19.86	110.667	19.36
-	Rusak Berat	33.179	5.80	31.579	5.52
Jumlah / Total		571.584	100.00	571.584	100.00
C. Kemantapan Jalan					
-	Mantap (Baik + Sedang)	424.878	74.33	429.338	75.11
-	Tidak Mantap (Rusak)	113.527	19.86	110.667	19.36
-	Kritis (Rusak Berat)	33.179	5.80	31.579	5.52
Jumlah / Total		571.584	100.00	571.584	100.00

Faktor Keberhasilan

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan dan pemeliharaan rutin jalan.
- Optimalisasi penyerapan anggaran yang tersedia pada tahun berjalan untuk peningkatan konektivitas wilayah mulai dari pemukiman sampai kepusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Lombok Barat.

Upaya peningkatan Kinerja

- Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah dengan terus melakukan peningkatan kondisi kemantapan jalan dan jembatan baik dengan penambahan ruas-ruas jalan maupun dengan peningkatan status jalan.

- b. Perlu adanya keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi dengan fungsi tugas lintas institusi terkait regulasi pada tataran operasional.

5. MENINGKATNYA AKSES INFRASTRUKTUR DASAR

Tabel 3.19 Capaian Kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	98,09	98,56	100,48
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	83,82	93,53	111,58

Persentase Rumah Layak Huni

Tabel 3.20 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Persentase Rumah Layak Huni	1. persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	23,50	48,35	205
	2. persentase Penanganan kawasan kumuh	26,23	28,94	110
	3. Persentase Ketersediaan PSU	76,45	75,53	98,78

1. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Realisasi untuk Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah 48,35% dari target 23,50%, dengan persentase capaian 205%. Berikut terdapat data RTLH yang telah ditangani selama tahun 2023.

Tabel 3.21 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani

Kecamatan	RTLH BDP	Penanganan RTLH					Yg sudah tertangani	Sisa RTLH
		2019	2020	2021	2022	2023		
1. Sekotong	1439	340	322	7	9	133	811	628
2. Lemabar	840	190	249	-	34	8	481	359
3. Gerung	431	130	46	-	25	45	246	185
4. Narmada	769	100	107	8	-	28	243	526
5. Lingsar	927	50	49	100	60	53	312	615
6. Batu Layar	277	60	16		51	13	140	137
7. Kuripan	352	60	60	19	33	3	175	177
8. Gunung Sari	659	20	52	10	-	35	117	542
9. Kediri	217	77	41	94	64	12	288	(71)
10. Labuapi	403	205	46	75	117	5	448	(45)
Jumlah	6314	1232	988	313	393	335	3261	3053

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni yang di tangani sejak tahun 2019 - 2023 menjadi berkurang, sisa jumlah rumah tidak layak huni sampai tahun 2023 sebanyak 3.053 unit dari target 6.314 unit, sudah mengalami penanganan sebanyak 3.261 unit. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

Faktor Keberhasilan

Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan pada sasaran ini disebabkan karna adanya pembangunan di luar BNBA yang di bangun melauai BAZNAS, CSR, dan pokok-pokok pikiran hasil reses yang mana data penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi besar yang menyebabkan angka persentasenya menjadi 48,35 % atau 205 % dari target 100%

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan kinerja sasaran pada tahun berikutnya dengan berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan berkolaborasi dengan Pihak-pihak dari pemerintahan maupun non-pemerintahan untuk meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni.

2. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

Realisasi untuk Penanganan Kawasan Kumuh adalah 28,94% dari target 26,23%, dengan persentase capaian 110%. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan pada sasaran ini adanya kegiatan seperti jalan lingkungan dan MCK pada kawasan permukiman kumuh. Kegiatan ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah Bersama legislative, sehingga indikator penanganan Kawasan kumuh dapat tercapai.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang akan di lakukan dalam penangan kawasan kumuh pada tahun berikutnya dengan mengarahkan pokok-pokok pikiran hasil reses dengan pembangunan infrastruktur untuk lebih memprioritaskan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh.

3. Persentase Ketersediaan PSU

Realisasi ketersediaan PSU adalah 75,53% dari target 76,45%, dengan persentase capaian 102,92%. Indikator ini tidak tercapai yang disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun yang menjadi faktor kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

Faktor Kegagalan

Capaian ini belum mencapai target karena masih ada kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja daerah. Penataan dan pengelolaan PSU merupakan kegiatan yang menjadi perhatian khusus pihak legislatif, sehingga dalam tahap pelaksanaan banyak ditujukan pada tempat yang merupakan lokasi dari aspirasi rakyat.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya Dinas Perumahan dan Permukiman untuk meningkatkan kinerja sasaran pada tahun berikutnya dengan Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang memadai serta mengintegrasikan program/kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan dan Permukiman dalam meningkatkan kinerja pada masa akan datang lebih memfokuskan untuk mencapai kinerja dengan lebih banyak berkoordinasi dengan pihak-pihak baik itu kepada perangkat daerah terkait dengan pihak swasta, CSR ataupun pihak Baznas Kabupaten Lombok Barat yang pada saat ini juga banyak membantu dalam penanganan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, selain dari anggaran DAK yang selama ini juga banyak membantu dalam hal peningkatan kinerja terutama terkait tentang kemiskinan.

Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Layak

Tabel 3.22 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	83,82%	93,53%	111,58%
	2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	87,65	90,21	102,92

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Persentase capaian sebesar 111,58% merupakan realisasi capaian akses air minum layak sebesar 93,53% dari rencana target 83,82% yang

ditetapkan pada tahun 2023, capaian ini didapat dari ketersediaan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat.

Faktor Keberhasilan

Semakin baiknya pendataan sumber-sumber mata air baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten Lombok Barat baik untuk penyediaan air minum maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Capaian Layanan Air Minum Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Capaian Layanan Air Minum Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Cakupan Layanan Air Minum	
		Jiwa	KK	KK	%
1	Sekotong	76,357	23,881	19,599	82.07
2	Lembar	53,524	16,988	14,813	87.20
3	Gerung	90,496	29,606	28,359	95.79
4	Labuapi	95,726	30,136	29,546	98.04
5	Kediri	60,659	18,214	17,932	98.45
6	Kuripan	42,921	13,394	12,867	96.07
7	Narmada	105,517	36,107	33,593	93.04
8	Lingsar	75,759	25,100	22,950	91.43
9	Gunung Sari	91,634	28,873	28,239	97.80
10	Batu Layar	49,710	15,545	14,557	93.64
Jumlah		742,303	237,844	222,455	93.53

Upaya Peningkatan Kinerja

- Pendataan sumber-sumber mata air baru untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku lainnya.
- Peningkatan pembangunan prasarana air minum melalui jaringan perpipaan terlindungi.

2. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

Capaian untuk Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 sebesar 90,21% telah tercapai dari target sebesar 87,65% dengan persentase capaian 102,92%. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 2,64% dari tahun lalu yaitu 87,57%. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

Faktor Keberhasilan

- Capaian realisasi ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah dalam penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Barat dengan penyediaan sarana sanitasi berupa pembangunan MCK Komunal dan Pembangunan tangki septik individual
- Jumlah tangki septik atau MCK yang dimiliki oleh masyarakat seluruh Kabupaten Lombok Barat merupakan komulatif dari pembangunan daerah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan serta pembangunan secara swadaya oleh masyarakat sendiri dengan cakupan layanan sebesar 214,568 KK dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesar 237,844 KK.

Tabel 3.24 Capaian layanan sanitasi tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Cakupan Layanan Sanitasi	
		Jiwa	KK	KK	%
1	Sekotong	76,357	23,881	19,222	80.49
2	Lembar	53,524	16,988	14,932	87.90
3	Gerung	90,496	29,606	26,209	88.53
4	Labuapi	95,726	30,136	29,228	96.99
5	Kediri	60,659	18,214	17,711	97.24
6	Kuripan	42,921	13,394	10,718	80.02
7	Narmada	105,517	36,107	32,086	88.86
8	Lingsar	75,759	25,100	21,419	85.33
9	Gunung Sari	91,634	28,873	28,286	97.97
10	Batu Layar	49,710	15,545	14,757	94.93
Jumlah		742,303	237,844	214,568	90.21

Upaya Peningkatan Kinerja

- Sosialisasi penyediaan lahan untuk kesiapan lahan lokasi pembangunan prasarana MCK.
- Peningkatan pembangunan pengelolaan air limbah skala kawasan.

6. Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan

Tabel 3.25 Capaian Kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2023		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15,45	19,14	123,88
	Nilai PDRB Perkapita	15,36	14,87	96,81
	Nilai Realisasi investasi			52,15
	Penanaman Modal Asing (PMA)	153,88	31,66	20,58
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	713,57	597,49	83,73

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tabel 3.26 Capaian kinerja dari Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Dinas Kesehatan	100	96,76	96,76
	2. RSUD	100	114,74	114,74
	JUMLAH BLUD		106,15	106,15
	3. Badan Pendapatan Daerah	100	78,50	78,50
	4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	100	67,94	67,94
	5. Dinas Lingkungan Hidup	100	100,18	100,18
	6. Dinas Pemuda dan Olahraga	100	103,52	103,52
	7. Dinas Perindustrian	100	69,00	69,00

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
	dan Perdagangan			
	8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100	98,57	98,57
	9. Dinas Perikanan dan Kelautan	100	16,62	16,62
	10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	35,86	35,86
	11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	105,42	105,42
	12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	100	52,87	52,87
	13. Dinas Pertanian	100	30,15	30,15
	14. Dinas Perhubungan	100	37,97	37,97
	15. Dinas Kesehatan (non BLUD)	100	177,01	177,01
	16. Dinas Tenaga Kerja	100	-	-
	JUMLAH NON BLUD...	100	72,03	72,03
	TOTAL			86,25

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, Pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 1,836,569,928,096. Hasil rekapitulasi yang telah disusun Badan Pendapatan Daerah, disebutkan bahwa capaian PAD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 341.268.945.391,65. Jadi, persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah jumlah realisasi PAD dibagi Jumlah Pendapatan Daerah, dikali 100 persen sehingga hasilnya 19,14%.

1. Dinas Kesehatan

Faktor kegagalan

Belum maksimalnya Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah atau dari BLUD Puskesmas, seperti angka kontak adalah 15% dari Angka kontak, rujukan non spesialisik dan dan terkendalnya Hipertensi dan Diabetes Melitus

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di tahun selanjutnya adalah dengan meningkatkan performa rumah sakit dan Puskesmas Daerah melalui rebranding guna meningkatkan angka kunjungan ke fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

2. RSUD

Faktor Keberhasilan

- Peningkatan jenis pelayanan spesialisik pada instalasi rawat jalan dengan dikembangkannya klinik Akupunktur, klinik Klinik Penyakit Dalam, Klinik Gigi, Klinik Bedah Syaraf dan lainnya.
- Dibukanya ruang rawat inap dengan baru dengan peningkatan klasifikasi kelas pada ruangnya seperti ruangan : Alamanda,

Kenanga, Aster, Wijayakusuma, Nusa Indah. Pada ruangan tersebut telah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang terkini sehingga peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap menjadi signifikan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tugas dari setiap Organisasi Perangkat Daerah selalu dinamis. RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini tetap optimis dalam setiap penentuan target pendapatannya. Target pendapatan pada masa yang akan datang diproyeksikan terus mengalami pertumbuhan mengingat sekarang RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat sudah naik kelas dari kelas C menjadi kelas B. Secara tidak langsung akan meningkat target pendapatannya seiring dengan naiknya tarif perda sesuai dengan kelas rumah sakit.

3. Badan Pendapatan Daerah

Faktor Kegagalan

- a. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPT yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan.
- b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat dan transparan.
- e. Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah.
- f. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah
- g. Perlu diadakannya riset terkait dengan potensi-potensi pendapatan daerah.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam melakukan penagihan aktif dan penegakan hukum atas wajib pajak yang membandel.
- b. Pemanfaatan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah berbasis System yang terintegritas khususnya Transaksi Non Tunai (Si Jempol Jari).
- c. Pemutakhiran Subjek dan Objek Pajak Daerah khususnya PBB P2.
- d. Memperkuat basis data Pajak Daerah secara Up date.
- e. Melakukan penghapusan Piutang PBB P2 dan PHR yang telah daluwarsa.

- f. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Tapping Box bekerjasama dengan pihak Bank NTB dibawah pengawasan KPK.
- g. Mengupayakan terhubungnya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan Cash Management System (CMS) Bank NTB Syariah guna memudahkan pembayaran pajak makan minum (restoran) pada kegiatan rapat-rapat di desa

4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Faktor Kegagalan

- a. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
- b. Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan
- c. Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan
- d. Banyak perusahaan PMA dan PMDN yang sudah memiliki NIB namun tidak merealisasikan kegiatan investasinya sehingga tidak didapatkan data realisasi investasi dengan beberapa alasan baik internal maupun eksternal.(contoh konflik internal perusahaan dan konflik pertanahan/lahan)
- e. Rangkaian proses birokrasi perizinan berusaha di Lombok Barat relatif masih panjang sehingga minat berinvestasi juga masih rendah.
- f. Untuk PMA sudah bukan merupakan kewenangan daerah/ Kabupaten melainkan diambil alih oleh Kementerian Investasi berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pengaduan dan konsultasi agar setiap layanan pengaduan dan konsultasi dapat terlayani dan mendapat tindak lanjut yang tepat
- b. DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat berupaya untuk mengikutsertakan aparatur yang menangani pelayanan dalam bimbingan dan pelatihan teknis tentang pelayanan perizinan bidang penanaman modal.
- c. DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat berupaya mengembangkan pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan pelayanan bergerak guna menjangkau pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lombok Barat
- d. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala, serta mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing- masing kegiatan dan berdiskusi untuk mengupayakan solusi dalam menghadapi tantangan.

- e. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
- f. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
- g. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
- h. Tersedianya Help Desk
- i. Implementasi perizinan secara online dengan Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK)
- j. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan non perizinan

5. Dinas Lingkungan Hidup

Faktor Keberhasilan

- a. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas dari TPS 3R dalam mengelola persampahan
- b. Meningkatkan pelayanan pada laboratorium DLH

Upaya peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan performa pelayanan pada laboratorium DLH
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan
- c. Mengoptimalkan personil yang ada dalam koordinasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah
- d. Memperbaiki penyusunan Penetapan Kinerja untuk tahun kedepan sehingga lebih dapat
- e. terukur dan konsisten terhadap indikator sasaran dalam Renstra dan RPJMD.

6. Dinas Pemuda dan Olahraga

Faktor Keberhasilan

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang menunjang pencapaian target PAD
- b. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi
- c. Meningkatkan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penghasil PAD

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja adalah dengan cara meningkatkan Sarana dan Prasarana penghasil PAD .

7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Target pemungutan retribusi (Pendapatan Asli Daerah) yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022. Pada tahun 2022 target retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.

3.875.352.000,- sedangkan pada tahun 2023 target retribusi sebesar Rp. 5.075.352.000,- . Dari target tersebut, realisasi PAD yang dapat tercapai pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.502.071.978 atau sebesar 69,00 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27 Realisasi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Retribusi Pelayanan Tera Ulang	125.000.000,00	85.992.405,00	68,79
2. Retribusi Pelayanan Pasar	2.910.352.000,00	2.111.462.743,00	72,55
3. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.040.000.000,00	1.304.616.830,00	63,95
Jumlah Keseluruhan	5.075.352.000,00	3.018.606.916,00	69,00

Faktor Kegagalan

- Target Pendapatan Asli Daerah yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat.
- Kondisi sebagian besar pasar tradisional yang tidak laik sebagai tempat perdagangan jual beli terlebih di saat musim hujan.
- Tidak tersedianya mesin poporasi karcis retribusi pasar, sehingga menghambat tersedianya karcis pasar.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Revitalisasi pasar dalam rangka optimalisasi PAD.
- Pengadaan mesin poporasi untuk karcis cukai retribusi.
- Penertiban administrasi pengelola pasar
- Melakukan penataan pedagang di pasar agar tertib dan rapi.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi melalui pertemuan rutin dengan mandor pasar.
- Meningkatkan monitoring penerimaan retribusi pasar.
- Penggunaan Q-RIS dan Tap Cash sebagai pembayaran non tunai retribusi pasar yang dilakukan di pasar Narmada dimana kegiatan ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Bank Negara Indonesia.

8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Faktor Kegagalan

Faktor yang menghambat pencapaian target kinerja adalah jumlah potensi PAD terhadap menara tidak sebanding dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Upaya Peningkatan Kinerja

Memetakan potensi PAD terhadap jumlah menara yang ada dan merekomendasikannya kepada Pemerintah Daerah agar dalam penentuan target sesuai dengan kondisi yang ada.

9. Dinas Perikanan dan Kelautan

Persentase Realisasi PAD dari Sektor Perikanan tahun 2022 yaitu 28,48%, sementara tahun 2023 capaiannya hanya sebesar 16,62% , terjadi selisih sebesar 11,86%. Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan baik tahun 2022 maupun tahun 2023 masih menemukan kendala yang terbilang sama, karena selama tahun 2022, belum ada perbaikan sarana prasarana yang mendukung peningkatan capaian PAD secara langsung.

Faktor Kegagalan

- a. Induk Ikan di BBI Afkir
- b. Indukan yang diadakan tahun 2023 belum berproduksi .
- c. Animo masyarakat untuk membeli bibit di BBI menurun karena pakan pabrikan menjual pakan & benih satu paket
- d. Sering terjadi banjir dan ROB, sehingga tambak dinas hanyut yang mengakibatkan produksi bandeng sebagai sumber PAD terbawa oleh air
- e. Anggaran operasional tidak sesuai dengan luas lahan
- f. Alat berat Excavator Rusak dan tidak ada biaya perbaikan
- g. Sebagian besar peralatan & mesin di Rumah Kemasan dalam kondisi rusak
- h. Tidak adanya dukungan biaya operasional rumah kemasan
- i. Beberapa kali kerjasama dengan pihak ke-3 tidak berjalan dengan baik disebabkan segmen pasar di kab. Lombok Barat masih terbatas
- j. Kondisi air di Pasar Benih Ikan Sigerongan tidak memadai

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Memanfaatkan potensi objek PAD yang ada sebaik-baiknya walaupun dengan keterbatasan anggaran
- b. Mengupayakan dukungan anggaran yang optimal agar pencapaian presentase realisasi PAD dari sektor perikanan dapat memenuhi target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. Menyesuaikan target PAD sesuai ditetapkan dengan potensi dan kondisi existing, sehingga pencapaiannya dapat mencapai maksimal dan dapat memenuhi target PAD sebesar 100%.

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**Faktor Kegagalan**

Penyewaan untuk alat berat dan pengujian alat laboratorium hanya tergantung pada pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Lombok Barat

- a. Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tidak pernah menggunakan alat-alat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- b. Adanya permintaan penggunaan alat-alat berat yang bersifat sosial yang secara umum tidak dikenakan biaya.

Upaya peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan koordinasi eksternal yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama, komunikasi dan memberikan pelayanan prima dengan melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para penyewa alat berat dan alat pengujian material, sehingga menimbulkan rasa puas.
- b. Meningkatkan sistem pengelolaan alat berat yang baik tidak terlepas dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Perencanaan alat berat dimulai dari analisis kebutuhan penyewa akan kebutuhan alat berat dan alat pengujian material yang sering disewa.
- c. Melaksanakan pemeliharaan alat berat dan alat pengujian material secara rutin sehingga alat selalu siap bekerja dan selalu dalam kondisi baik pada saat penyewaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk meminimalisir kerusakan alat dan meningkatkan umur alat

11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**Faktor Keberhasilan**

- a. Optimalisasi target PAD melalui retribusi sewa Gedung SKB Gunungsari dan sewa Gedung Budaya Lombok Barat.
- b. Penambahan target PAD yaitu sewa lahan kantin sekolah SD dan SMP se Kabupaten Lombok Barat.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan sarana prasarana pada target-target retribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
- b. Penambahan target retribusi jumlah kantin pada masing-masing sekolah baik jenjang SD maupun SMP.

12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah**Faktor Kegagalan**

Persentase capaian PAD Perangkat Daerah pada Tahun 2023 sangat rendah yaitu sebesar 52,87% sehingga menunjukkan bahwa target yang direncanakan belum tercapai. Faktor penghambat dari pencapaian target PAD pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat adalah karena rendahnya capaian retribusi penyewaan tanah milik Pemda dan belum disesuaikan tarif sewa.

Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan daya saing sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan PAD dapat diupayakan dengan melakukan penyesuaian Peraturan Bupati tentang sewa lahan Pemda dan melaksanakan

koordinasi dengan Kepala Desa untuk mempercepat penyetoran retribusi sewa lahan.

13. Dinas Pertanian

Sumber PAD Dinas Pertanian yang menjadi penentu Capaian Realisasi PAD pada Dinas Pertanian adalah: 1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2). Retribusi Rumah Potong Hewan, dan 3). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dengan target capaian sebesar 100%. Tahun 2023 rata – rata capaian tiga sumber PAD tersebut hanya tercapai sebesar 30,15% sedangkan target Renstra tahun 2023 yang ingin dicapai adalah 100%.

Faktor kegagalan

- Kualitas air irigasi yang kurang baik sebagai akibat dari dampak pembangunan bendungan meninting.
- Adanya pengurangan pupuk subsidi pupuk dari pemerintah dan harga pupuk yang sangat tinggi terutama pupuk-pupuk non subsidi.
- Recofusing anggaran menyebabkan pembiayaan BBU hanya bisa di alokasikan hanya untuk satu kali musim tanam.
- Serangan hama terutama hama burung yang tidak bisa dikendalikan.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Melakukan pembinaan secara intensif terhadap sumber-sumber penghasil PAD dengan membentuk tim pembinaan yang sudah disusun sejak tahun 2022
- Melakukan identifikasi permasalahan – permasalahan yang di hadapi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD
- Malakukan pembangian tugas secara internal sesuai dengan tupoksi masing-masing unit pengelola sumber-sumber PAD
- Mengusulkan perubahan Perda retribusi sumber-sumber PAD sesuai dengan standar yang baru.

14. Dinas Perhubungan

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan Tahun 2023

Jenis retribusi	Target		Realisasi	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1. Retribusi penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3,600,000,000	3,600,000,000	886,261,350	24.62
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	703,020,000	703,020,000	438,925,000	62.43
3. Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal	198,720,000	198,720,000	127,645,400	64.23

4. Retribusi pelayanan tempat khusus parkir	191,324,000	191,324,000	198,627,500	103.82
5. Retribusi pelayanan kepelabuhanan	515,000,000	515,000,000	326,232,000	63.35
Total	5,208,064,000	5,208,064,000	1,977,691,250	37.97

Faktor kegagalan

- Target PAD yang ditetapkan pada tahun 2023 meningkat secara signifikan dibanding target PAD tahun 2022. Permintaan penurunan target pada anggaran Perubahan tidak dapat dipenuhi karena tidak mendapat persetujuan DPRD. Adapun target tahun 2023 melebihi potensi PAD yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.
- Pada pertengahan tahun 2023, stok buku uji KIR pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor habis, sehingga untuk sementara waktu tidak dapat melayani Pengujian Berkala Kendaraan sampai ditetapkannya APBD Perubahan 2023.
- Pemberlakuan penyetoran retribusi parkir non tunai dengan menggunakan Qris direncanakan dimulai pada awal tahun. Namun dikarenakan terkendala belum lengkapnya regulasi hukum pendukung, sehingga sistem Penyetoran dengan sistem bruto ditunda. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah capaian retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir hingga akhir tahun 2023.
- Terdapat sejumlah sewa lapak dan toko di pelabuhan maupun terminal yang masih tertunggak oleh penyewa.
- Fasilitas pada unit-unit layanan jasa perhubungan sebagai sumber pemasukan retribusi belum memadai. Masih banyak fasilitas/sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar pelayanan Minimal.
- Masih terdapat sejumlah titik parkir belum dikelola oleh Dinas Perhubungan.
- Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan dan juru parkir masih mencantumkan angka yang relatif kecil dibandingkan potensi pemasukan parkir pada sebagian besar titik parkir.
- Pengawasan juru parkir belum optimal karena keterbatasan tenaga pengawas perparkiran pada Dinas Perhubungan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan jasa perhubungan, seperti Terminal, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan.

15. Dinas Kesehatan (non BLUD)**Faktor keberhasilan**

Kabupaten Lombok Barat Sudah Universal Health Coverage (UHC) atau 95% Masyarakat Kabupaten Lombok Barat memiliki jaminan

Kesehatan, yang berimplikasi kepada meningkatnya kepesertaan BPJS dan meningkatnya dana transfer dari BPJS.

Upaya peningkatan kinerja

Meningkatkan Laboratorium Kesehatan Daerah melalui rebranding guna meningkatkan angka kunjungan ke fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

16. Dinas Tenaga Kerja

Faktor Kegagalan

- Belum adanya Perda tentang Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Aing (IMTA).

Upaya Peningkatan Kinerja

- Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah No. No. 6 tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.
- Menganggarkan untuk sarana dan prasarana pelatihan kerja pada UPT-BLK.

Nilai PDRB Perkapita

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Nilai PDRB Perkapita	1. Persentase pertumbuhan industri (Perindustrian);	0,5	0,92	184,00
	2. Nilai ekspor perdagangan daerah (perdagangan);	297.000	891.945,54	300,32
	3. Persentase peningkatan produksi pertanian (pertanian);	3,25	5,58	71,69
	4. Jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi (pariwisata);	220	212	96,36
	5. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terlatih di desa wisata (pariwisata);	139	80	57,55
	6. Jumlah kunjungan wisatawan (pariwisata);	185000	187532	101,37
	7. Lama tinggalnya wisatawan di destinasi (pariwisata),	1,4	1,86	132,86
	8. Volume produksi perikanan (kelauatan perikanan);	42.809,07	37.526,78	87,66
	9. Persentase jumlah Wirausaha baru/WUB (Koperasi UKM),	3,87	7,97	205,94
	10. Jumlah koperasi aktif (koperasi UKM);	2	2,19	109,50
	11. Persentase jaringan irigasi kondisi baik (PUPR)	63,33	63,44	100,17

2. Persentase pertumbuhan industri

Pertumbuhan industri pada tahun 2023 sebesar 0,92% dengan rincian pertumbuhan industri perkecamatan sebagai berikut.

Tabel 3.30 Pertumbuhan industri per kecamatan

Kecamatan	Jumlah Industri s/d Tahun 2022	Jumlah Industri s/d Tahun 2023
1. Gerung	1011	1045
2. Narmad	1392	1397
3. Gunung Sari	1710	1717
4. Kediri	3662	3672
5. Kuripan	663	664
6. Labuapi	865	876
7. Batulayar	680	682
8. Lingsar	1046	1049
9. Lembar	630	652
10. Sekotong	575	593
Jumlah	12.234	12.347
Pertumbuhan Industri	0,92%	

Faktor Keberhasilan

- a. Peningkatan kapasitas IKM melalui kegiatan peningkatan SDM bagi IKM pada tahun 2023
 - Pelatihan las yang diberikan kepada 20 IKM
 - Studi tiru di kawasan sentra industri tembakau kabupaten Bondowoso yang bersumber dari dana DBHCHT.
- b. Pemberian bantuan peralatan industri
 - Bantuan mesin jahit untuk 15 IKM
 - Bantuan percetakan 3 IKM
 - Bantuan peralatan las dan bengkel untuk 43 IKM.
 - Bantuan alat pertukangan untuk 14 IKM
 - Bantuan alat pengolahan makanan untuk 32 IKM

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Inovasi bentuk pelatihan industri untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreasi serta kemampuan berusaha bagi pelaku usaha bidang industri.
- b. Sasaran dalam pembinaan/penyuluhan /pendampingan industri lebih diarahkan pada penciptaan industri-industri baru namun tidak mengabaikan industri yang sudah ada, khususnya dalam pemberian bantuan sarana industri.
- c. Senantiasa dilakukan pelatihan bagi aparatur PNS untuk meningkatkan kemampuan penyuluhan industri dan kemampuan peneraan, dan berupaya mengusulkan formasi fungsional penyuluh industri.
- d. Melakukan kembali terhadap data IKM berdasarkan jenis produksi (by name by address) agar pembinaan dapat lebih terarah dan maksimal.

- e. Meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal melalui pemanfaatan produk-produk lokal dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah.

3. Nilai ekspor perdagangan daerah (perdagangan)

Nilai ekspor perdagangan Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 mencapai angka 891.945,540 US\$ yang memiliki kontribusi sebesar 15,04% terhadap ekspor perdagangan Provinsi NTB (di luar ekspor pertambangan). Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 397.071.59 US\$ dari tahun sebelumnya. Beberapa produk/barang ekspor yang memiliki kontribusi dalam ekspor ini antara lain: buah, kerajinan buah kering, terumbu karang, makanan ringan, batu apung, rumput laut dan Mutiara. Rincian jenis komoditi ekspor dan Negara tujuan serta nilai ekspor masing-masing komoditi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.31 Nilai Ekspor Perdagangan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2023

Eksportir	komoditi	Negara Tujuan	Volume	Nilai (US \$)
CV. Lombok Resources	Manggis	UEA	0,428	3,155.000
	Rambutan	UEA	0,428	2,990.000
	Nanas	UEA	0,002	4.000
	Jahe	UEA	0,002	5.000
		Pakistan	20.440	11,220.000
PT. Global Vanila Indonesia	Vanili	Brazil	0.013	760.000
		Belanda	0.006	157.700
PT. Indo Nature	Krjn. Buah kering	USA	11.796	70,934.400
PT. Lombok Samudera Abadi	Budidaya terumbu karang	USA	0.080	418.300
CV. Triguna Jaya	Makanan Ringan	Newzealand	6.672	18,552.800
CV. Sopoq Angen Bersinar	Batu Apung	China	15,222.388	766,741.270
PT. Razindo Global Nusantara	Rumput Laut	China	51.770	12,165.950
CV. Tri Utami Jaya	Mutiara	Malaysia	0.907	12,165.950
Jumlah			15,314.929	891,945.540

Faktor keberhasilan

- Menumbuhkan kecintaan terhadap produk dalam daerah/produk lokal dan meningkatkan pemanfaatan pasar on-line untuk memperluas jaringan usaha.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku industri/usaha mengenai mekanisme ekspor dan peluang pasar ekspor yang ada, dikarenakan

produk-produk yang ada di Kabupaten Lombok Barat banyak diekspor oleh eksportir luar daerah.

- c. Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi keberadaan mini market-mini market sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan kerja sama dengan pemerintah desa terkait pemanfaatan lapak-lapak kuliner yang telah dibangun oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa.
- f. Pemberian bantuan sarana perdagangan seperti bantuan rombongan dan kendaraan roda tiga.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri/usaha mengenai mekanisme ekspor dan peluang-peluang pasar ekspor yang ada, dikarenakan produk-produk yang ada di Kabupaten Lombok Barat banyak diekspor oleh eksportir luar daerah.
- b. Meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat menjadi produk ekspor.
- c. Menggali potensi-potensi produk yang dapat dijadikan produk ekspor.
- d. Meningkatkan publikasi tentang produk ekspor.

3. Persentase peningkatan produksi pertanian

• Produksi tanaman pangan

Faktor Kegagalan Produksi tanaman pangan

- a. Tingkat kehilangan hasil atau persentase kehilangan losis semakin semakin kecil atau cenderung menurun sebesar 23% (data hasil pengamatan losis tahun 2023)
- b. Tingkat Serangan hama dan penyakit tanaman (OPT) pada tanaman pangan semakin menurun.
- c. Pemahaman dan kesadaran petani untuk menerapkan GAP (Good Agriculture Practice) atau cara budidaya yang baik dan benar semakin meningkat.
- d. Tingkat adopsi inovasi teknologi baru oleh petani semakin meningkat.
- e. Adanya perubahan iklim yang tidak menentu dapat disikapi oleh petani dengan melakukan pergeseran musim tanam

Upaya Peningkatan Kinerja Produksi tanaman pangan

- a. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru kepada petani sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan.
- b. Mendorong petani untuk menumbuhkan dan mengembangkan Kelompoknya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya

- **Produksi tanaman hortikultura**

Faktor Kegagalan Produksi tanaman hortikultura

- a. Tingkat Serangan hama dan penyakit tanaman (OPT) pada tanaman hortikultura semakin meningkat
- b. Pemahaman dan kesadaran petani untuk menerapkan GAP (Good Agriculture Practice) atau cara budidaya yang baik dan benar semakin berkurang
- c. Tingkat adovsi inovasi teknologi baru oleh petani sangat rendah
- d. Perubahan iklim yang kecenderungannya elnino mengakibatkan proses pembungaan khususnya tanaman buah-buahan yang sangat kurang baik
- e. Petani sudah mulai melakukan upaya peremajaan tanaman dengan cara okulasi namun belum maksimal
- f. Petani belum menggunakan bibit unggul terutama untuk tanaman buah-buahan seperti manggis, rambutan, dan durian

Upaya Peningkatan Kinerja Produksi tanaman hortikultura

- a. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru kepada petani sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman Hortikultura.
- b. Mendorong petani untuk menumbuhkan dan mengembangkan Kelompoknya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.
- c. Perlu dilakukan upaya peningkatan perluasan areal tanam dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta mendorong peningatan produktivitas dengan peningkatan penerapan teknologi baru

- **Produksi Perkebunan**

Faktor Kegagalan Produksi Perkebunan

- a. Rata-rata umur tanaman perkebunan sudah tua dan belum optimalnya upaya peremajaan tanaman oleh petani
- b. Adanya penurunan areal tanam tanaman perkebunan rata-rata sebesar -1,56 Persen
- c. Terjadinya penurunan produktivitas tanaman perkebunan rata-rata sebesar 0,24 Persen
- d. Mahalnya biaya produksi seperti benih bermutu dan berlabel, pupuk dan obat-obatan belum dapat disikapi oleh petani
- e. Petani belum sepenuhnya menerapkan GAP (Good Agriculture Practice) atau cara budidaya yang baik dan benar
- f. Tingkat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Perkebunan mengalami peningkatan karena perubahan cuaca dan iklim elnino yang ekstrim

Upaya Peningkatan Kinerja Produksi Perkebunan

- a. Mendorong petani untuk melakukan peremajaan tanaman perkebunan dengan mengoptimalkan penyediaan bibit unggul terutama untuk tanaman tahunan seperti kopi, kakau, kelapa, dan mente.
- b. Mengoptimalkan penyediaan dan pemeliharaan prasarana produksi perkebunan seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani
- c. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru kepada petani sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman Hortikultura.
- d. Mendorong petani untuk menumbuhkan dan mengembangkan Kelompoknya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya

- **Produksi dan hasil peternakan**

Faktor Kegagalan Produksi dan hasil peternakan

- a. Tingkat serangan penyakit zoonosis pada ternak cukup tinggi
- b. Pemotongan hewan untuk konsumsi cukup tinggi
- c. Rendahnya PKS peternak tentang teknologi pembibitan ternak
- d. Rendahnya modal peternak yang mengakibatkan banyak peternak yang beralih ke bidang usaha yang lain
- e. Peternak kesulitan memperoleh bibit unggul untuk pengembangan ternak
- f. Tingginya mobilitas ternak.

Upaya Peningkatan Kinerja Produksi dan hasil peternakan

- a. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru kepada petani sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas komoditi Peternakan.
- b. Mendorong petani untuk menumbuhkan dan mengembangkan Kelompoknya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.

4. Jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi**Faktor kegagalan**

- a. Ketersediaan anggaran yang terbatas, untuk meningkatkan daya saing objek/destinasi wisata yang layak dikunjungi
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMD/BUMN, Swasta (pelaku usaha) dunia pendidikan
- c. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Belum optimalnya kualitas pengelolaan potensi wisata Belum optimalnya kinerja pariwisata berdampak pada rendahnya kesejahteraan dan perlindungan para pelaku pariwisata
- d. Masih terbatasnya SDM yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata

- e. Masih belum optimalnya publikasi dan promosi kepariwisataan mengenai berbagai produk pariwisata seperti industri pariwisata, potensi seni budaya, peninggalan-peninggalan nilai sejarah serta pemberdayaan masyarakat.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif tentang pentingnya sertifikasi bagi pelaku pariwisata dan manfaat yang diperoleh dengan tersertifikasi.
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mengikuti proses sertifikasi, misalnya dengan menyediakan informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur yang harus diikuti
- c. Memperkuat kerjasama dengan lembaga sertifikasi untuk menyediakan program sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

5. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terlatih di desa wisata**Faktor kegagalan**

- a. Ketersediaan anggaran yang terbatas, untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing para pelaku ekonomi kreatif di Desa Wisata.
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMD/BUMN, swasta (pelaku usaha).
- c. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Membangun kerjasama dengan pihak terkait, seperti industri kreatif lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program pelatihan.
- b. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pemetaan potensi pelaku ekonomi kreatif untuk menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan yang sebenarnya.

6. Jumlah kunjungan wisatawan**Faktor keberhasilan**

- a. Penyelenggaraan kampanye promosi khusus, seperti festival budaya, acara olahraga, atau acara pariwisata lainnya.
- b. Peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata, baik melalui transportasi darat atau laut.
- c. Peningkatan kualitas layanan pariwisata, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pelayanan wisata lainnya.
- d. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya perguruan tinggi dan akademi.

Upaya Peningkatan Kinerja

Mengadakan event-event di setiap destinasi wisata yang ada di Lombok Barat sehingga semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

7. Lama tinggalnya wisatawan di destinasi**Faktor keberhasilan**

- a. adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan destinasi wisata dengan mengedepankan keunikan dan keunggulan potensi masing-masing
- b. adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi untuk meningkatkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi budaya dan pariwisata
- c. adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah
- d. adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upayameningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
- e. adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya perguruan tinggi dan akademi

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga fasilitas wisata lainnya.
- b. Membangun kerjasama dengan pihak terkait, seperti industri pariwisata dan komunitas lokal, untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan.
- c. Mengembangkan SDM yang kompeten dalam bidang pariwisata untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan.

8. Volume produksi perikanan

Sasaran Volume Produksi Perikanan tidak mencapai target yang hanya sebesar 87,66% (37.526,78 ton) hal ini disebabkan karena turunnya produksi perikanan budidaya yang hanya mencapai 80,62%. Produksi perikanan budidaya diperoleh dari penjumlahan produksi dari berbagai macam metode pembudidayaan ikan baik di perairan tawar, payau maupun laut selama satu tahun. Untuk tahun 2023 diperoleh capaian produksi sebesar 24.219,78 ton dari target sebesar 30.041,74 ton, atau dapat dikatakan bahwa capaian produksi perikanan budidaya sebesar 80,62%. Produksi ini pun turun dari produksi tahun lalu

Faktor Kegagalan

- a. Penurunan luas lahan produksi
- b. Sarana dan prasarana budidaya yang belum memadai
- c. Nilai tukar pembudi daya masih rendah
- d. Selama tahun 2023 di wilayah Kabupaten Lombok Barat, tidak terdapat kegiatan budidaya rumput laut di kawasan laut.

Upaya peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pada kelompok perikanan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya
- c. Meningkatkan penggunaan pakan mandiri untuk menekan biaya operasional
- d. Bimtek terkait kecakapan nelayan dan perbaikan alat tangkap
- e. Program bantuan pembuatan sertifikat tanah nelayan supaya bisa di manfaatkan sebagai agunan oleh nelayan untuk mengakses modal di Bank
- f. Fasilitasi Bantuan dan Modernisasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
- g. Kemandirian Usaha Yang di Tunjang Kemudahan Dalam Akses Permodalan dan Kemitraan
- h. Kerjasama lintas sektor/OPD untuk meningkatkan konsumsi ikan

9. Persentase jumlah Wirausaha baru/WUB

Tabel 3.32 Data UKM di Kabupaten Lombok Barat

Kecamatan	Jumlah UMK		Total	Jumlah Wirausaha		Total
	Formal	Non formal		Pemula	Baru	
Sekotong	809	462	1271	96	45	141
Lembar	797	923	1720	73	184	257
Gerung	731	1514	2245	50	15	65
Kuripan	741	1115	1856	151	52	203
Kediri	531	1689	2220	77	58	135
Labuapi	537	324	861	94	87	181
Narmada	710	1457	2167	37	39	76
Lingsar	676	1601	2277	72	56	128
Gunungsari	670	669	1339	80	205	285
Batu Layar	398	281	679	52	59	111
	6600	10035	16635	782	800	1582

Faktor Keberhasilan

- a. Adanya kesadaran dari para pelaku UMKM tentang pentingnya mengurus perizinan Usaha/NIB (Nomor Induk Berusaha)
- b. Adanya Pendampingan, Bimbingan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada para pelaku UMKM.

- c. Pentingnya NIB untuk pengurusan bantuan dari pemerintah dan pinjaman KUR

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Menumbuh kembangkan wirausaha baru
- b. Memberikan pendampingan, konsultasi dan pembinaan kepada UMKM agar lebih berkembang sesuai tuntutan perkembangan zaman
- c. Memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM
- d. Mendorong UMKM untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain

10. Jumlah koperasi aktif (koperasi UKM)

Dari keberhasilan sasaran “ Menjadikan Koperasi & UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari table perbandingan jumlah koperasi di tahun 2022 dan tahun 2023 dibawah ini :

Tabel 3.33 Data Koperasi di Kabupaten Lombok Barat

Kecamatan	Desember 2022						Desember 2023						
	Aktif	Tak Aktif	Jmh	Aktif	Tak Aktif	Jmh	Aktif kembali	Kop. baru	Kop RAT	2022	2023	Sertifikasi IK	Kopsyah
Sekotong	35	64	99	37	64	101		3	19	21	19	2	
Lembar	23	23	46	25	22	47	1	1	18	12	18		
Gerung	35	57	92	37	56	93	1	1	28	21	24	5	
Kuripan	7	20	27	7	20	27			3	3	4	2	
Kediri	14	32	46	16	31	47	1	1	8	7	7	3	
Labuapi	15	34	49	15	34	49			9	11	12	2	
Narmada	26	36	62	27	35	62	1		22	24	26	5	
Lingsar	11	20	31	12	20	32		1	9	10	11	3	
Gunungsari	14	39	53	16	28	54	1		13	10	13	4	
Batu Layar	15	20	35	15	20	35			12	12	16	1	
Jumlah	195	345	540	207	340	547	5	7	141	131	150		7

Koperasi yang tidak aktif dapat memperoleh status aktif apabila dapat melaksanakan RAT di tahun berikutnya. Untuk koperasi tidak aktif lebih dari tiga tahun/dibekukan/tidak lagi menjalankan usahanya, dapat mengaktifkan kembali melalui rapat anggota, membentuk kepengurusan baru atau melaporkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Barat bahwakoperasi yang tidak aktif tersebut akan diaktifkan kembali.

Faktor Keberhasilan

- a. Adanya Kesadaran Gerakan Koperasi akan pentingnya RAT dan mengaktifkan koperasi
- b. Adanya Tim SATGAS Koperasi yang bertugas secara langsung melakukan pembinaan terkait penataan dan pembukuan koperasi
- c. Kemudahan membuat NIB yang dilakukan secara mandiri maupun pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Mempercepat terwujudnya pelaksanaan RAT Koperasi
- b. Memberikan Pendampingan, konsultasi dan pembinaan kepada Gerakan koperasi
- c. Memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi kepada Lembaga koperasi maupun anggota koperasi
- d. Peningkatan pengawasan terhadap koperasi

11. Persentase jaringan irigasi kondisi baik

Tabel 3.34 Data Kondisi Jaringan Irigasi

No.	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan	Panjang Saluran (m')	Kondisi Baik (%)	
				Tahun 2022	Tahun 2023
1	Sandik	Batulayar, Gunungsari	4.290	74,36	75.24
2	Medas	Gunungsari	4.792	70,70	72.29
3	Ireng Daya	Gunungsari	3.334	81,01	81.01
4	Gegutu	Gunungsari	3.388	60,06	60.06
5	Penimbung	Gunungsari, Lingsar	7.901	85,90	85.90
6	Menjeli	Lingsar	3.623	57,11	57.11
7	Repok Pancor	Lingsar	4.788	38,58	38.58
8	Mencongah	Lingsar	2.949	78,94	78.94
9	Nyur Baye	Lingsar	10.875	82,99	82.99
10	Montang	Lingsar	4.221	38,05	38.05
11	Keru	Narmada	6.670	81,47	83.58
12	Buntopeng	Kuripan	7.100	50,21	50.21
13	Pesongoran Kuripan	Kuripan	6.972	70,08	70.08
14	Pelangan	Sekotong	8.514	60,01	60.01
15	Embung Kengkang	Sekotong	3.501	30,99	30.99
16	Embung Telekong I, II	Lembar	1.200	36,00	36.00
17	Embung Tibu Kuning	Sekotong	4.250	31,36	31.36
18	Embung Telaga Lebur	Sekotong	1.850	60,49	60.49
19	Embung Bantir I, II	Gerung	1.100	40,36	40.36
20	Embung Aik Mual	Lembar	2.100	30,00	30.00
Jumlah			93.418	63,17	63,44

Faktor keberhasilan

- a. Melakukan penanganan saluran irigasi antara lain dengan pengamanan sungai
- b. Melakukan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Membentuk pola penanganan perbaikan kondisi irigasi dalam satu kesatuan sistem yang nantinya dapat mengoptimalkan kondisi keteknisan prasarana irigasi untuk pelayanan air yang memerlukan identifikasi kondisi dan fungsi jaringan dalam pelayanan air irigasi lebih lanjut.
- b. Pembentukan pola pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi, drainase, sungai, embung dan pantai dengan pembangunan prasarana

pengendalian daya rusak air sesuai kondisi prasarana terkait dengan koordinasi batas kewenangan

- c. Keberhasilan capaian sasaran ini juga dapat berjalan optimal sebagai wujud dari pelibatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ada pada setiap Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan melakukan pembinaan secara berkala.

- **Nilai Realisasi investasi**

Tabel 3.35 Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Nilai Realisasi Investasi	Penanaman Modal Asing (PMA)	153,88	31,67	20,58
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	713,57	597,49	83,73

Faktor Kegagalan

- a. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
- b. Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan
- c. Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan
- d. Banyak perusahaan PMA dan PMDN yang sudah memiliki NIB namun tidak merealisasikan kegiatan investasinya sehingga tidak didapatkan data realisasi investasi dengan beberapa alasan baik internal maupun eksternal.(contoh konflik internal perusahaan dan konflik pertanahan/lahan)
- e. Rangkaian proses birokrasi perizinan berusaha di Lombok Barat relatif masih panjang sehingga minat berinvestasi juga masih rendah.
- f. Untuk PMA sudah bukan merupakan kewenangan daerah/Kabupaten melainkan diambil alih oleh Kementerian Investasi berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pengaduan dan konsultasi agar setiap layanan pengaduan dan konsultasi dapat terlayani dan mendapat tindak lanjut yang tepat
- b. DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat berupaya untuk mengikutsertakan aparatur yang menangani pelayanan dalam bimbingan dan pelatihan teknis tentang pelayanan perizinan bidang penanaman modal.
- c. DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat berupaya mengembangkan pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan pelayanan

bergerak guna menjangkau pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lombok Barat

- d. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala, serta mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan dan berdiskusi untuk mengupayakan solusi dalam menghadapi tantangan.
- e. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
- f. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
- g. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
- h. Tersedianya Help Desk
- i. Implementasi perizinan secara online dengan Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK)
- j. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan non perizinan

7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	13,07	13,67	95,41
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	3,12	96,00

Angka Kemiskinan

Tabel 3.37 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Angka Kemiskinan	1. Jumlah Desa mandiri (DPMPD)	12	17	141,67
	2. Persentase Cakupan perekaman KTP-el (Dinas Dukcapil)	98	99,40	101,43
	3. Persentase cakupan penerbitan akte kelahiran 0-18 (Dinas Dukcapil)	96	97,50	101,56

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
	4. Persentase penerbitan akta kematian (Dinas Dukcapil)	100	100	100
	5. Persentase kepemilikan KK (Dinas Dukcapil)	100	100	100
	6. Skor pola pangan harapan (Dikpangan)	87,5	93,2	106,51
	7. Persentase PMKS/PPKS yang tertangani (Dinsos)	84	79,2	94,29
	8. Persentase PSKS yang diberdayakan/dikembangkan (Dinsos)	63	69,13	109,7

1. Jumlah Desa mandiri**Faktor Keberhasilan**

- Menata desa dari semua aspek serta mengidentifikasi peluang serta memfasilitasi terbentuknya kerja sama antara desa dengan berbagai pihak.
- mengoptimalkan penyusunan APBDes agar disesuaikan dengan kebutuhan sarana prasarana desa dan memfasilitasi penyusunan peraturan desa mengenai kewenangan desa.
- Potensi kerja sama yang ada maupun yang diamanatkan secara nasional difasilitasi bersinergi dengan bidang lain di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.
- Melakukan perjanjian kerja sama dengan kejaksan, pembentukan
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- Meningkatkan kapasitas pelaku administrasi desa, meningkatkan kualitas administrasi serta menata regulasi di desa.
- Memfasilitasi penataan, penyediaan sarana serta peningkatan kapasitas pengurus lembaga di desa.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Melaksanakan koordinasi secara berkala
- Memanfaatkan waktu secara efektif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
- Melaksanakan koordinasi SDM secara tepat karena akibat pensiun dan promosi mutasi, ada dua posisi Penggerak Swadaya Masyarakat yang kosong
- Efisiensi anggaran sesuai dengan kondisi fiskal daerah

- e. Meningkatkan komunikasi internal maupun eksternal dengan pengampu kepentingan lainnya

2. Persentase Cakupan perekaman KTP-el

Faktor Keberhasilan

- a. Meningkatnya Pelayanan Perekaman KTP baik yang ada di Sekolah-Sekolah maupun yang ada di Desa Se Kabupaten Lombok Barat.
- b. Adanya kesadaran bagi penduduk untuk datang melakukan perekaman baik itu di Kantor Dukcapil, Kantor Camat maupun di Kantor UPT di 3 Wilayah Se Kabupaten Lombok Barat.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Lebih meningkatkan pelayanan Adminduk baik yang ada di Dinas maupun kantor-kantor UPT di 3 Wilayah se Kabupaten Lombok Barat
- b. Memperbanyak lagi pelayanan jemput bola baik ke Sekolah – sekolah swasta/negeri maupun ke Desa-desa se Kabupaten Lombok Barat.
- c. Meningkatkan lagi ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan di bidang Adminduk
- d. Meningkatkan lagi kegiatan bimbingan – bimbingan teknis kepada seluruh jajaran Dinas Dukcapil.
- e. Dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stekholder terkait, dalam hal ini dengan instansi/Organisasi Perangkat Daerah, RS, Puskesmas maupun dengan Desa-desa Se Kabupaten Lombok Barat. Sampai dengan akhir 2023, jumlah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebanyak 114 PKS.
- f. Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan terus dilakukan baik itu melalui tatap muka, media cetak/elektronik, maupun dengan baliho/spanduk serta media sosial yang ada.
- g. Melakukan segala bentuk perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu bidang administrasi kependudukan dan administrasi umum lainnya.

3. Persentase cakupan penerbitan akte kelahiran 0-18

Faktor Keberhasilan

- a. Percepatan layanan dengan jemput bola dan pelayanan keliling desa dan di sekolah – sekolah.
- b. Pendekatan layanan dengan penerbitan dokumen kependudukan di kecamatan/UPT bahkan masyarakat dapat memilih pelayanan di

kecamatan maupun desa-desa melalui Kios Adminduk Desa (kerjasama Desa dengan Dukcapil Lombok Barat.

- c. Pendekatan sekaligus percepatan layanan dengan pelayanan paket 3 in 1 (Akte Kelahiran KK, KIA) bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, RS yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Lebih meningkatkan pelayanan Adminduk baik yang ada di Dinas maupun kantor – kantor UPT di 3 Wilayah se Kabupaten Lombok Barat
- b. Meningkatkan lagi ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan di bidang Adminduk
- c. Meningkatkan lagi kegiatan bimbingan – bimbingan teknis kepada seluruh jajaran Dinas Dukcapil.
- d. Dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stekholder terkait, dalam hal ini dengan instansi/Organisasi Perangkat Daerah, RS, Puskesmas maupun dengan Desa-desa Se Kabupaten Lombok Barat. Sampai dengan akhir 2023, jumlah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebanyak 114 PKS.
- e. Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan terus dilakukan baik itu melalui tatap muka, media cetak/elektronik, maupun dengan baliho/spanduk serta media sosial yang ada.
- f. Meningkatkan lagi inovasi – inovasi pelayanan baik itu di bidang Administrasi kependudukan maupun bidang administrasi lainnya.
- g. Melakukan segala bentuk perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu bidang administrasi kependudukan dan administrasi umum lainnya.

4. Persentase penerbitan akta kematian

Faktor keberhasilan

- a. Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kematian yang dilaporkan dikali 100%, berarti semua pelaporan kematian yang dilaporkan masyarakat baik itu yang ada di UPT maupun yang ada di Dinas telah diterbitkan kutipan kematiannya langsung.
- b. Adanya Kesadaran dari pihak keluarga untuk melaporkan kematian dari keluarganya

- c. Adanya pelayanan di masing – masing UPT sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan adminduk yang lebih dekat tanpa harus datang ke Dinas Dukcapil.
- d. Masyarakat dapat memilih pelayanan di kecamatan maupun desa-desa melalui Kios Adminduk Desa (kerjasama Desa dengan Dukcapil Lombok Barat).

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Lebih meningkatkan pelayanan Adminduk baik yang ada di Dinas maupun kantor – kantor UPT di 3 Wilayah se Kabupaten Lombok Barat
- b. Meningkatkan lagi ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan di bidang Adminduk
- c. Meningkatkan lagi kegiatan bimbingan – bimbingan teknis kepada seluruh jajaran Dinas Dukcapil.
- d. Dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stekholder terkait, dalam hal ini dengan instansi/Organisasi Perangkat Daerah, RS, Puskesmas maupun dengan Desa-desa Se Kabupaten Lombok Barat. Sampai dengan akhir 2023, jumlah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebanyak 114 PKS.
- e. Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan terus dilakukan baik itu melalui tatap muka, media cetak/elektronik, maupun dengan baliho/spanduk serta media sosial yang ada.
- f. Meningkatkan lagi inovasi – inovasi pelayanan baik itu di bidang Administrasi kependudukan maupun bidang administrasi lainnya.
- g. Melakukan segala bentuk perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu bidang administrasi kependudukan dan administrasi umum lainnya

5. Persentase kepemilikan KK

Faktor Keberhasilan

- a. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus kartu keluarga itu sendiri dan pentingnya dokumen administrasi kependudukan bagi kehidupan sehari-hari.
- b. Adanya Kantor UPT Dukcapil di tiga wilayah se Kabupaten Lombok Barat yang memudahkan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dengan Kantor Dukcapil bisa mengurus keperluan Adminduknya di Kantor UPT sesuai dengan wilayah masing-masing

- c. Adanya pelayanan AIO yaitu all in one atau pelayanan satu pintu untuk semua jenis layanan administrasi kependudukan.
- d. Pelayanan Jemput Bola Ke Desa – desa Se Kabupaten Lombok Barat
- e. Pelayanan 3 in 1 yaitu Pelayanan Akta, KK dan KIA
- f. Pelayanan 2 in 1 yaitu Akta Perkawinan (non muslim) plus KK

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Lebih meningkatkan pelayanan Adminduk baik yang ada di Dinas maupun kantor UPT di 3 Wilayah se Kabupaten Lombok Barat
- b. Memperbanyak lagi pelayanan jemput bola baik ke Sekolah swasta/negeri maupun ke Desa se Kabupaten Lombok Barat.
- c. Meningkatkan lagi ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan di bidang Adminduk
- d. Meningkatkan lagi kegiatan bimbingan-bimbingan teknis kepada seluruh jajaran Dinas Dukcapil.
- e. Dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stekholder terkait, dalam hal ini dengan instansi/Organisasi Perangkat Daerah, RS, Puskesmas maupun dengan Desa-desa Se Kabupaten Lombok Barat. Sampai dengan akhir 2023, jumlah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebanyak 114 PKS.
- f. Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan terus dilakukan baik itu melalui tatap muka, media cetak/elektronik, maupun dengan baliho/spanduk serta media sosial yang ada.
- g. Meningkatkan lagi inovasi – inovasi pelayanan baik itu di bidang Administrasi kependudukan maupun bidang administrasi lainnya.
- h. Melakukan segala bentuk perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu bidang administrasi kependudukan dan administrasi umum lainnya

6. Skor pola pangan harapan

Faktor Keberhasilan

- a. Menurunnya daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3
- b. Skor PPH Dinas Ketahanan Pangan yang terus meningkat setiap tahunnya (93,2 poin) tahun 2023
- c. Tersusunnya peta FSVA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat
- d. Tersusunnya neraca bahan makanan
- e. Tersedianya cadangan pangan pemerintah pada tahun 2023 sebanyak 2,5 ton

- f. Teregistrasinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
- g. Tersosialisasinya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
- h. Menekan laju inflasi
- i. Tersedianya stabilitasi dan pasokan harga pangan

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Menurunkan daerah rentan rawan pangan
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola konsumsi B2SA sehingga dapat memenuhi gizi keluarga
- c. Meningkatkan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah
- d. Melaksanakan pemantauan harga pangan pokok secara reguler dan kontinyu sehingga dapat menekan inflasi dan stabilisasi harga pangan pokok terjaga
- e. Melaksanakan pengujian terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang banyak dikonsumsi masyarakat agar bebas dari kandungan bahan-bahan berbahaya.

7. Persentase PMKS/PPKS yang tertangani

Capaian untuk indicator ini adalah 79,2 dari target 84 atau sebesar 94,29%. Capaian ini tidak memenuhi target, karena beberapa hal yang menjadi factor penghambat pencapaian kinerja.

Faktor Kegagalan

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang dibagi masih sangat terbatas.
- b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS/PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
- c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
- d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS/PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
- e. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Memberikan bantuan berupa memfasilitasi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dasar seperti pemberian alat bantu kesehatan (kursi roda)
- b. memberikan bantuan makanan untuk korban bencana alam, bantuan air bersih untuk wilayah yang mengalami kekurangan air.

8. Persentase PSKS yang diberdayakan/ dikembangkan**Faktor Keberhasilan**

- Peningkatan pemberdayaan PSKS dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial.
- Pengembangan sarana dan prasarana
- Penguatan sinergitas dalam penanganan masalah PMKS/PPKS.
- Adanya dukungan anggaran yang diberikan oleh daerah untuk memberdayakan/mengembangkan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Lombok Barat.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Memberikan bantuan berupa bantuan barang sebagai modal usaha
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada PSKS.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Persentase wirausaha muda yang aktif (Dispora)	45	65	144,44
	2. Persentase transmigran yang diberangkatkan (Disnasker)	28	0	0
	3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (Disnasker)	75,43	76,21	101,03

1. Persentase wirausaha muda yang aktif**Faktor Keberhasilan**

- Mengembangkan kembali kegiatan pelatihan kader kepemimpinan dan kepeloporan.
- Mengadakan Sosialisasi pembinaan dan evaluasi terhadap organisasi kepemudaan.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Memperbaiki data – data bidang Kepemudaaan dan Keolahragaan terutama yang menunjang Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Wirausaha Muda yang aktif, Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dan Persentase Prestasi Cabor unggulan.
- Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat terkait dengan Pembinaan Wirausahawan Muda Pemula.
- Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Kesbangpol terkait dengan Organisasi Kepemudaan.

- d. Berkoordinasi dengan lembaga – lembaga keolahragaan terkait yang berhubungan dengan Kepemudaan dan Keolahragaan seperti dengan KNPI dan KONI.

2. Persentase transmigran yang diberangkatkan

Faktor Kegagalan

Tahun 2023 realisasi transmigran yang diberangkatkan adalah 0, artinya tidak ada pemberangkatan yang dilakukan. Sama seperti tahun sebelum-sebelumnya juga tidak ada kegiatan pemberangkatan transmigran karena tidak adanya jatah pengiriman transmigran baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi NTB untuk Lombok Barat.

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Faktor Keberhasilan

- Keterbukaan lapangan pekerjaan sehingga dapat mencukupi target terpenuhinya penduduk angkatan kerja.
- Peningkatan kegiatan pelatihan terhadap lowongan pekerjaan yang ada, sehingga menambah jumlah tenaga terlatih

Upaya Peningkatan Kinerja

- Menurunkan pengangguran melalui pengembangan UMKM/ Ekonomi Kreatif, Pelatihan berbasis masyarakat, dan peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
- Kerjasama dengan berbagai bidang industri baik di skala regional nasional maupun internasional hingga upaya membuka lowongan pekerjaan dan pelatihan kewirausahaan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelatihan tenaga kerja dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	67,68	71,94	106,29

Usia Harapan Hidup (UHH)

Tabel 3.40 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Usia Harapan Hidup (UHH)	1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) (Dinas Kesehatan)	0,4	0,54	135,00

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
	2. Persentase Sarana Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Industri Rumah Tangga yang memiliki Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	95	100	105,26
	3. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar dan Kompetensi (Dinas Kesehatan)	100	100	100
	4. Prevalensi Stunting (Dinas Kesehatan)	17	12,38	127,18
	5. Angka Kematian Bayi (AKB) (Dinas Kesehatan)	2,7	7,83	-90,05
	6. Angka Kematian Ibu (AKI) (Dinas Kesehatan)	64,1	127,86	0,53

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) (Dinas Kesehatan)

Faktor keberhasilan

- Mengintegrasikan laporan kegiatan dari setiap pemegang program dengan aplikasi PIS PK.
- Mengoptimalkan peran koordinator program di Puskesmas untuk mengentrikan hasil kegiatan program (intervensi perubahan) yang sudah dilakukan.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Melakukan pendampingan ke Puskesmas untuk memandu dan memotivasi Tim Puskesmas agar mengentri setiap kegiatan intervensi yg sudah dilakukan kedalam aplikasi PIS PK.
- Melakukan evaluasi terhadap beberapa indikator PISPK yang menyebabkan rendahnya pencapaian IKS Kabupaten Lombok Barat.
- Memonitoring entrian PIS PK di Puskesmas secara berkala

2. Persentase Sarana Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Industri Rumah Tangga yang memiliki Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Sesuai Standar.

Faktor keberhasilan

- a. Dukungan pendanaan dari BOK POM yang dapat menjangkau lebih banyak industri rumah tangga.
- b. Meningkatnya peran lintas sektor dalam meningkatkan pertumbuhan industri rumah tangga.

Upaya Peningkatan Kinerja

Meningkatnya peran lintas sektor dalam meningkatkan pertumbuhan industri rumah tangga.

3. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar dan Kompetensi.

Faktor keberhasilan

- a. Penerapan pola PPK BLUD di unit pelayanan, sehingga unit pelayanan dapat membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan menambah tenaga.
- b. Dukungan pendanaan dari sumber dana BOK Puskesmas untuk pengangkatan tenaga kontrak di Puskesmas
- c. Upaya mengalihkan status tenaga kontrak yang ada di rumah sakit dan Puskesmas menjadi tenaga PPPK.

Upaya Peningkatan Kinerja

- c. Mengutamakan jenis ketenagaan yang paling dibutuhkan untuk diusulkan melalui dana BOK Puskesmas.
- d. Pemerintah Daerah sebaiknya mengambil tanggungjawab dalam masalah penggajian tenaga khusus dokter yang ada di Puskesmas, sehingga beban fiskal Puskesmas untuk menggaji tenaga kontrak dokter dapat berkurang

4. Prevalensi Stunting

Faktor Keberhasilan

- a. Melengkapi peralatan *Antropometer* di Posyandu
- b. Melakukan Kalibrasi peralatan posyandu sehingga pengukuran status gizi lebih akurat.
- c. Menyediakan PMT Lokal untuk balita Kurang Gizi selama 90 hari makan
- d. Peberdayaan CSR dari pengusaha yang berada di Kabupaten Lombok Barat untuk membantu dalam penyediaan sumber makanan tinggi protein (protein hewani) kepada lokus yang sudah ditentukan Dinas Kesehatan

Upaya Peningkatan Kinerja

Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan Telurnisasi atau pengumpulan telur oleh pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan diserahkan kepada Puskesmas Binaan yaitu Puskesmas Perampuan dan Penimbung untuk diberikan kepada Balita Kurang Gizi selama 90 hari makan anak

5. Angka Kematian Ibu (AKI)

Berdasarkan laporan dari Puskesmas, jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat selama Tahun 2023 adalah 16 kasus. Sebagian besar kasus kematian ibu melahirkan pada Tahun 2023 disebabkan Hipertensi sebanyak 31.25 %, Penyakit lain 25%, Pendarahan 18.75%, Jantung 18.75% dan covid sebanyak 6.25%.

Faktor Kegagalan

- Banyak terjadi kematian ibu yang disebabkan oleh pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan serta emboli pada ibu melahirkan
- Masih kurangnya peralatan kegawatdaruratan maternal neonatal yang dimiliki oleh Puskesmas

Upaya Peningkatan Kinerja

- Melakukan pendekatan dan peningkatan pengetahuan dengan dilaksanakannya Kelas ibu Hamil, disamping itu melibatkan keluarga terdekat ibu hamil dalam memotivasi pemeriksaan kesehatan saat hamil.
- Melengkapi kebutuhan Puskesmas untuk alat kesehatan maternal dan neonatal.

6. Angka Kematian Bayi (AKB)

Apabila AKI meningkat di suatu daerah, biasanya juga diikuti oleh meningkatnya AKB. Angka Kematian Bayi tahun 2023 terjadi peningkatan kasus kematian. Oleh sebab itu untuk masalah faktor kegagalan tercapainya indikator AKB sama dengan faktor kegagalan tercapainya indikator AKI demikian pula untuk solusi yang diberikan. Di Kabupaten Lombok Barat sendiri telah dikembangkan Sistim Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (Si Peka Bu Siska) dimana keluarga sudah dapat mengidentifikasi masalah kesehatan dari umur sejak dini hanya dengan menggunakan form yang disediakan oleh Puskesmas.

9. Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	7,00	6,87	98,14
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	13,98	98,11

Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)

Tabel 3.42 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	1. Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 7-18 tahun (Dikbud)	100	11,63	11,63
	2. Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 25 tahun ke atas (Dikbud)	100	2,36	2,36

1. Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 7-18 tahun**Faktor kegagalan**

Persentase capaian untuk Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 7-18 tahun adalah 11,63%. Angka ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Adapun yang menjadi factor penghambat pencapaian target kinerja adalah belum optimalnya sosialisasi terkait pendidikan kesetaraan bagi Masyarakat Lombok Barat yang putus sekolah.

2. Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 25 tahun ke atas**Faktor kegagalan**

Persentase capaian Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 25 tahun ke atas adalah 2,36%. Adapun yang menjadi factor kegagalan dari pencapaian target ini adalah kurangnya minat Masyarakat yang putus sekolah baik pada usia sekolah maupun usia 25 tahun keatas untuk menyelesaikan pendidikannya yang secara umum. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dimana masyarakat yang tidak bersekolah tersebut lebih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga

Upaya Peningkatan Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)

- Meningkatkan akses layanan Pendidikan Kesetaraan melalui peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan serta pemberian biaya operasional peserta didik Pendidikan Kesetaraan segala rentang usia.
- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 3.43 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Dikbud)	1	1	100

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
	2. Jumlah guru kualifikasi S1/DIV(Dikbud)	84	87	103,57
	3. Angka lulusan SMP (Dikbud)	100	100	100
	4. Angka lulusan SD (Dikbud)	100	100	100
	5. Angka putus sekolah SMP (Dikbud)	0,16	0,10	160
	6. Angka putus sekolah SD (Dikbud)	0,025	0,036	69,44
	7. Angka partisipasi kasar TK/PAUD(Dikbud)	86	64,53	75,03
	8. Angka partisipasi kasar SD/MI (Dikbud)	100	104,95	104,95
	9. Angka partisipasi kasar SMP/MTs (Dikbud)	100	109,76	109,76
	10. Angka partisipasi murni SD/MI (Dikbud)	100	96,59	96,59
	11. Angka partisipasi murni SMP/MTs (Dikbud)	97	80,16	82,64

1. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah bahwa perumusan target indikator telah disesuaikan dengan kondisi riil cagar budaya yang telah ditetapkan secara nasional serta kemampuan keuangan daerah.

Target indikator Persentase Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan adalah 1 situs, sedangkan realisasinya adalah 1 situs. Persentase dari capaian indikator ini adalah sebesar 100%.

2. Jumlah guru kualifikasi S1/DIV

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah bahwa dengan meningkatnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S1/DIV secara swadaya sekaligus meningkatkan kompetensi individu masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Angka lulusan SMP

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah bahwa dengan berubah sistem penilaian akhir bagi peserta didik dengan dihapusnya Ujian Nasional yang digantikan menjadi Asessment Nasional dimana penilaian terhadap siswa tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses dan

hasil. Asessment Nasional juga dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. AKM juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi.

4. Angka lulusan SD

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah bahwa dengan berubah sistem penilaian akhir bagi peserta didik dengan dihapusnya Ujian Nasional yang digantikan menjadi Asessment Nasional dimana penilaian terhadap siswa tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses dan hasil. Asessment Nasional juga dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. AKM juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi.

5. Angka putus sekolah SMP

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan. Pada lingkungan perkotaan angka putus sekolah dipicu oleh tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya angka putus sekolah, upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mendekatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (SMP Terbuka).

6. Angka putus sekolah SD

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya pendidikan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar bagi penduduk usia 7-15 tahun, serta pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Dasar sehingga seluruh Masyarakat mendapatkan layanan sekolah gratis.

7. Angka partisipasi kasar TK/PAUD

Faktor Kegagalan

Masih kurangnya kesadaran orangtua tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan masa Golden Age (Masa

Keemasan) pada perkembangan otak anak yaitu pada usia 3-6 tahun. Sehingga sangat penting menstimulasi otak anak dengan pendidikan anak usia dini.

8. Angka partisipasi kasar SD/MI

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang Sekolah Dasar serta peningkatan pengelolaan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar.

9. Angka partisipasi kasar SMP/MTs

Faktor Keberhasilan

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama serta peningkatan pengelolaan satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama

10. Angka partisipasi murni SD/MI

Faktor Kegagalan

- a. Semakin banyaknya orangtua yang menyekolahkan anaknya di luar wilayah Kabupaten Lombok Barat khususnya pada wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah sehingga mempengaruhi perhitungan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD
- b. Masih ada anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah.
- c. Belum tersedianya data yang valid terkait anak yang DO dan tidak pernah bersekolah sehingga menyulitkan Langkah pengambilan kebijakan strategis dalam penuntasannya

11. Angka partisipasi murni SMP/MTs

Faktor Kegagalan

- a. Semakin banyaknya orangtua yang menyekolahkan anaknya di luar wilayah Kabupaten Lombok Barat khususnya pada wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah sehingga mempengaruhi perhitungan Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP.
- b. Masih ada anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah.
- c. Belum tersedianya data yang valid terkait anak yang DO dan tidak pernah bersekolah sehingga menyulitkan Langkah pengambilan kebijakan strategis dalam penuntasannya

Upaya Peningkatan Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)

- a. Meningkatkan akses layanan Pendidikan Kesetaraan melalui peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan serta

- memberian biaya operasional peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
 - d. Perbaikan pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebagai upaya untuk meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah melalui program inovasi “SELARAS”. Perbaikan pengelolaan ini meliputi sebagai berikut:
 - perbaikan sistem pendataan warga putus sekolah khususnya yang berusia 25 tahun keatas bekerja sama dengan OPD terkait seperti BPMD, DUKCAPIL dan BPS.
 - Penguatan kelembagaan bagi PKBM sebagai pelaksana program SELARASA
 - Peningkatan kapasitas operator DAPODIK untuk PKBM
 - Peningkatan sarana dan prasarana satuan pendidikan Non Formal
 - Dukungan biaya operasional bagi lembaga yang melaksanakan program kesetaraan untuk usia 25 tahun keatas.
 - e. Optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk jenjang SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
 - f. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS).
 - g. Penguatan sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bagi seluruh satuan pendidikan melalui bimbingan teknis maupun pendampingan bagi seluruh operator DAPODIK lingkup Kabupaten Lombok Barat. Penguatan sistem DAPODIK ini dipandang sangat perlu dilakukan karenan DAPODIK saat ini adalah merupakan satu-satunya sistem pendataan pendidikan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi untuk melihat kondisi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan DAPODIK yang diinput oleh masing-masing sekolah. Selain itu, DAPODIK juga digunakan dasar sebagai penentuan penganggaran oleh pusat.
 - h. Penguatan sistem perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat melalui peningkatan kapasitas seluruh pejabat di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat terkait perencanaan di Bidang Pendidikan. Hal ini dipandang perlu dikarenakan pergantian/mutasi pejabat di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat sehingga

penyatuan pemahaman terhadap dokumen-dokumen perencanaan sangat diperlukan.

- i. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

10. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	7,00	6,87	98,14
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	14,25	13,98	98,11

Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel 3.45 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
- Kabupaten Layak Anak (KLA) - Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Persentase angka kelahiran total (DP2KBP3A)	2,31	2,33	100,87
	2. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak (DP2KBP3A)	100	100	100
	3. Kabupaten layak anak (DP2KBP3A)	810	748	92,35
	4. Indeks pembangunan gender (DP2KBP3A)	90,28	90,41	100,41

1. Persentase angka kelahiran total

Faktor Keberhasilan

- a. Adanya penggerakan dan pelayanan KB, baik MKJP (IUD, Implan) maupun non MKJP (Suntik, Pil dan Kondom) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) selaku calon akseptor sesuai dengan kebutuhan reproduksinya
- b. Adanya promosi tentang nilai “dua anak lebih sehat” kepada masyarakat melalui berbagai media
- c. Promosi pendewasaan usia kawin pertama perempuan Pengembangan model Kampung Keluarga Berkualitas sebagai tindak lanjut dari Kampung Keluarga Berencana
- d. Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
- e. Adanya aplikasi elsimil dengan mengintegrasikan indikator pengukuran ibu hamil dan pascapersalinan

- f. Pemahaman dan pengetahuan tentang program bangga kencana kepada pemerintah daerah dan masyarakat
- g. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap Program Bangga Kencana
- h. Integrasi lintas sektor di kampung keluarga berkualitas melalui Penetapan Instruksi Presiden tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas
- i. Adanya data parameter program bangga kencana yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
- j. Kerjasama pelayanan Keluarga Berencana bersama Mitra Kerja pada kegiatan momentum, antara lain : Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Pelayanan KB dalam rangka Hari Kartini, Hari Kontrasepsi Sedunia, dan Hari Vasektomi Sedunia

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan akses pelayanan KB di wilayah-wilayah dengan unmet need tinggi
- b. Optimalisasi peran tenaga lini lapangan dalam pemberian KIE KB yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk ber-KB
- c. Meningkatkan akses informasi untuk menghilangkan persepsi masyarakat yang salah tentang penggunaan kontrasepsi, sehingga masyarakat tidak takut dalam menggunakan kontrasepsi
- d. Meningkatkan cakupan KB pascapersalinan melalui promosi dan konseling serta pendampingan ibu hamil dan pascapersalinan oleh bidan, kader, dan PKK
- e. Meningkatkan promosi pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan berkeluarga bagi remaja
- f. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Agama dalam Penguatan pendampingan bagi remaja, calon pengantin dan keluarga muda dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting, diharapkan dapat mengungkit capaian TFR
- g. Memperluas informasi akses fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melayani KB dan jenis-jenis alat kontrasepsi beserta efek sampingnya
- h. Memaksimalkan pemanfaatan hasil pendataan keluarga desa yang memiliki angka unmet need tinggi untuk intervensi sasaran penggarapan unmet need
- i. Penguatan tenaga lini lapangan termasuk kader KB agar dapat melaksanakan tugas fungsi PKB sebagai pengelola Program Bangga Kencana yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat

- j. Melakukan pelayanan KB dengan memanfaatkan seluruh kegiatan momentum nasional bekerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja terkait
- k. Memberdayakan kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS) dalam melakukan pembinaan kesertaan ber-KB
- l. Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi bagi pengelola program KB
- m. Meningkatkan peran tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting untuk melakukan pendampingan dan pemberian promosi dan konseling KB Pascapersalinan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan
- n. Penyusunan dan pemanfaatan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan daerah
- o. Internalisasi program pembangunan berwawasan kependudukan melalui pemanfaatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) pada program pembangunan daerah
- p. Meningkatkan akses pelayanan KB di wilayah-wilayah dengan unmet need tinggi;
- q. Optimalisasi peran tenaga lini lapangan dalam pemberian KIE KB yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk ber-KB
- r. Meningkatkan akses informasi untuk menghilangkan persepsi masyarakat yang salah tentang penggunaan kontrasepsi, sehingga masyarakat tidak takut dalam menggunakan kontrasepsi
- s. Meningkatkan cakupan KB pascapersalinan melalui promosi dan konseling serta pendampingan ibu hamil dan pascapersalinan oleh bidan, kader, dan PKK
- t. Meningkatkan promosi pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan berkeluarga bagi remaja
- u. Peningkatan pemanfaatan aplikasi elsimil untuk skrining kesiapan menikah bagi catin/calon PUS, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menunda perkawinan remaja
- v. Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap Program Bangga Kencana dengan mengoptimalkan Peran Pokja Bangga Kencana
- w. Integrasi lintas sektor di kampung keluarga berkualitas melalui Penetapan Instruksi Presiden tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas
- x. Mendorong stakeholders dalam memanfaatkan data parameter program bangga kencana sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

2. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak**Faktor Keberhasilan**

- a. Tersedianya pusat-pusat layanan pengaduan untuk perlindungan anak dan perempuan
- b. Regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan
- c. Keterlibatan stakeholder dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan
- d. Adanya inovasi perangkat daerah yaitu Pokja ABH dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Melakukan fasilitasi pembentukan perdes perlindungan perempuan dan anak
- b. Sosialisasi Perlindungan Anak
- c. Melakukan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO dan Kasus Nikah dibawah umur
- d. Melakukan Fasilitasi Pembentukan Satuan Tugas pencegahan KTP/A/TPPO di desa
- e. Koordinasi unit layanan lintas sektor
- f. Penambahan tenaga layanan dan peningkatan kapasitas tenaga layanan
- g. Peningkatan Sarana prasarana pendukung
- h. Mendorong tersedianya program pemberdayaan bagi korban dan keluarga untuk mendukung reintegrasi sosial korban
- i. Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO termasuk sosialisasi tempat pengaduan kasus

3. Kabupaten layak anak (KLA)**Faktor kegagalan**

- a. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya dan politik
- b. Masih kurangnya perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)
- c. Masih rendahnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang anak
- d. Masih rendahnya kerjasama (MoU) dengan dunia usaha
- e. Implementasi peraturan Bupati yang ada belum maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak
- f. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bertujuan untuk memberikan layanan konseling dan rujukan dan di lengkapi dengan sarana prasarana serta tenaga ahli dalam hal ini konselor dan psikolog belum ada.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan konsolidasi dengan Gugus Tugas KLA terhadap beberapa indikator penilaian KLA yang belum tercapai
- b. Mendorong peran serta stakeholder terkait dalam penilaian/evaluasi KLA
- c. Meningkatkan pemenuhan dalam bidang Pendidikan, Kegiatan Budaya serta waktu luang untuk anak
- d. Meningkatkan perlindungan khusus bagi anak terutama anak yang mengalami masalah
- e. Inisiasi pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang bertujuan untuk membawa pembangunan PPPA
- f. Penguatan koordinasi, sinergitas program/kegiatan antara pemerintah daerah dan stakeholders lainnya
- g. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak
- h. Mendorong pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Kabupaten Layak Anak

4. Indeks pembangunan gender (IPG)**Faktor Keberhasilan**

- a. Meningkatnya kelembagaan KLA yaitu adanya gugus tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, Profil anak dan Publikasi terkait KLA
- b. Semakin banyak tersedia kebijakan/Peraturan Daerah tentang KLA
- c. Adanya keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa;
- d. Meningkatnya informasi informasi layak anak
- e. Meningkatnya partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pembangunan mulai dari level desa/kelurahan hingga nasional serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berorganisasi
- f. Meningkatnya pemenuhan atas kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak seperti adanya regulasi pencegahan perkawinan anak, layanan Puspaga, pembentukan satuan pendidikan ramah anak

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang rentan terhadap layanan yang dibutuhkan
- b. Menekan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak dan Perlindungan Anak (PUHA), perkawinan diusia anak merupakan

permasalahan yang masih sering muncul ditengah masyarakat Kabupaten Lombok Barat

- c. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik
- d. Melakukan pelatihan PPRG kepada seluruh perangkat daerah
- e. Penguatan koordinasi, sinergitas program/kegiatan antara pemerintah daerah dan stakeholders lainnya.

11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	88,12	91,69	104,05
	Indeks Kualitas Air Sungai	42,50	48,95	115,18
	Indeks Kualitas Lahan	46,25	49,17	106,31

1. Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan. Kebutuhan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang kemudian berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten dihitung setelah diperoleh data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran ini dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa parameter yang digunakan dalam perhitungan IKU yang umumnya terdiri dari lima pencemar utama, diantaranya bahan permukaan, oksidan/ozon di permukaan, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun untuk IKLH 2023, perhitungan hanya dilakukan untuk dua parameter saja yang umumnya berasal dari kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Kedua parameter tersebut adalah NO₂ yang mewakili emisi kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ yang mewakili emisi dari industri dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar lainnya yang mengandung sulfur.

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Lombok Barat dilakukan di empat lokasi yang mewakili daerah permukiman, perkantoran, industri dan padat lalu lintas. Pemantauan ini dilakukan dengan metode passive sampler pada dua tahap pengambilan. Indeks kualitas udara pencapaiannya di atas

target Renstra dimana target yang ingin dicapai 88,12 tercapai 91,69 dengan kategori pencapaian dikategorikan Sangat Baik.

Faktor Keberhasilan

- a. Melakukan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi pencemaran udara.
- b. Terpenuhinya SDM Laboratorium untuk operasional uji kualitas udara

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Mengusulkan Pengadaan peralatan uji kualitas udara supaya Kabupaten Lombok Barat bisa melakukan pengukuran sendiri terhadap kualitas udara di Lombok Barat.
- b. Meningkatkan Pelatihan SDM Laboratorium untuk operasional uji kualitas udara
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi pencemaran udara.

2. Indeks Kualitas Air Sungai

Perhitungan kualitas air sungai untuk parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS di sungai-sungai di Lombok Barat, dihitung berdasarkan baku mutu air. Dimana baku mutu air dipakai standar dalam menentukan air tersebut tercemar atau tidak. Melalui penghitungan ini, diharapkan kualitas sungai di Lombok Barat dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan standar baku mutu (parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS) pada sungai yang dipantau. Untuk pemeriksaan kualitas air sungai dilakukan pemeriksaan kualitas Fisika dan Kualitas Kimia. Untuk kualitas fisika di ukur 4 parameter yaitu parameter temperatur, DHL, kekeruhan dan residu terlarut. Untuk kualitas kimia diukur 6 parameter yaitu parameter Ph, DO, COD, BOD, Fe, dan parameter Mn. Sedangkan untuk kualitas bakteriologi air sungai, berdasarkan sifat biologi digunakan dua parameter yaitu total Coli dan E Coli. Sampai tahun 2019 parameter biologi belum dapat diperiksa karena keterbatasan tenaga dan sarana yang ada di Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. Mulai tahun 2020 pengukuran parameter Coli dan E-Coli dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran kualitas air sungai yang lebih valid.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Lombok Barat dilakukan 3 (tiga) kali setahun pada 11 sungai. Pada tahun 2023 ada 47 titik pemantauan yang dilakukan kolaborasi antara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, DLHK Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 memiliki angka indeks kualitas air yaitu 48,95 dan berada dalam kondisi Kurang. Kondisi ini perlu diperhatikan dan dilakukan upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang

berkontribusi pada kualitas air sungai. Hal ini perlu dilakukan karena terdapatnya 22 (Dua puluh dua) titik pantau memenuhi baku mutu, 15 titik cemar ringan, 8 titik kondisi sedang dan 2 titik kategori cemar berat. Pencapaian realisasi 115,17% dari target Renstra, dimana dari target Indeks kualitas air 42,50 terealisasi 48,95. Pencapaian dari target Renstra memang lebih tinggi akan tetapi dilihat dari kategori masih termasuk kategori Kurang. Kondisi sungai di beberapa titik yang dipantau masih dibawah standar baku mutu yang ditetapkan disebabkan beberapa hal yaitu tingkat kesadaran masyarakat/Industri tentang pencegahan pencemaran sungai masih rendah; Sungai yang dibawah standar baku mutu rata-rata berlokasi didaerah tambang yang disebabkan pembuangan limbah industri pertambangan yang tidak sesuai prosedur.

Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana alat laboratorium dalam pemantauan kualitas air sungai
- b. Lembaga penyelenggara kalibrasi alat laboratorium untuk akurasi hasil pengujian yang belum ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga harus dilaksanakan di Pulau Jawa.
- c. Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Barat belum terakreditasi
- d. Diperlukan tanggung jawab banyak pihak dalam usaha menjaga kualitas air sungai baik dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Pengadaan peralatan Laboratorium lingkungan yang memadai dan peningkatan SDM laboratorium melalui diklat dan pelatihan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi pencemaran air.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kualitas air sungai.

3. Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan SNI 7645-2010, tutupan lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengukuran, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Menurut UU No. 4 tahun 2011, penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Dimana tutupan lahan difungsikan untuk penyerapan polutan tertentu serta menjaga debit air dan mengurangi erosi sedimentasi. Untuk ketersediaan data tutupan lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lombok Barat berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.

Data Tutupan Lahan Kabupaten yang diperoleh adalah dari hasil analisis citra satelit dapat dilihat bahwa angka indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 yaitu 49,17 dan berada dalam kondisi kurang.

Faktor keberhasilan

Melakukan Program kegiatan yang mendukung peningkatan tutupan lahan ditingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ada antara lain :

- a. Kegiatan HMPI (Hari Menanam pohon Indonesia)
- b. Konservasi Kawasan Esential Mangrove
- c. Reklamasi Lahan Eks Tambang Galian Non Logam
- d. Penanaman pohon tutupan vegetasi
- e. Penanaman pohon disekitar mata air

Upaya peningkatan kinerja

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah propinsi untuk meningkatkan tutupan lahan diwilayah Lombok Barat
- b. Berkoordinasi dengan lintas sektoral dalam mempertahankan luas kawasan pertanian sebagai salah satu komponen tutupan lahan.

12. Menurunnya Risiko Bencana

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Persentase Capaian (%)
Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,67	0,81	120,90

Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3.48 Capaian kinerja Indikator Sasaran

Indikator sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
Indeks Ketahanan Daerah	1. persentase cakupan pelayanan terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran sesuai standar response time (Dinas Damkar)	80	73,42	91,78
	2. persentase layanan penanggulangan bencana (BPBD)	100	100	100

1. Persentase Cakupan Pelayanan Terhadap Pencegahan, Penanggulangan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Sesuai Standar *Response Time*

Faktor Kegagalan

- a. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasi pemadaman dan penyelamatan masih sangat minim
- b. Belum adanya data pemetaan potensi kebakaran atau Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang menjadi dasar penentuan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- c. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi standar yang dibutuhkan

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Membentuk Relawan di tingkat desa/Kecamatan
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Kedaruratan Bahaya Kebakaran dalam Sistem SKIK (Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran)
- c. Mengembangkan Kualiatas SDM.
- d. Mengembangkan secara berkala sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional dan lain-lainnya.

2. Persentase Layanan Penanggulangan Bencana

BPBD Kabupaten Lombok Barat memiliki 27 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil tersebut, dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Lombok Barat juga dibantu oleh satuan tugas operasional yaitu Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta Team Siaga Bencana Daerah sebanyak 44 Orang. Pusdalops PB membantu tugas BPBD Kabupaten Lombok Barat dalam bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Lombok Barat pada saat terjadi bencana yaitu melakukan assesment awal dan evakuasi Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

Faktor Keberhasilan

- a. Respon cepat kurang dari 30 menit setelah ada laporan terhadap kejadian bencana sepanjang tahun 2023 didukung dengan tersajinya laporan Kejadian Bencana.
- b. Aktivasi sistem komando tanggap darurat dengan terbentuknya Tim Kaji Cepat dan Tim Reaksi Cepat.
- c. Ditetapkannya status Keadaan Darurat terhadap beberapa lokasi kejadian, rata rata dikeluarkan setelah 24 jam.

- d. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat dengan tersalurnya kebutuhan sembako pada saat kejadian agar terjaminnya penghidupan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan air bersih terhadap daerah yang kekurangan air akibat bencana kekeringan agar kelangsungan hidup masyarakat terjamin.

Upaya Peningkatan Kinerja

- a. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- c. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana.

III-3. AKUNTABILITAS KEUANGAN**Tabel 3.49 Realisasi Anggaran Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REAL	SISA	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	88.77	89.12	100.39%	128,815,077,530	99,125,939,344	29,689,138,186	76.95%
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100.00%	986,279,453,954	952,195,854,857	34,083,599,097	96.54%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	81	66.72	82.37%	6,922,195,090	6,095,407,831	826,787,259	88.06%
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	90	93.84	104.27%	50,685,439,133	43,415,686,535	7,269,752,598	85.66%
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	98.09	98.56	100.48%	21,308,625,000	20,665,095,180	643,529,820	96.98%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	83.82	93.53	111.58%	24,388,432,360	22,332,281,000	2,056,151,360	91.57%
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15.45	19.14	123.88%	208,493,398,559	210,646,481,184	(2,153,082,625)	101.03%
		Nilai PDRB Perkapita	15,36	14,87	96.81%	6,201,474,500	5,854,441,100	347,033,400	94.40%
		Nilai Realisasi investasi				563,143,225	418,039,575	145,103,650	74.23%
		Penanaman Modal Asing (PMA)	153880388	33309432	21.65%				
		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	713,571,071,915	696,060,756,054	97.55%				

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

bab 3

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REAL	SISA	%
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	13.07	13.67	95.41%	41,928,431,007	33,357,294,696	8,571,136,311	79.56%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	3,12	96.00%	27,617,510,812	22,496,998,464	5,120,512,348	81.46%
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	67,68	71,94	106.29%	137,170,180,342	131,263,710,006	5,906,470,336	95.69%
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	7	6.87	98.14%	4,954,379,763	5,461,494,100	(507,114,337)	110.24%
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.25	13.98	98.11%	166,064,575,872	161,936,211,901	4,128,363,971	97.51%
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	810	748	92.35%	11,061,923,296	10,778,724,823	283,198,473	97.44%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,00	90.41	99.35%				
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	88.12	91.69	104.05%	13,418,051,629	12,952,842,650	465,208,979	96.53%
		Indeks Kualitas Air Sungai	42.5	48.95	115.18%				
		Indeks Kualitas Lahan	46.25	49.17	106.31%				
12	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.67	0.81	120.90%	697,636,024	673,894,274	23,741,750	96.60%
TOTAL					98.62%	1,836,569,928,096	1,739,670,397,520	96,899,530,576	94.72%

III-4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2023**Tabel 3.50 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN				
			% KINERJA	TARGET	REAL	EFISIENSI	% EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	100.39%	128,815,077,530	99,125,939,344	29,689,138,186	23.05%
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	100.00%	986,279,453,954	952,195,854,857	34,083,599,097	3.46%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	82.37%	6,922,195,090	6,095,407,831		
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian wilayah	104.27%	50,685,439,133	43,415,686,535	7,269,752,598	14.34%
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	100.48%	21,308,625,000	20,665,095,180	643,529,820	3.02%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	111.58%	24,388,432,360	22,332,281,000	2,056,151,360	8.43%
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	123.88%	208,493,398,559	210,646,481,184		
		Nilai PDRB Perkapita	96.81%	6,201,474,500	5,854,441,100		
		Nilai Realisasi investasi		563,143,225	418,039,575		
		Penanaman Modal Asing (PMA)	21.65%				
		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	97.55%				
7	Meningkatnya Kemandirian	Angka Kemiskinan	95.41%	41,928,431,007	33,357,294,696		

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

bab 3

	Ekonomi Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	96.00%	27,617,510,812	22,496,998,464		
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	106.29%	137,170,180,342	131,263,710,006	5,906,470,336	4.31%
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	98.14%	4,954,379,763	5,461,494,100		
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	98.11%	166,064,575,872	161,936,211,901		
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	92.35%	11,061,923,296	10,778,724,823		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99.35%				
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	104.05%	13,418,051,629	12,952,842,650	465,208,979	8.43%
		Indeks Kualitas Air Sungai	115.18%				
		Indeks Kualitas Lahan	106.31%				
12	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	120.90%	697,636,024	673,894,274	23,741,750	3.40%
TOTAL			98.62%	1,836,569,928,096	1,739,670,397,520	80,137,592,126	4.36%

Akuntabilitas Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan seluruh program sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan dokumen rencana tahunan.

Pendapatan daerah berdasarkan LRA (laporan realisasi anggaran) tahun 2023 adalah Rp. 1,836,569,928,096 yang terbagi ke dalam 12 sasaran strategis dan 20 Indikator kinerja daerah. Walaupun nilai ini menurun dari tahun sebelumnya, capaian kinerja Pemda **Sangat Tinggi** yaitu 98,62%, bahkan mengalami kenaikan sebesar 4,54% dari tahun sebelumnya.

Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 1,739,670,397,520 atau terserap sebesar 94,72% dari total pendapatan daerah Rp. 1,836,569,928,096. Adapun Sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah 96,899,530,576 atau 5,28%. Dalam sisa anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 80,113,850,376 atau 4,36% dari 7 sasaran strategis (8 indikator kinerja utama) daerah yang telah tercapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunakan harga di bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.

IV. INOVASI DAN PRESTASI KERJA

IV-1. INOVASI DAERAH

Kabupaten Lombok Barat merumuskan program pembangunan daerah dengan mekanisme program prioritas yang memayungi beberapa program perangkat daerah yang mendukung ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Program prioritas atau Indikator Kinerja Utama akan dijabarkan melalui program unggulan yang dilaksanakan masing – masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Selain itu, Program Unggulan Kabupaten Lombok Barat juga tentunya memiliki sinergitas dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat demi ketercapaian tujuan bersama. Hal ini juga dalam upaya mendorong seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berinovasi.

Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang innovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang innovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/pelayanan publik.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah dijabarkan ke dalam program unggulan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78A tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022)

1. SI PEKA BU SISKI (Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga) - Dinas Kesehatan
2. GERCEP DULANG MAS (Gerak Cepat Dukung Penanggulangan Masalah Anak Stunting) - Dinas Kesehatan
3. GEMADAZI (Gerakan Masyarakat Sadar Gizi) - Dinas Kesehatan
4. BERPIJAK SEHAT (Beriuk Pinak Jamban Keluarga Sehat) - Dinas Kesehatan

5. BKB EMAS (Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting) - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. DESI COVUDARAT IMAS - Puskesmas Gerung
7. BERSIUL LIMIT - Puskesmas Gerung
8. PR JANDA (Periksa Jentik Cegah Demam Berdarah) - Puskesmas Gerung
9. Pemantauan Kesehatan WUS Melalui Pemeriksaan IVA dan Deteksi Dini Kanker Serviks (Mantan Lupa dek Narsis) - Puskesmas Perampuan
10. Inovasi Program Penyuluhan Keliling (Proling) - Puskesmas Perampuan
11. OBISA (Pijat Bayi Berbasis Budaya Sasak) - Puskesmas Kediri
12. OLGA BERLIAN (Olahraga Bersama Lansia) - Puskesmas Kediri
13. KUPETE JIMAT (Kunjungan Cepat Gangguan Jiwa) - Puskesmas Kediri
14. KECIAL KUNING (Kelola Tingkat Gizi Kurang Stunting) - Puskesmas Kediri
15. PATAMORGANA (Pemantauan Tanaman Obat Keluarga Sederhana) - Puskesmas Kediri
16. PANTING (Pantau Stunting) - Puskesmas Kuripan
17. JALINAN CINTA BIDAN- Puskesmas Kuripan
18. MANTAP BUNDA (Makanan Tepat Buat Ananda) - Puskesmas Kuripan
19. MAKAN BERAYAN - Puskesmas Kuripan
20. Kelas Hipertensi - Puskesmas Kuripan
21. Rehatmin Fe (Remaja Sehat Minum Fe) - Puskesmas Sedau
22. PETASAN SKRINING COVID-19 (Peningkatan Standar Pelaksanaan Skrining Covid-19) - Puskesmas Sedau
23. TOS MADUT (Temukan Obati Sampai Sembuh Dengan Masyarakat Peduli TB) - Puskesmas Lingsar
24. KAMPUNG / DESA SEHAT - Puskesmas Lingsar
25. SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data) - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

26. Si BeGaYa (Silahkan Beli Garam Rakyat) - Dinas Kelautan dan Perikanan
27. GEMARIKAN (Gerakan Makan Ikan) - Dinas Kelautan dan Perikanan
28. APLIKASI AYO KE LOMBOK - Dinas Pariwisata
29. GERDUMENTE (Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan) - Inspektorat
30. SIKAT (Survei Indeks Kepuasan Masyarakat) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31. SI IPO (Sistem Ijin Penelitian Online) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32. Strategi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui “Gardu Jaket” (Gerakan Terpadu Kejar Paket) - H. Akhmad Saikhu, SE, MM (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
33. LO BISA (Sejelo Bina Desa) - Kecamatan Narmada
34. OPLAS AWET MUDA - Kecamatan Narmada
35. Nyambang Desa - Kecamatan Lingsar
36. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (PUSDATU KESSOS) - Lalu Martajaya, S.Pi., M.M (Dinas Sosial)
37. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Si Jempol Jari) - Suparlan, S.Sos (Badan Pendapatan Daerah)
38. JAGA DESA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
39. KUMIS PAK RADEN (Kamis Manis Minum Obat dengan Benar) - RSUD Patut Patuh Patju
40. Lean Managemen - RSUD Patut Patuh Patju
41. SI POP CETAR (pemantauan ibu pasca bersalin) - RSUD Patut Patuh Patju
42. RASI DOE INAK KAKKE (pelayanan terintegrasi pada bayi baru lahir) - RSUD Patut Patuh Patju
43. SI CATPOR IMUT (Sistem Pencatatan Indikator Mutu Rumah Sakit) - RSUD Patut Patuh Patju
44. Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Komputer Melalui P4 (Penataan

- Penginventarisasian Pemeliharaan dan Pemanfaatan) di SMPN 4 Kuripan Kec. Kuripan) - Nonik Fatmala, S.Pt (SMPN 4 Kuripan)
45. Penggunaan Media Video Animasi Pembelajaran demi Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Tik Di Kelas VII SMPN 4 Sekotong - Novitasari Putri, S.Pd (SMPN 4 Sekotong)
 46. Pengolahan Limbah Menjadi Biogas Mini Rumah (BIOMIRU) - Erliana Siswati, S. Pd (SDN 1 Narmada)
 47. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN 1 Senggigi Dengan Media Serangga (Stik eskrim dan ular tangga). - Muazatul Wardi, S.Pd (SDN 1 Senggigi)
 48. Optimalisasi Kemampuan dan Minat Membaca Siswa Melalui Pohon Literasi dan Metode Talking Stick pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Senggigi Kabupaten Lombok Barat - Nina Mariani, S.Pd (SDN 1 Senggigi)
 49. Menerapkan Media Pembelajaran” Kartu Huruf Bergambar” dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Mengenal Huruf - Ni Wayan Trisna Wati,S.Pd (SDN 2 Sekotong Tengah)
 50. Penerapan Model Pembelajaran Snow Ball Throwing Guna Meningkatkan Hasil Belajar IPA - Ni Wayan Budi Artini,S.Pd (SDN 3 Taman Baru)
 51. Peningkatan Kemampuan Berhitung Operasi Perkalian Bilangan Menggunakan Teknik Polamatika Pada Siswa Kelas IV di SDN 4 Pelangan Kecamatan Sekotong - Ni Putu Ria Apriani, S. Pd (SDN 4 Pelangan)
 52. Link and Match Tabel Punet Kancing Genetika pada Pewarisan Sifat Makhluk Hidup - Lalu Ukir, S.Pd (SMPN 1 Gunungsari)
 53. Pelayanan Informasi Orang Tua Murid Melalui Aplikasi Website Sekolah (PROMOSILAH) - Sudomo, S.Pt (SMPN 3 Lingsar)
 54. SI LADA MAS (Sistem Pelaporan Keberadaan Ormas - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 55. GERTAK PANGAN (Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu Berbasis Pekarangan) - Dinas Ketahanan Pangan
 56. E - DEDORO (Bank Sampah berbasis Desa) - Dinas Lingkungan Hidup
 57. GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek) - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peempuan dan Perlindungan anak

58. GERASAK (Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
59. KABARKU PASTI - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60. STRATEGI MARKETING PRODUK UMKM DENGAN E-LAPAK “SITEBEL” - Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
61. STRATEGI PELAYANAN INFORMASI PASAR TENAGA KERJA - Dinas Tenaga Kerja
62. E-KIR LOMBAR - Dinas Perhubungan
63. SIPAKALING (Sistem Pelayanan Informasi Keliling) - Kec. Sekotong
64. SELARAS (Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65. Aning Solah Sugih (Anti Stunting, Sekolah Sampai Kuliah, Sukses Graduasi Mandiri Sejahtera) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66. SI-PASU (Sistem Informasi Pangkat dan Pensiun) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

IV-2. Prestasi Kabupaten Lombok Barat

1. Universal Health Coverage (UHC), sebuah Terobosan peningkatan pelayanan masyarakat
2. Predikat WTP atas LKPD dari BPK selama 9 tahun berturut-turut.
3. Rumah Sakit Umum Patut Patuh Patju Gerung naik kelas dari tipe C ke tipe B
4. Rumah Sakit Awet Muda Narmada naik kelas dari tipe D ke tipe C
5. Kabupaten Lombok Barat menjadi yang terbaik pada penilaian TPID berprestasi untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
6. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali meraih anugerah terbaik Keterbukaan Informasi Publik
7. Pemkab Lombok Barat menerima penghargaan sebagai Kabupaten informatif versi Komisi Informasi NTB
8. Desa sesaot terima sertifikasi desa wisata berkelanjutan dari KEMENPAREKRAF RI
9. Bupati Lombok Barat menerima apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas keberhasilannya melakukan pembukaan rekening nasabah bank sampah terbanyak
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendapat Piagam Penghargaan Atas Prestasi Kabupaten/Kota terbaik dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok TNI-Polri serta menjaga Kamtibmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

11. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat predikat kepatuhan tinggi pelayan publik dari OMBUDSMAN RI
12. Bupati Terima Penghargaan Dari Plan International Indonesia Bidang Pencegahan Perkawinan Anak
13. Pemda Lombok Barat Raih Predikat Nindya Kabupaten Layak Anak 2023
14. Menerima penghargaan lencana bakti pembangunan desa dari MENTERI DESA PDTT RI
15. pejabat dan Kepala Desa di Lombok Barat raih anugerah TIMES INDONESIA
16. Ekspor Kopi ke Kanada, Amerika dan negara Eropa lainnya
17. Ekspor Manggis ke negara Dubai UEA
18. Meluncurkan mesin CNC Plasma cutting merek Minger

V. PENUTUP

V-1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian terhadap 20 sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dapat diketahui terdapat 18 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator kinerja sasaran dengan kategori **Tinggi** dan 1 indikator dengan kategori **Rendah**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Kategori
					Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,77	89,12	100,39	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	81,00 (A)	66,72 (B)	82,37	Tinggi
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	90,00	93,84	104,27	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,09	98,56	100,48	Sangat Tinggi
		6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	83,82	93,53	111,58	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,45	19,14	123,88	Sangat Tinggi
		8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15,36	14,87	96,81	Sangat Tinggi

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Kategori
					Target	Realisasi	%	
		9	Nilai Realisasi investasi				59,60	Rendah
			Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	153,88	33,30	21,65	
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	713,57	696,06	97,55	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	%	13,07	13,67	95,41	Sangat Tinggi
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,00	3,12	96,00	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,68	71,94	106,29	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	6,87	98,14	Sangat Tinggi
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,25	13,98	98,11	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	810,00	748,00	92,35	Sangat Tinggi
		16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,00	90,41	99,35	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,12	91,69	104,05	Sangat Tinggi
		18	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,50	48,95	115,18	Sangat Tinggi
		19	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,25	49,17	106,31	Sangat Tinggi
12	Menurunnya Risiko Bencana	20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,67	0,81	120,90	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja							98,62	

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan seluruh program sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan dokumen rencana tahunan. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 1,739,670,397,520 atau terserap sebesar 94,72% dari total pendapatan daerah Rp. 1,836,569,928,096. Adapun Sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah 96,899,530,576 atau 5,28%. Dalam sisa anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 80,113,850,376 atau 4,36% dari 7 sasaran strategis (8 indikator kinerja utama) daerah yang telah tercapai 100%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunakan harga di bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.

V-2. Upaya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja

- a. Mewujudkan perubahan yang menyeluruh dan dilakukan secara konsisten. Perubahan tersebut mencakup: revitalisasi, restukturisasi, dan deregulasi, peningkatan profesionalisme aparat dan partisipasi masyarakat, korporatisasi, e-government, pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- c. Mengoptimalkan pembangunan di daerah karena mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena memiliki manfaat yang signifikan bagi pembangunan, antara lain penciptaan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam proses pembangunan.
- e. Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit untuk melindungi masyarakat penerima maupun pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Meningkatkan ketahanan daerah melalui cara mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, meningkatkan profesionalitas aparaturnya dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana.